LAPTAH 2017

SEDERHANA

CEPAT

BIAYA RINGAN

Laporan Tahunan 2017
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Jalan Radin Inten II no 3 Duren Sawit Jakarta Timur
Telp. 021-86902313/ Fax. 021-86902314
Email : ptajakarta2017@yahoo.co.id
Website : www.pta-jakarta.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahNya kepada keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sehingga dapat menyelesaikan laporan tahunan 2017 ini. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat serta ummat yang selalu setia hingga akhir zaman.

Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2017 sebagai bahan evaluasi, baik bagi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta, maupun bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan Tahunan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta kepada pimpinan peradilan di atasnya (Mahkamah Agung RI) dengan harapan akan mendapatkan penilaian dan bimbingan sepenuhnya guna penyempurnaan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada masa yang akan datang.

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2017 ini disajikan dengan harapan semoga semua pihak yang berkepentingan berkenan memberikan kritik dan saran bagi optimalisasi pencapaian Visi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta :

”TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA YANG AGUNG”.

Dengan tersusunnya laporan tahunan 2017 ini kami memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada segenap Tim Penyusun dan semua warga Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang telah melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh demi terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta yang agung, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Jakarta, Januari 2018
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Drs. H. M. YAMIN AWIE, S.H., M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Bab I Pendahuluan 1

Bab II Struktur dan pelayanan prima 8
A. Struktur Organisasi 8
- Standar Operasional Prosedur (SOP) 11
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 82

B. Pelayanan Publik Yang Prima 102
- Akreditasi Penjaminan Mutu 102
- Posyankum 104
- Sidang Keliling 104
- Perkara Prodeo 105

Bab III Pembinaan dan Pengelolaan 106
A. Sumber Daya Manusia 106
- Mutasi 120
- Promosi 123
- Pensiun 123
- Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah diikuti 124

B. Penyelesaian Perkara 135
- Jumlah sisa perkara yang diputus 137
- Jumlah perkara yang di putus tepat waktu 138
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
- Banding, Kasasi dan PK 138
- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi 138

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 136
D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis 155
E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP 160
- Pubkilasi Perkara (one day one publish) 153

F. Regulasi Tahun 2017 161

Bab IV Pengawasan 163
A. Internal 163
B. Evaluasi 165

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 166
A. Kesimpulan 166
B. Saran 166

LAPTAH 2017

BAB V

PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaaan kehakiman dalam melaksanakan program dan kegiatannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025.

RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi. Amanat tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015- 2019 yang menetapkan bahwa reformasi birokrasi merupakan prioritas pembangunan nasional.

Gambar 1 : Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia

Reformasi Birokrasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya diterbitkan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi pada Lembaga Negara / Kementerian termasuk Mahkamah Agung.

Pada tahun 2007 Mahkamah Agung tercatat sebagai salah satu lembaga Negara yang ditetapkan Pemerintah sebagai pelaksana reformasi birokrasi percontohan dengan Kementerian Keuangan, BPK dan Kementerian PAN.

Penetapan Mahkamah Agung sebagai proyek percontohan reformasi birokrasi secara otomatis harus dilakukan pula oleh badan-badan peradilan yang berada dibawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta.

Gambar 2 : Gedung Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Posisi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta di Ibukota Negara diharapkan dapat menjadi *project* atau etalase *performance* peradilan tingkat Banding dan peradilan tingkat pertama se-Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam penetapan reformasi birokrasi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya yang lebih memadai, salah satunya seperti memanfaatkan teknologi informasi dengan tersedianya website, dan berbagai macam aplikasi pendukung untuk meningkatkan pelayanan informasi terhadap para pencari keadilan.

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah terkait sarana dan prasarana yaitu gedung kantor yang ditempati saat ini adalah pinjam pakai gedung milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan gedung kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur yang belum mengikuti prototype. Selain itu keterbatasan terhadap ketersediaan alat pengelolaan data untuk mendukung pemantapan *e-governance*, keterbatasan

kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan budget yang ada.

Namun demikian, dengan culture yang ada di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta, senantiasa berjuang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2017 telah menetapkan arah kebijakan dalam mendukung peningkatan kinerjanya dan Pengadilan Agama se- DKI Jakarta dengan memprioritaskan tersedianya sarana dan prasarana kinerja yang memadai termasuk modernisasi perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan teknologi informasi, dan terwujudnya aparatur peradilan yang professional dan berintegritas serta ketersediaan anggaran yang memadai.

Dalam mendukung transparansi peradilan, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se- DKI Jakarta telah mempunyai website sebagai sarana pendukung kemudahan untuk memperoleh layanan informasi. Dalam hal penyiapan sarana dan prasarana yang memadai harapannya dapat segera tersedianya gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan gedung kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur yang sesuai *prototype* dan peningkatan sarana prasarana pendukungnya, menetapkan prioritas optimalisasi pelayanan masyarakat pencari keadilan, peningkatan sarana dan prasarana kinerja, maksimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

A. Visi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta sebagai salah satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, yang sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menetapkan **VISI** yaitu: **"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang Agung"**

B. Misi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta :

Misi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta terdapat perubahan seiring adanya reviu ke satu rencana strategis tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat tehadap sistem peradilan;
2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat terhadap sistem peradilan;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan

Upaya mengkonkritkan visi dan misi tersebut, diperlukan suatu penelahaan mendalam atas segala permasalahan yang ada, penetapan rencana dan strategi yang tepat, serta penyusunan program kerja yang komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam rangka itulah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI Jakarta menyusun Laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun ini, dengan tujuan agar laporan ini dapat menjadi bahan kajian, evaluasi dan proyeksi kedepan sekaligus memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di DKI Jakarta, karena seiring dengan semakin berkembangnya arus informasi maka menjadikan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se- DKI Jakarta yang prima.

C. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2015-2019

1. Kondisi Umum

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai salah satu kawal depan Makamah Agung meskipun hanya mempunyai yurisdiksi di 5 (lima) Pengadilan Agama, namun karena kedudukan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se- DKI Jakarta di Ibukota Negara, sehingga menjadi acuan dan standar kinerja bagi peradilan lainnya, maka sudah barang tentu beban tugas pun menjadi sangat berat, baik yang berkaitan dengan pembangunan system kerja yang ideal, pembinaan peningkatan sumber daya manusia maupun yang berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja dan ada anggaran yang memadai, sehingga terciptanya pelayanan prima bagi semua masyarakat pencari keadilan.

Dalam mendukung transparansi peradilan, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta telah mempunyai

website sebagai sarana penunjang kemudahan untuk memperoleh layanan informasi serta beberapa Pengadilan Agama telah mempunyai bangunan gedung prototipe. Dalam mewujudkan peradilan yang agung, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta masih menetapkan prioritas penyediaan/pembangunan gedung kantor yang sesuai prototipe, peningkatan sarana dan prasarana kelengkapan gedung, optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai program prioritas, serta tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan kuantitasnya mencukupi, serta anggaran yang memadai bagi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta, yaitu Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pengadilan Agama Jakarta Utara, Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Potensi dan Permasalahan

a. Kekuatan (*Strength*)

1) Merupakan *voorpost* (kawal depan) di wilayah propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempunyai hubungan baik dengan pemerintah daerah propinsi DKI Jakarta.
3) Merupakan pengambilan keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai di yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
4) Adanya website Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara yang terdapat dalam SIPP

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan - kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat dirinci dalam beberapa aspek :

1) Belum memiliki standarisasi mekanisme dan evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat dari pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
2) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai dengan kebutuhan Pengadilan.
3) Terbatasnya jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

4) Belum efektifnya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis Teknologi Informasi.
5) Sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai dan ketersediaan Anggaran yang terbatas.

c. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding yang mempunyai kedudukan yang sama dengan empat Lingkungan Tingkat Banding lainnya
2. Adanya kemudahan mengakses Informasi apapun dari Mahkamah Agung dan Lembaga lainnya.
3. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai Motivasi dalam peningkatan kinerja.
4. Adanya sosialisasi bimbingan teknis pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Adanya kemudahan mencari Narasumber yang kapabilitas dalam melakukan bimtek di tempat kerja dari Mahkamah Agung.
6. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan Badan Pemeriksa Keuangan RI secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
7. Adanya pembinaan yang dilakukan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI terhadap Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan jajarannya.
8. Dukungan dan koordinasi yang baik antar instansi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
9. Lokasi gedung Pengadilan Agama se DKI Jakarta yang mudah dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan atau pihak lain yang berkepentingan.

d. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

1. Beragam/Kompleksitas perkara yang diajukan pada Tingkat Banding, sehingga Hakim-Hakim yang ditempatkan harus mempunyai intensitas, kapabilitas dan professional.
2. Adanya moratorium rekrutmen pegawai oleh pemerintah.

3. Anggaran, Sarana dan Prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

D. Tujuan dan Sasaran Strategi

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 Tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah, sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Terwujudnya kualitas aparatur peradilan;
3. Terwujudnya kualitas pelayanan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan
4. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai untuk dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan hakim;
3. Meningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*Acces To Justice*).
5. Meningkatnya kualitas pengawasan.
6. Meningkatan kualitas SDM.
7. Meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

LAPTAH 2017

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

PELAYANAN PRIMA

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

- Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

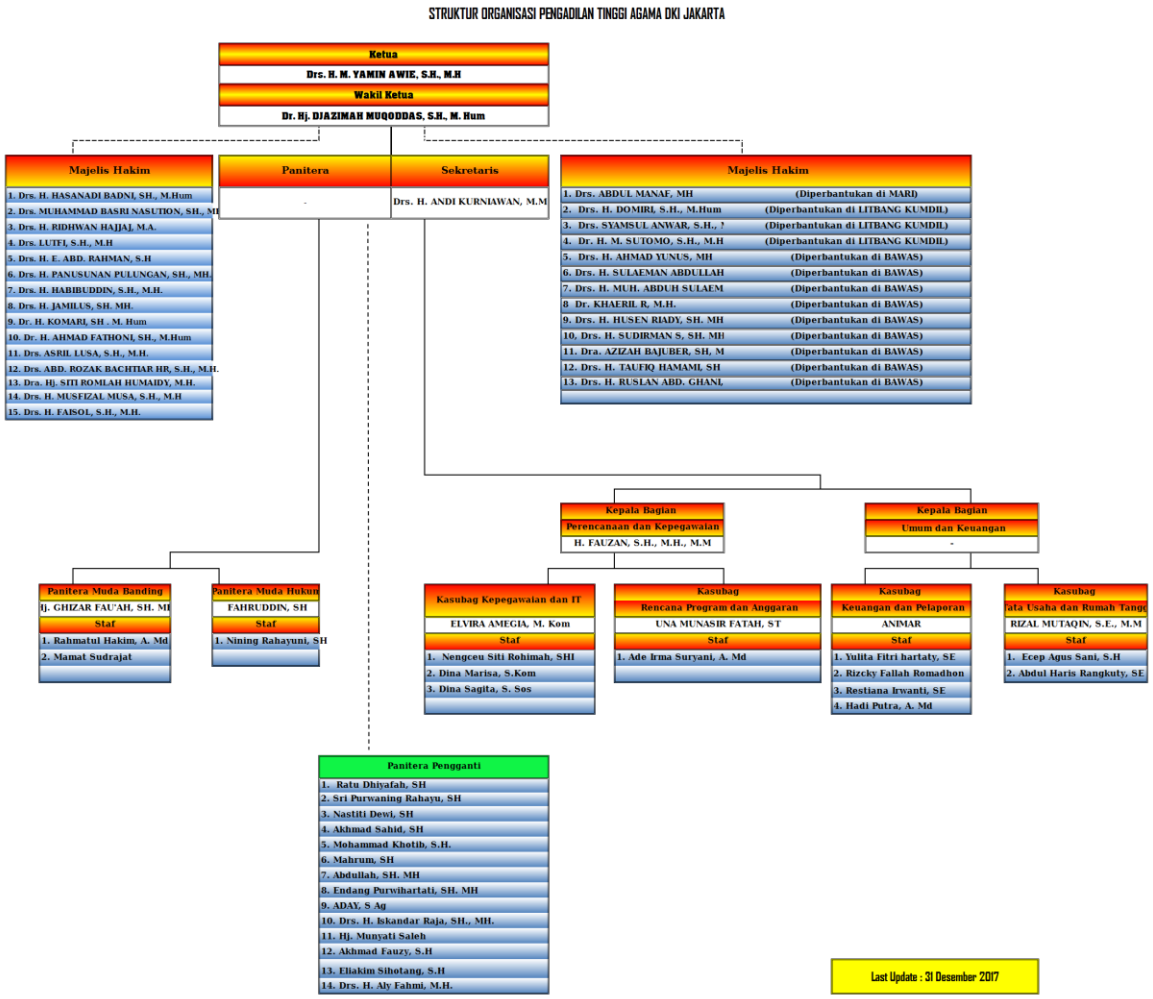

- Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat

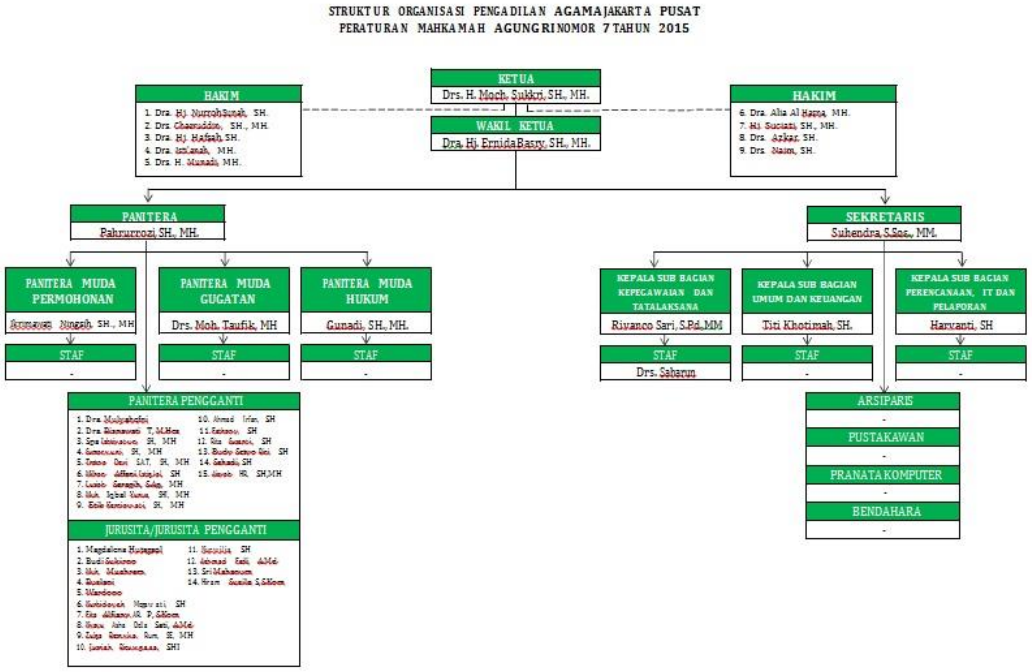

- Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Barat

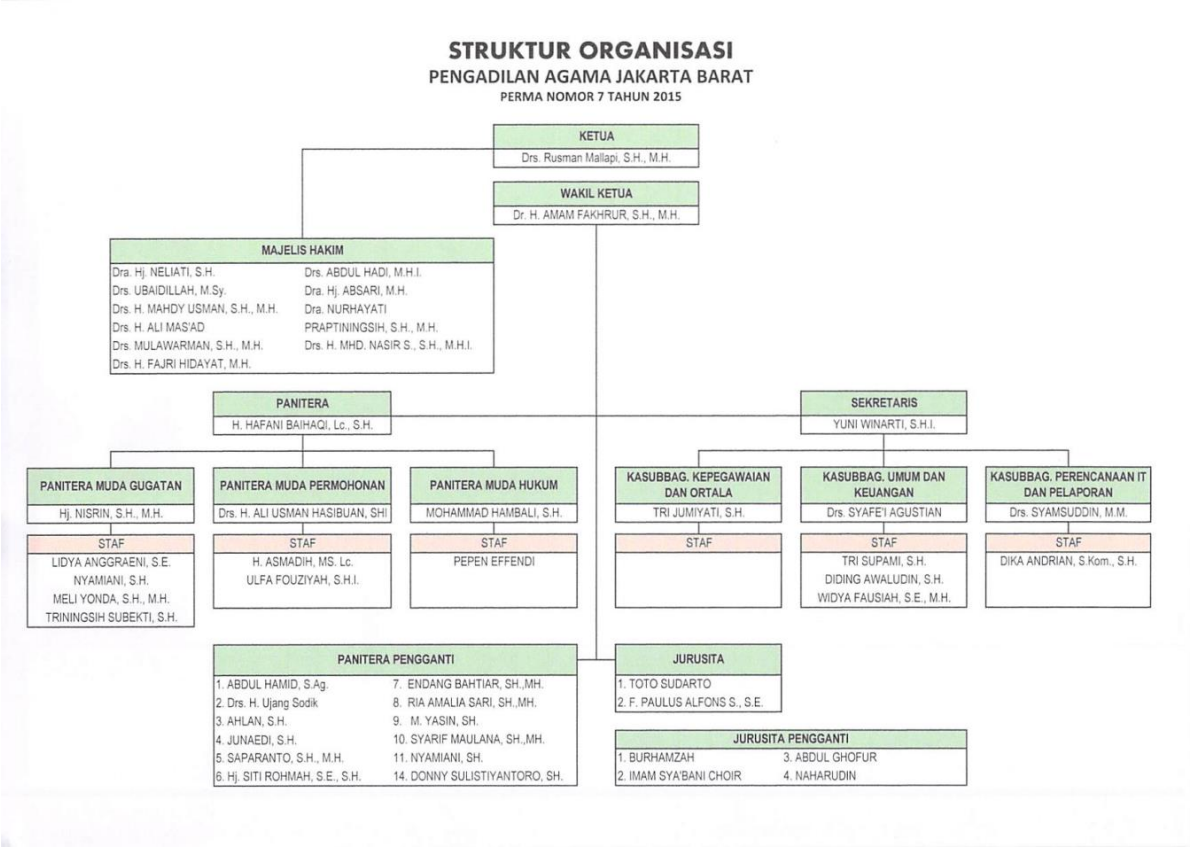

- Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Timur

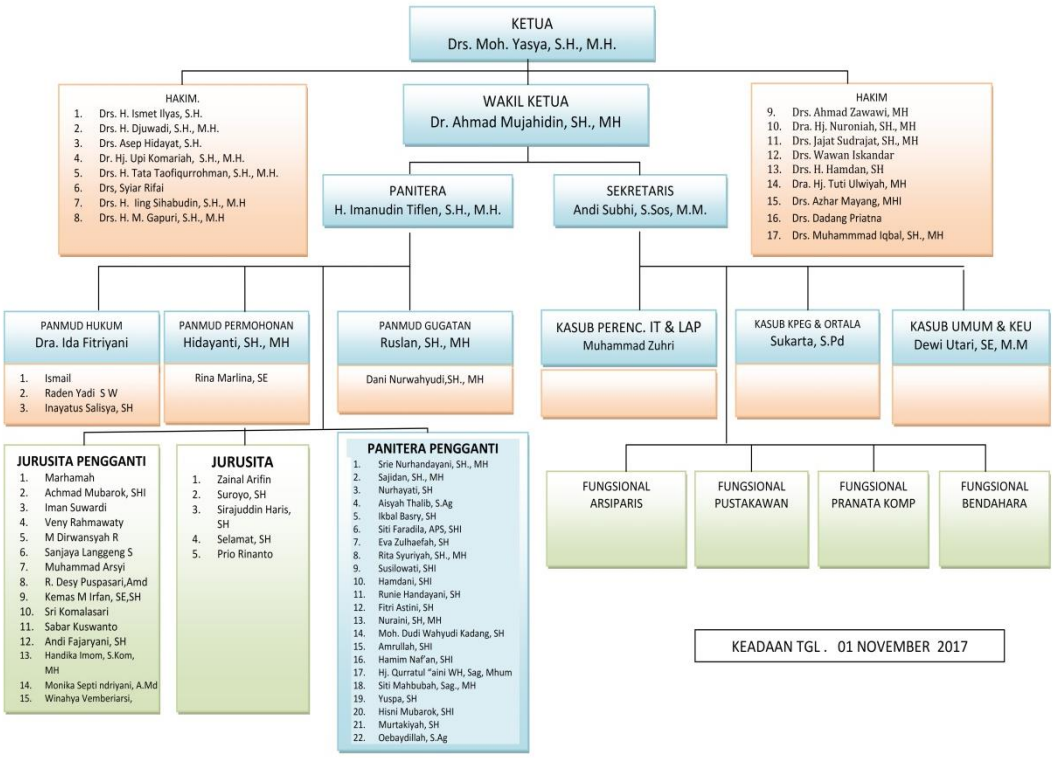

- Struktur Organisasi Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

- Struktur Organisasi Di Pengadilan Agama Jakarta Utara

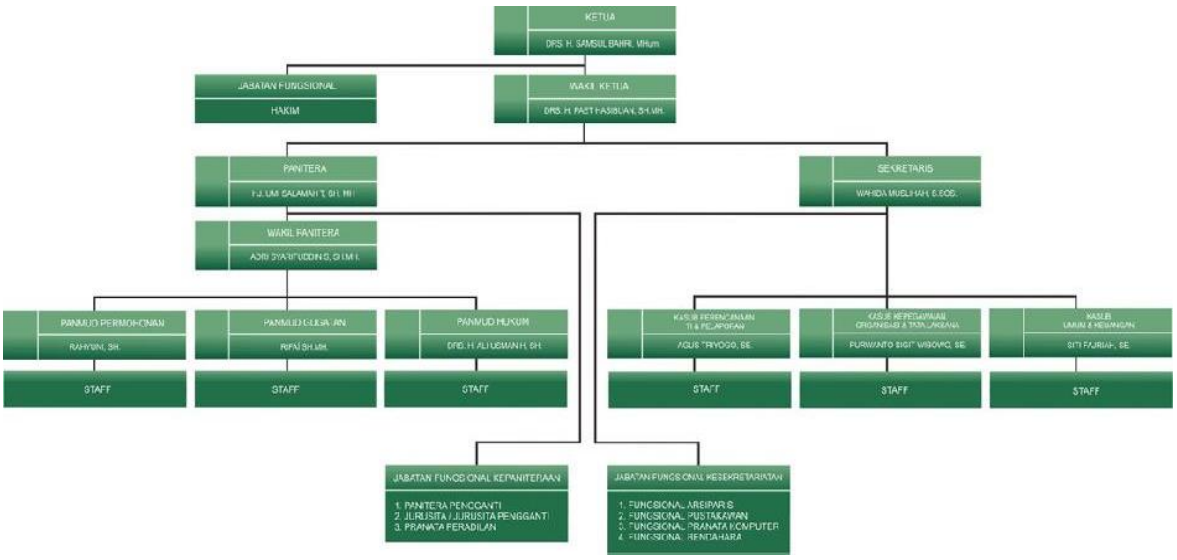

1. Standar Oprasional Prosedur (SOP)

1.1. Standar Operasional Prosedur PTA DKI Jakarta

No	Unit Kerja	Jml	Terdiri dari	Keterangan
I.	**Teknis Pengadilan Tk. Banding**			
1	Ketua	38	1. SOP Distribusi Perkara 2. SOP Pelayanan Data Perkara Bagi Pihak Ketiga 3. SOP Pelayanan Pengaduan Kewenangan Bawas 4. SOP Pelayanan Pengaduan Kewenangan PTA 5. SOP Pengajuan Permintaan Tunjangan Remunerasi 6. SOP Permohonan Penambahan Anggaran Biaya ke Mahkamah Agung 7. SOP Pembahasan Pagu Anggaran Sementara 8. SOP Pembahasan	Sudah di evaluasi 12 Februari 2016

			Pagu Anggaran Indikatif 9. SOP Penyusunan Rencana Strategis/ Reviu Renstra 10. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Reviu IKU 11. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 12. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan 13. SOP Administrasi Surat Masuk/Keluar 14. SOP Pendistribusian Surat Masuk 15. SOP Persiapan Dan Rekapitulasi Presensi Bulanan 16. SOP Pemrosesan Usulan Permohonan Cuti 17. SOP Pembuatan Surat Tugas 18. SOP Mutasi PNS (KPTA Jakarta) 19. SOP Usulan Mutasi Promosi Jabatan (DITJEN BADILAG / Sekretariat MA-RI) 20. SOP Pendefinitipan Pengangkatan PNS (Ketua PTA Jakarta) 21. SOP Usulan Kenaikan Pangkat (SK Ketua PTA Jakarta) 22. SOP Usulan Kenaikan Pangkat Ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI 23. SOP Usul Pensiun Ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI 24. SOP Usul Pensiun Ke Kanreg V BKN Jakarta 25. SOP Proses Izin Belajar 26. SOP Pembuatan KARIS, KARSU, KARPEG, TASPEN 27. SOP Usul	

			Penghargaan dan Tanda Jasa Pegawai 28. SOP Kenaikan Gaji Berkala 29. SOP Penerbitan Surat Keputusan Pembentukan Tim / Per Orangan 30. SOP Ujian Dinas 31. SOP Baperjakat 32. SOP Pembuatan SPP, SPMJ, DAN SPMT 33. SOP Pembuatan Bezetting 34. SOP Pembuatan DUK 35. SOP Pembuatan Senioritas Hakim, Struktur Organisasi Dan Data Lainnya 36. SOP Pembuatan Surat Keluar Untuk Intern dan Ekstern 37. SOP Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Hakim dan PNS 38. SOP Pengusulan Peserta Pendidikan Dan Pelatihan	
2.	Wakil Ketua	6	1. SOP Pelayanan Pengaduan Kewenangan Bawas 2. SOP Pelayanan Pengaduan Kewenangan PTA 3. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Reviu IKU 4. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 5. SOP Presensi Pegawai Harian 6. SOP Baperjakat	Sudah di evaluasi 12 Februari 2016
3.	Hakim	3	1. SOP pemeriksaan perkara 2. SOP pembuatan konsep putusan 3. SOP sidang pengucapan putusan	Sudah di evaluasi 12 Februari 2016

4.	Panitera	3	1. SOP distribusi perkara 2. SOP pengiriman berkas ke pengadilan pengaju 3. SOP pengarsipan berkas perkara	Sudah di evaluasi 12 Februari 2016
5.	Panitera Muda Banding	7	1. SOP pendaftaran perkara banding 2. SOP pemeriksaan perkara 3. SOP pengiriman berkas ke pengadilan pengaju 4. SOP pengarsipan berkas perkara 5. SOP laporan rekap perkara banding 6. SOP pelayanan pengaduan kewenangan bawas 7. SOP pelayanan pengaduan kewenangan PTA	Sudah di evaluasi 12 Februari 2016
6.	Panitera Muda Hukum	8	1. SOP pengarsipan berkas perkara 2. SOP laporan rekap perkara tingkat pertama 3. SOP laporan rekap perkara banding 4. SOP laporan kegiatan hakim 5. SOP laporan rekap perkara tahunan 6. SOP pelayanan data perkara bagi pihak ketiga 7. SOP pelayanan pengaduan kewenangan bawas 8. SOP pelayanan pengaduan kewenangan PTA	Sudah di evaluasi 12 Februari 2016
7.	Panitera Pengganti	6	1. SOP distribusi perkara 2. SOP pemeriksaan perkara 3. SOP pembuatan konsep putusan 4. SOP sidang pengucapan putusan 5. SOP minutasi 6. SOP pengiriman	Sudahdi evaluasi 12 Februari 2016

			berkas ke pengadilan pengaju	
II.	**Non Teknis**			
1.	Sekretaris	44	1. SOP penyusunan laporan calk semesteran dan tahunan 2. SOP penyusunan laporan calk korwil dipa 005.01 semesteran dan tahunan 3. SOP pelaporan sakpa 4. SOP laporan alokasi belanja daya dan jasa 5. SOP surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) 6. SOP pengajuan permintaan tunjangan remunerasi 7. SOP pelaporan sappa-w 8. SOP pembayaran uang makan 9. SOP pendistribusian surat masuk 10. SOP pembuatan *term of reference* (TOR) dan rencana anggaran biaya (RAB) 11. SOP permohonan penambahan anggaran biaya ke mahkamah agung 12. Sop pembahasan pagu anggaran sementara 13. Sop pembahasan pagu anggaran indikatif 14. SOP penyusunan rencana strategis/ reviu renstra 15. SOP revisi anggaran pada kantor wilayah djpb 16. SOP revisi anggaran persetujuan mahkamah agung	Sudah di evaluasi 12 Februari 2016

			17. SOP revisi anggaran melalui revisi pok 18. SOP penyusunan indicator kinerja utama (iku)/reviu iku 19. SOP penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) 20. SOP persiapan dan rekapitulasi presensi bulanan 21. SOP pemrosesan usulan permohonan cuti 22. SOP pembuatan surat tugas 23. SOP mutasi PNS (Ketua PTA DKI Jakarta) 24. SOP usulan mutasi promosi jabatan (Ditjen Badilag / Sekretariat MA-RI) 25. SOP pendefinitipan pengangkatan pns (Ketua PTA Jakarta) 26. SOP usulan kenaikan pangkat (SK Ketua PTA Jakarta) 27. SOP usulan kenaikan pangkat ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI 28. SOP usul pensiun ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI 29. SOP usul pensiun ke Kanreg V BKN Jakarta 30. SOP proses izin belajar 31. SOP pembuatan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen 32. SOP usul penghargaan dan tanda jasa pegawai 33. SOP kenaikan gaji berkala 34. SOP pelantikan 35. SOP penerimaan tenaga honorer 36. SOP ujian dinas 37. SOP BAPERJAKAT	

			38. SOP pembuatan SPP, SPMJ, dan SPMT 39. SOP pembuatan Bezetting 40. SOP pembuatan DUK 41. SOP pembuatan senioritas hakim, struktur organisasi dan data lainnya 42. SOP pembuatan surat keluar untuk intern dan ekstern 43. SOP usul penjatuhan hukuman disiplin bagi hakim dan pns 44. SOP PENGUSULAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
2	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	12	1. SOP penyusunan laporan calk semesteran dan tahunan 2. SOP rekonsiliasi laporan keuangan bulanan ke KPPN 3. SOP pelaporan SPT tahunan wajib pajak 4. SOP penyusunan laporan calk korwil dipa 005.01 semesteran dan tahunan 5. SOP pelaporan SAKPA 6. SOP laporan alokasi belanja daya dan jasa 7. SOP Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) 8. SOP pengajuan permintaan tunjangan remunerasi 9. SOP pelaporan SAPPA-W 10. SOP pembayaran uang makan 11. SOP pendistribusian surat masuk 12. SOP pengelolaan barang persediaan	Sudah di evaluasi 12 Februari 2016
3	Kepala Bagian Perencanaan	35	1. SOP pembuatan *Term Of Reference* (TOR) dan Rencana	Sudah di evaluasi 12 Februari 2016

	dan Kepegawaian		Anggaran Biaya (RAB) 2. SOP permohonan penambahan anggaran biaya ke Mahkamah Agung 3. SOP pembahasan pagu anggaran sementara 4. SOP pembahasan pagu anggaran indikatif 5. SOP penyusunan Rencana Strategis/ Reviu RENSTRA 6. SOP revisi anggaran pada kantor wilayah DJPB 7. SOP revisi anggaran persetujuan mahkamah agung 8. SOP revisi anggaran melalui revisi pok 9. SOP penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Reviu IKU 10. SOP penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 11. SOP persiapan dan rekapitulasi presensi bulanan 12. SOP pembuatan surat tugas 13. SOP mutasi PNS (KPTA Jakarta) 14. SOP usulan mutasi promosi jabatan (Ditjen Badilag / Sekretariat MA-RI) 15. SOP pendefinitipan pengangkatan PNS (Ketua PTA Jakarta) 16. SOP usulan kenaikan pangkat (SK Ketua PTA Jakarta) 17. SOP usulan kenaikan pangkat ke Sekretaris Dan Ditjen Badilag MA RI 18. SOP usul pensiun ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI 19. SOP usul pensiun ke Kanreg V BKN	

			Jakarta 20. SOP proses izin belajar 21. SOP pembuatan KARIS, KARSU, KARPEG, TASPEN 22. SOP usul penghargaan dan tanda jasa pegawai 23. SOP kenaikan gaji berkala 24. SOP pelantikan 25. SOP penerimaan tenaga honorer 26. SOP ujian dinas 27. SOP Baperjakat 28. SOP pembuatan SPP, SPMJ, dan SPMT 29. SOP pembuatan bezetting 30. SOP pembuatan duk 31. SOP pembuatan senioritas hakim, struktur organisasi dan data lainnya 32. SOP pembuatan surat keluar untuk intern dan ekstern 33. SOP usul penjatuhan hukuman disiplin bagi hakim dan PNS 34. SOP Pengusulan Peserta Pendidikan Dan Pelatihan 35. SOP Mengontrol Dan Memperbaiki Kerusakan Hardware & Software	
4	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	14	1. SOP penyusunan laporan E-Monev Bappenas 2. SOP penyusunan laporan CALK semesteran dan tahunan 3. SOP rekonsiliasi laporan keuangan bulanan ke KPPN 4. SOP penyusunan laporan monitoring evaluasi anggaran ke dja kementrian keuangan 5. SOP pengajuan	Sudah di evaluasi 12 Februari 2016

			belanja modal ke KPPN 6. SOP pengajuan uang persediaan ke KPPN 7. SOP penyusunan laporan calk korwil dipa 005.01 semesteran dan tahunan 8. SOP pelaporan SAKPA 9. SOP laporan alokasi belanja daya dan jasa 10. SOP surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) 11. SOP pengajuan permintaan tunjangan remunerasi 12. SOP pengajuan belanja pegawai 13. SOP pelaporan SAPPA-W 14. SOP pembayaran uang makan	
5	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	5	1. SOP pengarahan surat masuk 2. SOP pendistribusian surat masuk 3. SOP pengelolaan barang persediaan 4. SOP pemeriksaan berkalakendaraan dinas pimpinan 5. SOP pengaturan jadwal dan petugas piket	Sudah di evaluasi 12 Februari 2016
6	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran		1. SOP pembuatan *Term Of Reference* (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2. SOP permohonan penambahan anggaran biaya ke Mahkamah Agung 3. SOP pembahasan pagu anggaran sementara 4. SOP pembahasan pagu anggaran indikatif 5. SOP penyusunan rencana Strategis/	Sudah di evaluasi 12 Februari 2016

			Reviu Renstra 6. SOP revisi anggaran pada kantor wilayah DJPB 7. SOP Revisi Anggaran Persetujuan Mahkamah Agung 8. SOP Revisi Anggaran Melalui Revisi Pok 9. SOP penyusunan INDIKATOR Kinerja Utama (IKU)/REVIU IKU 10. SOP penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) 11. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan 12. SOP Administrasi Surat Masuk/Keluar	
7	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi	31	1. SOP persiapan dan rekapitulasi presensi bulanan 2. SOP pemrosesan usulan permohonan cuti 3. SOP pembuatan surat tugas 4. SOP mutasi PNS (KPTA Jakarta) 5. SOP usulan mutasi promosi jabatan (Ditjen Badilag / Sekretariat MA-RI) 6. SOP pendefinitipan pengangkatan pns (Ketua PTA Jakarta) 7. SOP usulan kenaikan pangkat (SK Ketua PTA Jakarta) 8. SOP usulan kenaikan pangkat ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI 9. SOP usul pensiun ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI 10. SOP usul pensiun ke Kanreg V BKN Jakarta 11. SOP proses izin belajar 12. SOP pembuatan karis, karsu, karpeg,	Sudah di evaluasi 12 Februari 2016

			taspen 13. SOP usul penghargaan dan tanda jasa pegawai 14. SOP kenaikan gaji berkala 15. SOP pelantikan 16. SOP penerimaan tenaga honorer 17. SOP penerbitan surat keputusan pembentukan tim / per orangan 18. SOP ujian dinas 19. SOP Baperjakat 20. SOP pembuatan SPP, SPMJ, dan SPMT 21. SOP pembuatan bezetting 22. SOP pembuatan duk 23. SOP pembuatan senioritas hakim, struktur organisasi dan data lainnya 24. SOP pembuatan surat keluar untuk intern dan ekstern 25. SOP pembuatan program kerja dan uraian tugas sub Kepegawaian dan TI 26. SOP usul penjatuhan hukuman disiplin bagi hakim dan pns 27. SOP Pengusulan Peserta Pendidikan Dan Pelatihan 28. SOP mengontrol dan memperbaiki kerusakan hardware & software 29. SOP mengontrol dan back up data-data aplikasi pta 30. SOP mengontrol data konten website PTA 31. SOP monitoring implementasi SIADPTA, SIPP dan aplikasi pendukung lainnya	
8	PPK	5	1. SOP pengajuan belanja modal ke	Sudah di evaluasi 12

			KPPN 2. SOP pengajuan uang persediaan ke kppn 3. SOP pengajuan belanja pegawai 4. SOP pembayaran uang makan 5. SOP pemeriksaan berkalakendaraan dinas pimpinan	Februari 2016
9	Staf Sub Bag Keuangan dan Pelaporan	16	1. SOP penyusunan laporan E-MONEV BAPPENAS 2. SOP penyusunan laporan calk semesteran dan tahunan 3. SOP rekonsiliasi laporan keuangan bulanan ke KPPN 4. SOP penyusunan laporan monitoring evaluasi anggaran ke dja kementrian keuangan 5. SOP pengajuan belanja modal ke KPPN 6. SOP pelaporan spt tahunan wajib pajak 7. SOP pengajuan uang persediaan ke KPPN 8. SOP penyusunan laporan calk korwil dipa 005.01 semesteran dan tahunan 9. SOP pelaporan sakpa 10. SOP laporan alokasi belanja daya dan jasa 11. SOP surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) 12. SOP pembayaran dan validasi pajak 13. SOP pengajuan permintaan tunjangan remunerasi 14. SOP pengajuan belanja pegawai 15. SOP pelaporan sappa-w 16. SOP pembayaran uang makan	Sudah di evaluasi 12 Februari 2016

10	Staf Sub BagTata Usaha dan Rumah Tangga	18	1. SOP penerimaan surat masuk 2. SOP pengarahan surat masuk 3. SOP pencatatan surat masuk 4. SOP pendistribusian surat masuk 5. SOP penataan surat masuk 6. SOP peramu kantor 7. SOP penomoran surat keluar 8. SOP resepsionis 9. SOP pengelolaan barang persediaan 10. SOP pemeriksaan rutin kendaraan dinas pimpinan 11. SOP membersihkan dan memanaskan mesin kendaraan dinas pimpinan 12. SOP mengemudi kendaraan dinas pimpinan 13. SOP pemeriksaan berkalakendaraan dinas pimpinan 14. SOP pengaturan jadwal dan petugas piket 15. SOP pengamanan kantor 16. SOP pengaturan parkir kendaraan 17. SOP kebersihan gedung kantor *18.* SOP pengadaan barang/jasa	Sudah di evaluasi 12 Februari 2016
11	Staf Sub Bag Rencana Program dan Anggaran	10	1. SOP pembuatan *Term Of Reference* (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2. SOP Permohonan Penambahan Anggaran Biaya Ke Mahkamah Agung 3. SOP penyusunan Rencana Strategis/ Reviu Renstra 4. SOP revisi anggaran pada kantor wilayah djpb	Sudah di evaluasi 12 Februari 2016

			5. SOP Revisi Anggaran Persetujuan Mahkamah Agung 6. SOP Revisi Anggaran Melalui Revisi Pok 7. SOP penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)/REVIU IKU 8. SOP penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) 9. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan 10. SOP Administrasi	
12	Staf Kepegawaian dan TI	30	1. SOP presensi pegawai harian 2. SOP persiapan dan rekapitulasi presensi bulanan 3. SOP pemrosesan usulan permohonan cuti 4. SOP pembuatan surat tugas 5. SOP mutasi pns (KPTA Jakarta) 6. SOP pendefinitipan pengangkatan pns (Ketua Pta Jakarta) 7. Sop usulan kenaikan pangkat (SK Ketua Pta Jakarta) 8. SOP usulan kenaikan pangkat ke Sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI 9. SOP usul pensiun ke sekretaris dan Ditjen Badilag MA RI 10. SOP usul pensiun ke Kanreg V BKN Jakarta 11. SOP proses izin belajar 12. SOP pembuatan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen 13. SOP data kepegawaian 14. SOP pembuatan daftar penilaian prestasi kerja	Sudah di evaluasi 12 Februari 2016

			pegawai 15. SOP usul penghargaan dan tanda jasa pegawai 16. SOP kenaikan gaji berkala 17. SOP pelantikan 18. SOP ujian dinas 19. SOP pembuatan SPP, SPMJ, DAN SPMT 20. SOP pembuatan BEZETTING 21. SOP pembuatan DUK 22. SOP pembuatan senioritas hakim, struktur organisasi dan data lainnya 23. SOP pembuatan surat keluar untuk intern dan ekstern 24. SOP Pembuatan Program Kerja Dan Uraian Tugas 25. SOP Usul Hukuman Disiplin Bagi Haki Dan PNS 26. SOP Pengusulan Peserta Pendidikan Dan Pelatihan 27. SOP mengontrol dan memperbaiki kerusakan hardware & software 28. SOP Mengontrol Dan Back Up Data-Data 29. SOP Mengontrol Data Konten Website PTA 30. SOP Monitoring Implementasi, SIPP Dan Aplikasi **Pendukung Lainnya**	

1.2. SOP Pengadilan agama Jakarta Pusat

No	Nama SOP	Nomor	Ket
I	**SOP KEPANITERAAN**		
1.	SOP Pelayanan Informasi	SOP/AP/01	-
2.	SOP Pelayanan Pos Bantuan Hukum	SOP/AP/02	-
3.	SOP Pelayanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	SOP/AP/03	-
4.	SOP Mekanisme Penerimaan Perkara	SOP/AP/04	-
5.	SOP Pelayanan Pembayaran Panjar Biaya Perkara	SOP/AP/05	-
6.	SOP Penetapan Majelis Hakim	SOP/AP/06	-
7.	SOP Penunjukan Panitera Pengganti	SOP/AP/07	-
8.	SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	SOP/AP/08	-
9.	SOP Penetapan Hari Sidang	SOP/AP/09	-
10.	SOP Pemanggilan Para Pihak	SOP/AP/10	-
11.	SOP Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan Ke Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/11	-
12.	SOP Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/12	-
13.	SOP Kegiatan Persiapan Persidangan	SOP/AP/13	-
14.	SOP Pelayanan Mediasi	SOP/AP/14	-
15.	SOP Pemanggilan Mediasi	SOP/AP/15	-
16.	SOP Pelayanan Penundaan Sidang	SOP/AP/16	-
17.	SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi	SOP/AP/17	-
18.	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/18	-
19.	SOP Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi Dari Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/19	-
20.	SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat	SOP/AP/20	-
21.	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/21	-

22.	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/22	-
23.	SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar	SOP/AP/23	-
24.	SOP Prosedur Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar	SOP/AP/24	-
25.	SOP Pelayanan Sita Jaminan	SOP/AP/25	-
26.	SOP Pelayanan Sita Buntut	SOP/AP/26	-
27.	SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara	SOP/AP/27	-
28.	SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan	SOP/AP/28	-
29.	SOP Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar	SOP/AP/29	-
30.	SOP Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Kepada Para Pihak	SOP/AP/30	-
31.	SOP Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah	SOP/AP/31	-
32.	SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap	SOP/AP/32	-
33,	SOP Pelayanan Ikrar Talak	SOP/AP/33	-
34,	SOP Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan	SOP/AP/34	-
35,	SOP Pelayanan Penyerahan Akta Cerai	SOP/AP/35	-
36,	SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak	SOP/AP/36	-
37.	SOP Pelayanan Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Ke KUA	SOP/AP/37	-
38.	SOP Pelayanan Permintaan Salinan Putusan/Penetapan	SOP/AP/38	-
39.	SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Gugat	SOP/AP/39	-
40.	SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak	SOP/AP/40	-
41.	SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana	SOP/AP/41	-

42.	SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	SOP/AP/42	-
43.	SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati	SOP/AP/43	-
44.	SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi	SOP/AP/44	-
45.	SOP Pelayanan Banding	SOP/AP/45	-
46.	SOP Pelayanan Kasasi	SOP/AP/46	-
47.	SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan	SOP/AP/47	-
48.	Melebihi Batas Waktu SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	SOP/AP/48	-
49.	SOP Pelayanan Peninjauan Kembali	SOP/AP/49	-
50.	SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama	SOP/AP/50	-
51.	SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding	SOP/AP/51	-
52.	SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi	SOP/AP/52	-
53.	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya	SOP/AP/53	-
54	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya	SOP/AP/54	-
55.	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya	SOP/AP/55	-
56.	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	SOP/AP/56	-
57.	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	SOP/AP/57	-
58.	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang	SOP/AP/58	-
59.	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Ke Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/59	-
60.	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain	SOP/AP/60	-

61.	SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi	SOP/AP/61	-
62.	SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal	SOP/AP/62	-
63.	SOP Pengarsipan	SOP/AP/63	-
64	SOP Pelaporan	SOP/AP/64	-
65.	SOP Pengaduan	SOP/AP/65	-
66.	SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan POLRI	SOP/AP/66	-
67.	SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	SOP/AP/67	-
68.	SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter	SOP/AP/68	-
69.	SOP Pelayanan Pengelolaan ATK Perkara	SOP/AP/69	-
70.	SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara	SOP/AP/70	-
71.	SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar	SOP/AP/71	-
II	**SOP KESEKRETARIATAN**		
1.	SOP pelaksanaan orientasi dan sosialisasi tupoksi.	SOP/as/01	-
2.	SOP pengembangan pegawai	SOP/as/02	-
3.	SOP ijin belajar dan tugas belajar	SOP/as/03	-
4.	SOP pengelolaan pegawai	SOP/as/04	-
5.	SOP pengelolaan kartu pegawai, pensiun dan bpjs	SOP/as/05	-
6.	SOP pengelolaan absensi pegawai	SOP/as/06	-
7.	SOP pengajuan cuti pegawai	SOP/ap/07	-
8.	SOP pengelolaan kenaikan pangkat	SOP/as/08	-
9.	SOP kenaikan gaji berkala	SOP/as/09	-
10.	SOP pengelolaan ijin perkawinan dan perceraian bagi	SOP/as/10	-
11.	SOP pengelolaan pensiun pegawai	SOP/as/11	-
12.	SOP pemberian nilai kepada pegawai	SOP/as/12	-

13.	SOP pendelegasian wewenang	SOP/as/13	-
14.	SOP pemberian penghargaan kepada pegawai	SOP/as/14	-
15.	SOP pelaporan harta kekayaan pegawai dan pejabat negara	SOP/as/15	-
16	SOP pengelolaan tata naskah dinas	SOP/as/16	-
17.	SOP pengelolaan arsip aktif & in aktif	SOP/as/18	-
18.	SOP penata usahaan aset	SOP/as/19	-
19.	SOP penata usahaan persediaan	SOP/as/20	-
20.	SOP pemeliharaan lingkungan & keamanan	SOP/as/21	-
21.	SOP pelaksanaan kehumasan & keprotokolan	SOP/as/22	-
22.	SOP pemberian informasi	SOP/ap/01	-
23.	SOP pengelolaan perpustakaan	SOP/as/24	-
24.	SOP pencairan anggaran	SOP/as/25	-
25.	SOP pertanggung jawaban anggaran	SOP/as/26	-
26.	SOP penata usahaan pnbp	SOP/as/27	-
27.	SOP penyusunan laporan keuangan	SOP/as/28	-
28.	SOP penyusunan rencana program dan anggaran	SOP/as/29	-
29.	SOP penyusunan sakip	SOP/as/30	-
30.	SOP penyusunan laporan	SOP/as/31	-
31.	SOP pengelolaan ti	SOP/as/32	-

1.3. SOP Pengadilan Agama Jakarta Barat

No	Unit Kerja	Jml	Terdiri Dari	Ket
I	**Teknis Pengadilan**			
1	Ketua	**4**	1) SOP Penetapan Penunjukan	Direvisi ke

			Majelis Hakim 2) SOP Pemberian Nilai Dan Hukuman Kepada Pegawai 3) SOP Pendelegasian Wewenang 4) SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai	2 tanggal 04-09-2017
2	Wakil Ketua	**4**	1) SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim 2) SOP Pemberian Nilai Dan Hukuman Kepada Pegawai 3) SOP Pendelegasian Wewenang 4) SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai	
3	Hakim	**9**	1) SOP Penetapan Hari Sidang 2) SOP Pemanggilan Para Pihak 3) SOP Layanan Penundaan Sidang 4) SOP Layanan Pemanggilan Saksi 5) SOP Pelayanan Mediasi 6) SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat 7) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain 8) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain 9) SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi	
4	Panitera	**24**	1) SOP Penetapan penunjukan Panitera Pengganti 2) SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti 3) SOP Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain 4) SOP Panggilan/pemberitahuan dari pengadilan agama lain 5) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain	
			6) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari	Direvisi ke 2 tanggal

			Pengadilan Agama Lain 7) SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat 8) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain 9) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain 10) SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar 11) SOP Pelayanan teguran Panjar Biaya Perkara yang Tidak Menambah Panjar 12) SOP Pelayanan Sita Jaminan 13) SOP Pelayanan Sita Buntut 14) SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara 15) SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang 16) SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang 17) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain 18) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain 19) SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal 20) SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus 21) SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter 22) SOP Pengelolaan ATK Perkara 23) SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara 24) SOP Pengelolaan Sisa Panjar	04-09-2017
5	Panmud. Gugatan	30	1) SOP Penerimaan Perkara 2) SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara 3) SOP Pengambilan Sisa Panjar 4) SOP Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak	

			5) SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah 6) SOP Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap 7) SOP Pelayanan Ikrar Talak 8) SOP Penyerahan Produk Pengadilan 9) SOP Penyerahan Akta cerai 10) SOP Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak 11) SOP Permintaan Salinan Putusan/Penetapan 12) SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat 13) SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak 14) SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana 15) SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat 16) SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu 17) SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu 18) SOP Pelayanan Banding 19) SOP Pelayanan Kasasi 20) SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas 21) SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi 22) SOP Pelayanan Peninjauan Kembali 23) SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama 24) SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding 25) SOP tentang Prosedur Pelayanan	Direvisi ke 2 tanggal 04-09-2017

			Prodeo Pada Tingkat Kasasi 26) SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama 27) SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding 28) SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi 29) SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil 30) SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri	
6	Panmud. Permohonan	24	1) SOP Penerimaan Perkara 2) SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara 3) SOP Pengambilan Sisa Panjar 4) SOP Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak 5) SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah 6) SOP Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap 7) SOP Permintaan Salinan Putusan/Penetapan 8) SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana 9) SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat 10) SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu 11) SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu 12) SOP Pelayanan Banding 13) SOP Pelayanan Kasasi 14) SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas 15) SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak	Direvisi ke 2 tanggal 04-09-2017

			Mengajukan Memori Kasasi 16) SOP Pelayanan Peninjauan Kembali 17) SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama 18) SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding 19) SOP tentang Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi 20) SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama 21) SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding 22) SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi 23) SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil 24) SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri	
7	Panmud. Hukum		1) SOP Layanan Informasi 2) SOP Layanan Pos Bantuan Hukum 3) SOP Layanan Sidang diluar Gedung 4) SOP Pengiriman Salinan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA 5) SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi 6) SOP Pengarsipan 7) SOP Prosedur Pelaporan 8) SOP Prosedur Pengaduan	Direvisi ke 2 tanggal 04-09-2017
8	Panitera Pengganti		1) SOP kegiatan persiapan persidangan 2) SOP Layanan Penundaan Sidang 3) SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat 4) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain 5) SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain	

9	Juru Sita / JSP		1) SOP Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain 2) SOP Panggilan/pemberitahuan dari pengadilan agama lain 3) SOP Pemanggilan Mediasi 4) SOP Layanan Pemanggilan Saksi 5) SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan	
II	**Non Teknis Pengadilan**			
10	Sekretaris	5	1) SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi 2) SOP Pengembangan Pegawai 3) SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan 4) SOP Pemberian Informasi 5) SOP Pertanggungjawaban Anggaran	Direvisi ke 2 tanggal 04-09-2017
11	Kasubbag. Kepegawaian	10	1) SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar 2) SOP Pengelolaan Pegawai 3) SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, dan BPJS 4) SOP Pengelolaan Absensi Pegawai 5) SOP Pengajuan Cuti Pegawai 6) SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat 7) SOP Kenaikan Gaji Berkala 8) SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai 9) SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai 10) SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara	Direvisi ke 2 tanggal 04-09-2017 Direvisi ke 2 tanggal 04-09-2017
12	Kasubbag.Umum & Keuangan	9	1) SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas 2) SOP Administrasi Persuratan (surat Masuk dan Surat Keluar) 3) SOP Penatausahaan Aset	Direvisi ke 2 tanggal 04-09-2017

			4) SOP Penatausahaan Persediaan 5) SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan 6) SOP Pengelolaan Perpustakaan 7) SOP Pencairan Anggaran 8) SOP Penatausahaan PNBP 9) SOP Penyusunan Laporan Keuangan	
13	Kasubbag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan	4	1) SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 2) SOP Penyusunan SAKIP 3) SOP Penyusunan Laporan 4) SOP Pengelolaan TI	Direvisi ke 2 tanggal 04-09-2017

1.4. SOP Pengadilan Agama Jakarta Timur

NO	JABATAN		JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
1	Ketua	1	SOP. Ijin Belajar dan Tugas Belajar	
		2	SOP Pengelolaan Pegawai	
		3	SOP Pembuatan Karpeg/Karis/Karsu	
		4	SOP Pengelolaan Absensi Pegawai	
		5	SOP Pengajuan Cuti Pegawai	
		6	SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat Pegawai	
		7	SOP Pengajuan Gaji Berkala	
		8	SOP Ijin Perkawinan dan Ijin Perceraian	
		9	SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai	
		10	SOP Pengusulan Penghargaan Satya Lancana	
		11	SOP LHKPN dan LHKASN	
		12	SOP Pengelolaan Arsip Kesekretariatan	
		13	SOP Aktif dan Non Aktif	
		14	SOP Administrasi Persuratan	
		15	SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan	
		16	SOP Penyusunan SAKIP	
		17	SOP Pengelolaan IT	
		18	SOP Pelayanan Sidang diluar Gedung Pengadilan	
		19	SOP Meknisme Penerimaan Perkara	
		20	SOP Penetapan Majelis Hakim	

		21	SOP Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain	
		22	SOP Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi Dari Pengadilan Agama Lain	
		23	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain	
		24	SOP Pelayanan Sita Buntut	
		25	SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara	
		26	SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	
		27	SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu	
		28	SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu	
		29	SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu	
		30	SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	
		31	SOP Pelayanan Peninjauan Kembali	
		32	SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama	
		33	SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding	
		34	SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi	
		35	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	
		36	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	
		37	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	
		38	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	
		39	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang	

		40	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain	
		41	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain	
		42	SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi	
		43	SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal	
		44	SOP Pengarsipan Perkara	
		45	SOP Pelaporan	
		46	SOP Pengaduan	
		47	SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan POLRI	
		48	SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter	
2	Wakil Ketua	1	SOP Penyusunan SAKIP	
		2	SOP Pengelolaan IT	
		3	SOP Pelayanan Sidang diluar Gedung Pengadilan	
		4	SOP Meknisme Penerimaan Perkara	
		5	SOP Penetapan Majelis Hakim	
		6	SOP Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain	
		7	SOP Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi Dari Pengadilan Agama Lain	
		8	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain	
		9	SOP Pelayanan Sita Buntut	
		10	SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara	
		11	SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	
		12	SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu	
		13	SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu	
		14	SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu	

		15	SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	
		16	SOP Pelayanan Peninjauan Kembali	
		17	SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama	
		18	SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding	
		19	SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi	
		20	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	
		21	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	
		22	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	
		23	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	
		24	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang	
		25	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain	
		26	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain	
		27	SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi	
		28	SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal	
		29	SOP Pengarsipan Perkara	
		30	SOP Pelaporan	
		31	SOP Pengaduan	
		32	SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan POLRI	
		33	SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter	
		34	SOP Koordinator Pengawas Bidang	
		35	SOP Penanggung Jawab Daftar Hadir/Pulang Pegawai	
3	Hakim	1	SOP Pelayanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	
		2	SOP Mekanisme Penerimaan Perkara	
		3	SOP Pemanggilan Para Pihak	
		4	SOP Kegiatan Persiapan Persidangan	
		5	SOP Pelayanan Mediasi	
		6	SOP Pelayanan Penundaan	

			Sidang	
		7	SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi	
		8	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain	
		9	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain	
		10	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain	
		11	SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar	
		12	SOP Prosedur Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar	
		13	SOP Pelayanan Ikrar Talak	
		14	SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana	
		15	SOP Pelayanan Peninjauan Kembali	
		16	SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama	
		17	SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar	
		18	SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama	
4	Panitera	1	SOP Mekanisme Penerimaan Perkara	
		2	SOP Penetapan Majelis Hakim	
		3	SOP Penunjukan Panitera Pengganti	
		4	SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	
		5	SOP Penetapan Hari Sidang	
		6	SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Ke Pengadilan Agama Lain	
		7	SOP Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain	
		8	SOP Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi Dari Pengadilan Agama Lain	
		9	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain	
		10	SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar	
		11	SOP Prosedur Pelayanan	

			Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar	
		12	SOP Pelayanan Sita Jaminan	
		13	SOP Pelayanan Sita Buntut	
		14	SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara	
		15	SOP Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Kepada Para Pihak	
		16	SOP Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah	
		17	SOP Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan	
		18	SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak	
		19	SOP Pelayanan Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Ke KUA	
		20	SOP Pelayanan Permintaan Salinan Putusan / Penetapan	
		21	SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Gugat	
		22	SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana	
		23	SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	
		24	SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu	
		25	SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu	
		26	SOP Pelayanan Banding	
		27	SOP Pelayanan Kasasi	
		28	SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu	
		29	SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	
		30	SOP Pelayanan Peninjauan Kembali	
		31	SOP Pelayanan Prodeo	

			Tingkat Pertama	
		32	SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi	
		33	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	
		34	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	
		35	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	
		36	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	
		37	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	
		38	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain	
		39	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain	
		40	SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi	
		41	SOP Pengarsipan	
		42	SOP Pelaporan	
		43	SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan POLRI	
		44	SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	
		45	SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter	
		46	SOP Pengelolaan ATK Perkara	
		47	SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara	
		48	SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar	
5	Panitera Muda Hukum	1	SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap	
		2	SOP Pelayanan Ikrar Talak	
		3	SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Gugat	
		4	SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak	
		5	SOP Pelaporan	
6	Panitera Muda Permohonan	1	SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap	
		2	SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak	
		3	SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Gugat	
		4	SOP Pelaporan	

7	Panitera Muda Gugatan	1	SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap	
		2	SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak	
		3	SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Gugat	
		4	SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak	
		5	SOP Pelaporan	
8	Panitera Pengganti	1	SOP Pemanggilan Para Pihak	
		2	SOP Pemanggilan Para Pihak	
		3	SOP Kegiatan Persiapan Persidangan	
		4	SOP Pemanggilan Mediasi	
		5	SOP Pelayanan Penundaan Sidang	
		6	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain	
		7	SOP Pemeriksaan Setempat	
		8	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain	
		9	SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar	
		10	SOP Prosedur Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar	
		11	SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan	
		12	SOP Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Kepada Para Pihak	
		13	SOP Pelayanan Ikrar Talak	
		14	SOP Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan	
		15	SOP Pelayanan Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Ke KUA	
		16	SOP Pelayanan Permintaan Salinan Putusan / Penetapan	
		17	SOP Pelayanan Peninjauan Kembali	
		18	SOP Pengarsipan	
		19	SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar	
9	Jurusita/Jurusita Pengganti	1	SOP Pemanggilan Para Pihak	
		2	SOP Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain	

		3	SOP Pemanggilan Mediasi	
		4	SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi	
		5	SOP Permohonan Bantuan Pemeriksaan Saksi Dari Pengadilan Agama Lain	
		6	SOP Pemeriksaan Setempat	
		7	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain	
		8	SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar	
		9	SOP Pelayanan Sita Jaminan	
		10	SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan	
		11	SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak	
		12	SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana	
		13	SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	
		14	SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu	
			SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu	
			SOP Pelayanan Banding	
			SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu	
			SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	
			SOP Pelayanan Peninjauan Kembali	
			SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama	
			SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding	
			SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain	
			SOP Pelayanan Permohonan	

			Konsinyasi	
10	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	SOP Penyusunan SAKIP	
		2	SOP Penyusunan RKA-KL	
		3	SOP Penyusunan Laporan	
		4	SOP Teknologi Informasi	
		5	SOP Pelaporan LHKPN dan LHKASN	
11	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	1	SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi	
		2	SOP Pengembangan Pegawai	
		3	SOPIzin Belajar dan Tugas Belajar	
		4	SOPPengelolaan Pegawai	
		5	SOPPengelolaan Karpeg Pensiun dan BPJS	
		6	SOPPengelolaan Absensi Pegawai	
		7	SOPPengajuan Cuti Pegawai	
		8	SOPPengelolaan Kenaikan Pangkat	
		9	SOPKenaikan Gaji Berkala	
		10	SOPPengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai	
		11	SOPPengelolaan Pensiun Pegawai	
		12	SOPPemberian Nilai Kepada Pegawai dan Pendelegasian wewnang	
		13	SOPPemberian Penghargaan Kepada Pegawai	
12	Kasubbag Umum dan Keuangan	1	SOP Pelaporan LHKPN dan LHKASN	
		2	SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar	
		3	SOP Laporan Barang Milik Negara	
		4	SOP Penyusunan Kebutuhan Barang Persediaan	
		5	SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan	
		6	SOP Pengelolaan Perpustakaan	
		7	SOP Pencairan Anggaran	
		8	SOP Penyusunan Laporan Keuangan	
		9	SOP Penyusunan RKA-KL	
		10	SOP Penyusunan Laporan	
13	Staf Kepegawaian & Ortala	1	SOP Penanganan Pegawai Baru	
		2	SOP Pembuatan Kartu Pegawai/Karis/Karsu	

		3	SOP Pengelolaan Absensi Pegawai	
		4	SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai	
		5	SOP Pengusulan Penghargaan Satya Lencana	
		6		
14	Staf Umum & Keuangan	1	SOP Laporan Barang Milik Negara	
		2	SOP Administrasi Persuratan	
		3	SOP Penyusunan Kebutuhan Barang Persediaan	
		4	SOP Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan	
		5	SOP Pengelolaan Perpustakaan	
15	Staf Kepaniteraan	1	SOP Mekanisme Penerimaan Perkara	
		2	SOP Pelayanan Pembayaran Panjar Biaya Perkara	
		3	SOP Penetapan Majelis Hakim	
		4	SOP Penetapan Majelis Hakim	
		5	SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	
		6	SOP Penetapan Hari Sidang	
		7	SOP Pemanggilan Para Pihak	
		8	SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Ke Pengadilan Agama Lain	
		9	SOP Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain	
		10	SOP Kegiatan Persiapan Persidangan	
		11	SOP Pemanggilan Mediasi	
		12	SOP Pelayanan Penundaan Sidang	
		13	SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi	
		14	SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar	
		15	SOP Prosedur Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar	
		16	SOP Pelayanan Sita Buntut	
		17	SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara	
		18	SOP Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah	
		19	SOP Pelayanan Penyerahan Akta Cerai	
		20	SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan	

			Sederhana	
		21	SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	
		22	SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu	
		23	SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu	
		24	SOP Pelayanan Banding	
		25	SOP Pelayanan Kasasi	
		26	SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu	
		27	SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	
		28	SOP Pelayanan Peninjauan Kembali	
		29	SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama	
		30	SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding	
		31	SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi	
		32	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	
		33	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	
		34	SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	
		35	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	
		36	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	
		37	SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang	
		38	SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain	
		39	SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi	
		40	SOP Pengarsipan	

		41	SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan POLRI	
		42	SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter	
		43	SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar	

1.5. SOP Pengadilan Agama Jakarta Selatan

No.	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
	Teknis			
1	Ketua	3	1. Pembuatan Penetapan majelis Hakim pada perkara permohonan, cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet. 2. Pembuatan penetapan Aanmaning 3.Pembuatan Penetapan Konsignasi	Sudah dievaluasi 04 September 2017
2	Wakil Ketua	2	1. Pembuatan Penetapan majelis Hakim pada perkara permohonan, cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet. 2. Pembuatan penetapan Aanmaning	Sudah dievaluasi 04 September 2017
3	Hakim	11	1. Pembuatan Penetapan Hari Sidang pada perkara pada perkara permohonan, cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah	Sudah dievaluasi 04 September 2017

			satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet, banding, kasasi pada tingkat pertama, peninjauan kembali pada tingkat pertama, permohonan eksekusi, konsignasi. 2. Sidang Pembacaan permohonan/ gugatan pada pada perkara permohonan, cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet, banding, kasasi pada tingkat pertama, peninjauan kembali pada tingkat pertama, permohonan eksekusi, konsignasi. 3.Sidang Perdamaian pada perkara cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet. 4.Sidang pemeriksaan permohonan sita (bila ada) pada pada perkara cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan	

			lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet. 5. Sidang jawaban permohonan / gugatan pada perkara cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet. 6. Sidang Replik pada perkara cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet. 7. Sidang Duplik pada perkara cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet. 8. Sidang Pembuktian Pemohon/ Penggugat pada perkara cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden	

			verzet. 9. Sidang Pembuktian Termohon/ Tergugat pada perkara cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet. 10. Sidang Pemeriksaan Setempat (bila ada) pada perkara cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet. 11. Sidang Musyawarah Majelis dan Pembacaan Penetapan/ Putusan pada perkara permohonan, cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet.	
4	Panitera	4	1. Pembuatan penunjukkan Panitera Pengganti pada perkara permohonan, cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum,	Sudah dievaluasi 04 September 2017

			perkara verzet, derden verzet, banding, kasasi pada tingkat pertama, peninjauan kembali pada tingkat pertama, permohonan eksekusi, konsignasi. 2. Pembuatan penunjukkan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti pada perkara permohonan, cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet, banding, kasasi pada tingkat pertama, peninjauan kembali pada tingkat pertama, permohonan eksekusi, konsignasi. 3. Pelaksanaan Sita Eksekusi dan Eksekusi Lelang. 4. Penerimaan Konsignasi	
8	Panitera Pengganti	1	1. Pembuatan BAS pada setiap persidangan	Sudah dievaluasi 04 September 2017
9	Jurusita / JSP	2	1. Penyampaian panggilan langsung kepada para pihak/ melalui kepala desa/ melalui massmedia/ melalui Kemenlu pada perkara permohonan, cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet. 2. Pemberitahuan isi putusan langsung kepada pihak/	Sudah dievaluasi 04 September 2017

			melalui kepala desa/ melaui pengumuman/ melalui pengumam pemerintahan kota/ melalui Kemenlu (bila ada pihak yang tidak hadir) pada perkara cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihak di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet.	
10	Staf (Petugas Meja I)	1	1. Penerimaaan perkara permohonan, cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet, banding, kasasi pada tingkat pertama, peninjauan kembali pada tingkat pertama, permohonan eksekusi, konsignasi	Sudah dievaluasi 04 September 2017
11	Staf (Petugas Meja II)	1	1. Register berkas berkas perkara permohonan, cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet, banding, kasasi pada tingkat pertama, peninjauan kembali pada tingkat pertama, permohonan eksekusi, konsignasi	udah dievaluasi 04 September 2017
12	Staf (Petugas Meja III)	3	1. Pengambilan salinan penetapan/ salinan putusan/ akta cerai pada	Sudah dievaluasi 04

			perkara permohonan, cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihal di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet, banding, kasasi pada tingkat pertama, peninjauan kembali pada tingkat pertama, permohonan eksekusi, konsignasi. 2. Penerimaan memori banding, kontra memori banding, penyusunan berkas bundel A dan B Banding,pengiriman berkas banding. 3. Penerimaan memori kasasi, kontra memori kasasi, penuysunan berkas eprkara bundel B, pengiriman berkas kasasi.	September 2017
13	Staf (Kasir)	2	1. Pengembalian Sisa Panjar pada perkara permohonan, cerai talak para pihak satu wilayah, cerai talak salah satu pihak diluar wilayah hukum, cerai gugat pihak tergugat ghaib, cerai guagat salah satu pihak di luar negeri, gugatan lainnya salah satu pihak di luar wilayah hukum, perkara verzet, derden verzet, banding, kasasi pada tingkat pertama, peninjauan kembali pada tingkat pertama, permohonan eksekusi, konsignasi. 2. Pengiriman biaya banding dan kasasi.	Sudah dievaluasi 04 September 2017
II	**Non Teknis**			
1	Sekretaris	48	1. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA/ Reviu Renstra) 2. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU /	Sudah dievaluasi 04 September 2017

			Reviu IKU) 3. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 4. Penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 5. Penyusunann Rencana Kerja Anggaran (RKA) 6. Penyusunan Rencana Penggunaan Uang (RPU) 7. Pembuatan Term Of Reference (TOR) 8. Pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB) 9. Pembahasan PAGU Anggaran Sementara 10. Pembahasan PAGU Anggaran Indikatif 11. Penyusunann RKA-KL 12. Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 13. Permohonan Penambahan Anggaran 14. Penyusunan Revisi RKA-KL 15. Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah DJPB 16. Revisi Anggaran Persetujuan Mahkamah Agung 17. Revisi Anggaran melalui Revisi POK 18. Pengajuan permohoann penghapusan BMN berupa bangunan yang akan dibangun kembali 19. Penunjukan penggunaan rumah dinas 20. Penetapan status penggunaan BMN 21. Pengajuan belanja modal ke KPPN 22. Pengajuan uang persediaan ke KPPN 23. Pengajuan belanja pegawai 24. Pembayaran uang makan 25. Pembayaran kekurangan gaji 26. Pengurusan surat tertutup (rahasia) 27. Pengajuan tunjangan remunerasi 28. Pembayaran dan validasi pajak	

			29. Penyetoran dan laporan penerimaan negara bukan pajak 30. Pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) 31. Rekonsiliasi laporan keuangan bulanan ke KPPN 32. Pelaporan Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 33. Penyusunan Laporan CALK Semesteran dan Tahunan 34. Pembuatan dan pembaruan SK yang berhubungan dengan tugas pegawai 35. Penerbitan Surat KP4 dan SPMJ 36. Usulan permohonan cuti 37. Usulan kenaikan pangkat 38. Usulan pensiun 39. Pengajuan ijin belajar 40. Pengajuan pembuatan Taspen 41. Pembuatan surat tugas 42. Pembuatan daftar penilaian prestasi kerja pegawai 43. Usulan CPNS menjadi PNS 44. Usulan mendapatkan penghargaan Karyasatya dan Satyalancana Karya Satya 45. Usulan kenaikan gaji berkala 46. Usulan kenaikan pangkat ke BKN dan Ditjen Badilag 47. Rapat Baperjakat 48. Penerimaan tenaga honorer	
2	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	34	1. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA/ Reviu Renstra) 2. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU / Reviu IKU) 3. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 4. Penyusunan Penetapan	Sudah dievaluasi 04 September 2017

			Kinerja Tahunan (PKT) 5. Penyusunann Rencana Kerja Anggaran (RKA) 6. Penyusunan Rencana Penggunaan Uang (RPU) 7. Pembuatan Term Of Reference (TOR) 8. Pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB) 9. Pengumpulan data dukung usulan anggaran 10. Pembahasan PAGU Anggaran Sementara 11. Pembahasan PAGU Anggaran Indikatif 12. Penyusunann RKA-KL 13. Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 14. Permohonan Penambahan Anggaran 15. Penyusunan Revisi RKA-KL 16. Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah DJPB 17. Revisi Anggaran Persetujuan Mahkamah Agung 18. Revisi Anggaran melalui Revisi POK 19. Mengontrol data dan konten website 20. Pengeloaan Website (Upload Laporan) 21. Pengelolaan Website (Upload Berita) 22. Dokumentasi Surat Elektronik 23. Mengontrol dan memperbaiki kerusakan hardware dan software 24. Perawatan dan Troubleshooting Jaringan 25. Mengontrol dan memback-up data-data aplikasi 26. Monitoring implementasi SIPP dan aplikasi pendukung lainnya 27. Perawatan SIPP 28. Peliputan Berita 29. Monitoring infrastruktur hardware,	

			jaringan dan sistem teknologi informasi 30. Penyusunan laporan tahunan 31. Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 32. Penyusunan laporan e-monev bappenas 33. Penyusunan laporan e-monev anggaran 34. Penyusunan laporan bulanan tiap bagian	
3	Kasub bag. Umum dan Keuangan	48	1. Pengajuan permohoann penghapusan BMN berupa bangunan yang akan dibangun kembali 2. SOP Pengajuan permohoann penghapusan BMN berupa peralatan kantor/meulebair 3. Pengajuan permohoann penghapusan BMN berupa kendaraan dinas bermotor 4. Pelelangan BMN tindak lanjut dari penghapusan BMN 5. Penatausahaan Barang Milik Negara 6. Penyusunan Laporan BMN semesteran dan tahunan 7. Identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah untuk aplikasi Simantap 8. Penggunaan BMN berupa laptop dan kendaraan dinas 9. Penunjukan penggunaan rumah dinas 10. Penetapan status penggunaan BMN 11. Inventarisasi buku perpustakaan 12. Peminjaman buku perpustakaan 13. Pengembalian buku perpustakaan 14. Pengadaan barang dan jasa 15. Kebersihan gedung kantor 16. Pengaturan parkir	Sudah dievaluasi 04 September 2017

			kendaraan 17. Pengamanan kantor 18. Pengaturan jadual dan petugas piket keamanan 19. Mengemudi kendaraan dinas pimpinan 20. Pemeriksaan rutin kendaraan dinas pimpinan 21. Pemeriksaan berkala kendaraan dinas pimpinan 22. Perawatan mesin dan kebersihan kendaraan dinas pimpinan 23. Pengelolaan barang persediaan 24. Penggantian BMN hilang dengan tuntutan ganti rugi 25. Penerimaan surat masuk 26. Pengarahan surat masuk 27. Pencatatan surat masuk 28. Pendistribusian surat masuk 29. Penataan surat masuk 30. Pengurusan surat tertutup (rahasia) 31. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 32. Peramu kantor 33. Penomoran surat keluar 34. Resepsionis 35. Pengajuan belanja modal ke KPPN 36. Pengajuan uang persediaan ke KPPN 37. Pengajuan belanja pegawai 38. Pembayaran uang makan 39. Pembayaran kekurangan gaji 40. Pengajuan tunjangan remunerasi 41. Pembayaran dan validasi pajak 42. Penyetoran dan laporan penerimaan negara bukan pajak 43. Pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) 44. Rekonsiliasi laporan keuangan bulanan ke KPPN 45. Laporan alokasi belanja data dan jasa	

			46. Pelaporan Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 47. Penyusunan Laporan CALK Semesteran dan Tahunan 48. Pelaporan SPT Tahunan wajib pajak	
4	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala	34	1. Pemutakhiran data Sapk BKN dan Sikep Simari 2. Update data ke dalam aplikasi Simpeg 3. Penyusunan Job Description Pegawai 4. Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai 5. Pengisian register / buku induk kepegawaian 6. Pembuatan dan pembaruan SK yang berhubungan dengan tugas pegawai 7. Penerbitan Surat KP4 dan SPMMJ 8. Pembuatan daftar hadir dan pulang (Absensi) pegawai 9. Usulan permohonan cuti 10. Usulan kenaikan pangkan 11. Usulan pensiun 12. Pengajuan ijin belajar 13. Pengajuan pembuatan karis /karsu 14. Pengajuan pembuatan karpeg 15. Pengajuan pembuatan Taspen 16. Pengajuan pembuatan BPJS 17. Pembuatan surat tugas 18. Pembuatan daftar penilaian prestasi kerja pegawai 19. Usulan CPNS menjadi PNS 20. Usulan mendapatkan penghargaan Karyasatya dan Satyalancana Karya Satya 21. Usulan kenaikan gaji berkala 22. Usulan kenaikan pangkat ke BKN dan Ditjen Badilag	Sudah dievaluasi 04 September 2017

			23. Pelaksanaan pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan 24. Pembuatan surat pernyataan pelantikan 25. Pembuatan surat penyataan menduduki jabatan 26. Pembuata surat pernyataan melaksanakan tugas 27. Rapat Baperjakat 28. Penerimaan tenaga honorer 29. Pembuatan bezetting 30. Pembuatan daftar urut kepangkatan (DUK) 31. Pembuatan daftar senioritas hakim 32. Pembuatan struktur organisasi 33. Pembuatan surat keluar untuk intern dan ekstern 34. Pembuatan program kerja dan uraian tugas kepegawaian	
5	Staf Perencanaan	6	1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2. Penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 3. Pembuatan Term Of Reference (TOR) 4. Pengumpulan data dukung usulan anggaran 5. Penyusunann RKA-KL 6. Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Sudah dievaluasi 04 September 2017
6	Staf Pengelola TI	16	1. Mengontrol data dan konten website 2. Pengeloaan Website (Upload Laporan) 3. Pengelolaan Website (Upload Berita) 4. Dokumentasi Surat Elektronik 5. Mengontrol dan memperbaiki kerusakan hardware dan software 6. Perawatan dan Troubleshooting Jaringan 7. Mengontrol dan memback-up data-data	Sudah dievaluasi 04 September 2017

			aplikasi 8. Monitoring implementasi SIPP dan aplikasi pendukung lainnya 9. Perawatan SIPP 10. Peliputan Berita 11. Monitoring infrastruktur hardware, jaringan dan sistem teknologi informasi 12. Penyusunan laporan tahunan 13. Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 14. Penyusunan laporan e-monev bappenas 15. Penyusunan laporan e-monev anggaran 16. Penyusunan laporan bulanan tiap bagian	
7	Staf Pengelola Pelaporan	5	1. Penyusunan laporan tahunan 2. Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 3. Penyusunan laporan e-monev bappenas 4. Penyusunan laporan e-monev anggaran 5. Penyusunan laporan bulanan tiap bagian	Sudah dievaluasi 04 September 2017
8	Staf Pengelola BMN, Sarana Prasarana dan Kerumah tanggaan	29	1. Pengajuan permohoann penghapusan BMN berupa bangunan yang akan dibangun kembali 2. Pengajuan permohoann penghapusan BMN berupa peralatan kantor/meulebair 3. Pengajuan permohonan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas bermotor 4. Pelelangan BMN tindak lanjut dari penghapusan BMN 5. Penatausahaan Barang Milik Negara 6. Penggunaan BMN berupa laptop dan kendaraan dinas 7. Inventarisasi buku perpustakaan	Sudah dievaluasi 04 September 2017

			8. Peminjaman buku perpustakaan 9. Pengembalian buku perpustakaan 10. Pengadaan barang dan jasa 11. Kebersihan gedung kantor 12. Pengaturan parkir kendaraan 13. Pengamanan kantor 14. Mengemudi kendaraan dinas pimpinan 15. Pemeriksaan rutin kendaraan dinas pimpinan 16. Pemeriksaan berkala kendaraan dinas pimpinan 17. Perawatan mesin dan kebersihan kendaraan dinas pimpinan 18. Pengelolaan barang persediaan 19. Penggantian BMN hilang dengan tuntutan ganti rugi 20. Penerimaan surat masuk 21. Pengarahan surat masuk 22. Pencatatan surat masuk 23. Pendistribusian surat masuk 24. Penataan surat masuk 25. Pengurusan surat tertutup (rahasia) 26. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 27. Peramu kantor 28. Penomoran surat keluar 29. Resepsionis	
8	Staf Pengelola Keuangan	43	1. Pengajuan permohoann penghapusan BMN berupa bangunan yang akan dibangun kembali 2. Pengajuan permohoann penghapusan BMN berupa peralatan kantor/meulebair 3. Pengajuan permohonan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas bermotor 4. Pelelangan BMN tindak lanjut dari penghapusan BMN 5. Penatausahaan Barang Milik Negara 6. Penggunaan BMN berupa	Sudah dievaluasi 04 September 2017

			laptop dan kendaraan dinas 7. Inventarisasi buku perpustakaan 8. Peminjaman buku perpustakaan 9. Pengembalian buku perpustakaan 10. Pengadaan barang dan jasa 11. Kebersihan gedung kantor 12. Pengaturan parkir kendaraan 13. Pengamanan kantor 14. Mengemudi kendaraan dinas pimpinan 15. Pemeriksaan rutin kendaraan dinas pimpinan 16. Pemeriksaan berkala kendaraan dinas pimpinan 17. Perawatan mesin dan kebersihan kendaraan dinas pimpinan 18. Pengelolaan barang persediaan 19. Penggantian BMN hilang dengan tuntutan ganti rugi 20. Penerimaan surat masuk 21. Pengarahan surat masuk 22. Pencatatan surat masuk 23. Pendistribusian surat masuk 24. Penataan surat masuk 25. Pengurusan surat tertutup (rahasia) 26. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 27. Peramu kantor 28. Penomoran surat keluar 29. Resepsionis 30. Pengajuan belanja modal ke KPPN 31. Pengajuan uang persediaan ke KPPN 32. Pengajuan belanja pegawai 33. Pembayaran uang makan 34. Pembayaran kekurangan gaji 35. Pengajuan tunjangan remunerasi 36. Pembayaran dan validasi pajak 37. Penyetoran dan laporan	

			penerimaan negara bukan pajak 38. Pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) 39. Rekonsiliasi laporan keuangan bulanan ke KPPN 40. Laporan alokasi belanja data dan jasa 41. Pelaporan Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 42. Penyusunan Laporan CALK Semesteran dan Tahunan 43. Pelaporan SPT Tahunan wajib pajak	
7	Staf Kepegawaian dan Ortala	28	1. Pemutakhiran data Sapk BKN dan Sikep Simari 2. Update data ke dalam aplikasi Simpeg 3. Penyusunan Job Description Pegawai 4. Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai 5. Pengisian register / buku induk kepegawaian 6. Pembuatan dan pembaruan SK yang berhubungan dengan tugas pegawai 7. Pembuatan daftar hadir dan pulang (Absensi) pegawai 8. Usulan permohonan cuti 9. Usulan kenaikan pangkat 10. Usulan pensiun 11. Pengajuan ijin belajar 12. Pengajuan pembuatan karis/karsu 13. Pengajuan pembuatan karpeg 14. Pengajuan pembuatan Taspen 15. Pengajuan pembuatan BPJS 16. Pembuatan surat tugas 17. Pembuatan daftar penilaian prestasi kerja pegawai 18. Usulan CPNS menjadi PNS	Sudah dievaluasi 04 September 2017

			19. Usulan mendapatkan penghargaan Karyasatya dan Satyalancana Karya Satya 20. Usulan kenaikan gaji berkala 21. Usulan kenaikan pangkat ke BKN dan Ditjen Badilag 22. Pelaksanaan pengambilan sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan 23. Pembuatan surat pernyataan pelantikan 24. Pembuatan surat penyataan menduduki jabatan 25. Pembuatan surat pernyataan melaksanakan tugas 26. Pembuatan bezetting 27. Pembuatan daftar urut kepangkatan (DUK) 28. Pembuatan surat keluar untuk intern dan ekstern	
III	Fungsional			
			-	

1.6. SOP Pengadilan Agama Jakarta Utara

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Ket
			I.	
1.	**Ketua**	**25 SOP**	1. Manajemen Risiko Pengadilan Agama	
			2. Komunikasi	
			3. Asessment Internal	
			4. Tinjauan Manajemen	
			5. Pengendalian Produk/Layanan Tidak Sesuai	
			6. Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai	
			7. Pemberian Nilai Kepada Pegawai dan Pende legasian Wewenang	
			8. Keprotokolan	
			9. Pelayanan Informasi	
			10. Pelayanan Pos Bantuan Hukum	
			11. Pelayanan Sidang diluar Gedung Pengadilan	
			12. Pelayanan Pembayaran Panjar Biaya Perkara	
			13. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim	
			14. Penetapan Hari Sidang	

			15. kegiatan persiapan persidangan	
			16. Layanan Penundaan Sidang	
			17. Layanan Pemanggilan Saksi	
			18. Pelayanan Pemeriksaan Setempat	
			19. Pelayanan Sita Jaminan	
			20. Pelayanan Sita Buntut	
			21. Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara	
			22. Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	
			23. Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	
			24. Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang	
			25. Pelayanan Permohonan Konsinyasi	
2.	**Wakil**	**37 SOP**	1. Manajemen Resiko	
			2. Pengendalian Dokumen	
			3. Pengendalian rekaman / arsip	
			4. Komunikasi	
			5. Assesmen internal	
			6. Tinjauan manajemen	
			7. Pengendalian layanan	
			8. Survey kepuasan mas	
			9. Pengelolaan pegawai	
			10. Pengelolaan ijin perkawinan/ cerai pegawai	
			11. Pemberian nilai/ delegasi wewenang	
			12. Pemberian penghargaan Pet	
			13. Pelaporan LHKPN	
			14. Kehumasan	
			15. Pelayanan Infor.	
			16. Pelayanan POSBAKUM	
			17. Sidang keliling	
			18. PMH	
			19. Panjar biaya	
			20. PHS	
			21. Pemanggilan	
			22. Tabayun	
			23. Mediasi	
			24. Penundaan sidang	
			25. Pemanggilan saksi	
			26. Tabayun pemeriksaan saksi	
			27. Pemeriksaan setempat	
			28. Tabayun pemeriksaan setempat	
			29. Teguran Panjar	

			30. Sita jaminan	
			31. Sita Buntut	
			32. Sita Harta bersama tanpa perkara	
			33. Pemb. Isi putusan	
			34. Pengambilan sisa panjar	
			35. Penyerahan salinan putusan pertama	
			36. Ikrar talak	
			37. Penyerahan hasil sidang	
3.	**Hakim**	**32 SOP**	1. Penetapan Hari Sidang	
			2. kegiatan persiapan persidangan	
			3. Pelayanan Mediasi	
			4. Pemanggilan Mediasi	
			5. Layanan Penundaan Sidang	
			6. Layanan Pemanggilan Saksi	
			7. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain	
			8. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain	
			9. Pelayanan Pemeriksaan Setempat	
			10. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain	
			11. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain	
			12. Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar	
			13. Pelayanan Sita Jaminan	
			14. Pelayanan Sita Buntut	
			15. Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara	
			16. Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan	
			17. Pengambilan Sisa Panjar	
			18. Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak	
			19. Pelayanan Ikrar Talak	
			20. Penyerahan Produk Pengadilan	
			21. Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak	
			22. Pengiriman Salinan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA	
			23. Permintaan Salinan Putusan/Penetapan	
			24. Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak	
			25. Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana	

			26. Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	
			27. Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu	
			28. Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu	
			29. Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi	
			30. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	
			31. Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal	
			32. Pengarsipan	
4.	**Panitera**	**73 SOP**	1. Pelayanan Informasi	
			2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum	
			3. Pelayanan Sidang diluar Gedung Pengadilan	
			4. Pelayanan Penerimaan Perkara	
			5. Pelayanan Pembayaran Panjar Biaya Perkara	
			6. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim	
			7. Penetapan penunjukan Panitera Pengganti	
			8. Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	
			9. Penetapan Hari Sidang	
			10. Pemanggilan Para Pihak	
			11. Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan ke Pengadilan Agama	
			12. Pelayanan Pelaksanaan Penyampaian Panggilan langsung kepada para pihak	
			13. Kegiatan persiapan persidangan	
			14. Pelayanan Mediasi	
			15. Pemanggilan Mediasi	
			16. Pelayanan Mediasi	
			17. Pemanggilan Mediasi	
			18. Layanan Penundaan Sidang	
			19. Layanan Pemanggilan Saksi	
			20. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain	
			21. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain	
			22. Pelayanan Pemeriksaan Setempat	
			23. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain	

			24. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain	
			25. Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar	
			26. Pelayanan teguran Panjar Biaya Perkara yang Tidak Menambah Panjar	
			27. Pelayanan Sita Jaminan	
			28. Pelayanan Sita Buntut	
			29. Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara	
			30. Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan	
			31. Pengambilan Sisa Panjar	
			32. Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak	
			33. Pengembalian Kutipan Akta Nikah	
			34. Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap	
			35. Pelayanan Ikrar Talak	
			36. Penyerahan Produk Pengadilan	
			37. Penyerahan Akta cerai	
			38. Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak	
			39. Pengiriman Salinan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA	
			40. Permintaan Salinan Putusan/Penetapan	
			41. Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat	
			42. Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak	
			43. Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana	
			44. Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	
			45. Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu	
			46. Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu	
			47. Pelayanan Banding	
			48. Pelayanan Kasasi	
			49. Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas	
			50. Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	

			51. Pelayanan Peninjauan Kembali	
			52. Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama	
			53. Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding	
			54. Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi	
			55. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	
			56. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	
			57. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	
			58. Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	
			59. Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	
			60. Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang	
			61. Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain	
			62. Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain	
			63. Pelayanan Permohonan Konsinyasi	
			64. Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal	
			65. Pengarsipan	
			66. Prosedur Pelaporan	
			67. Prosedur Pengaduan	
			68. Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri	
			69. Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	
			70. Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter	
			71. Pengelolaan ATK Perkara	
			72. Pengelolaan Panjar Biaya Perkara	
			73. Pengelolaan Sisa Panjar	
5.	**Wakil**	**71 SOP**	1. Pelayanan Informasi	
			2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum	
			3. Pelayanan Sidang diluar Gedung Pengadilan	
			4. Pelayanan Penerimaan Perkara	
			5. Pelayanan Pembayaran Panjar Biaya Perkara	
			6. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim	
			7. Penetapan penunjukan Panitera Pengganti	

			8. Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	
			9. Penetapan Hari Sidang	
			10. Pemanggilan Para Pihak	
			11. Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain	
			12. Pelayanan Pelaksanaan Penyampaian Panggilan langsung kepada para pihak	
			13. Kegiatan persiapan persidangan	
			14. Pelayanan Mediasi	
			15. Pemanggilan Mediasi	
			16. Layanan Penundaan Sidang	
			17. Layanan Pemanggilan Saksi	
			18. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain	
			19. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain	
			20. Pelayanan Pemeriksaan Setempat	
			21. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain	
			22. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain	
			23. Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar	
			24. Pelayanan teguran Panjar Biaya Perkara yang Tidak Menambah Panjar	
			25. Pelayanan Sita Jaminan	
			26. Pelayanan Sita Buntut	
			27. Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara	
			28. Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan	
			29. Pengambilan Sisa Panjar	
			30. Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak	
			31. Pengembalian Kutipan Akta Nikah	
			32. Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap	
			33. Pelayanan Ikrar Talak	
			34. Penyerahan Produk Pengadilan	
			35. Penyerahan Akta cerai	
			36. Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak	
			37. Pengiriman Salinan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA	
			38. Permintaan Salinan Putusan/Penetapan	
			39. Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat	
			40. Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak	

			41. Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana	
			42. Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi	
			43. Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam	
			44. Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu	
			45. Pelayanan Banding	
			46. Pelayanan Kasasi	
			47. Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas	
			48. Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	
			49. Pelayanan Peninjauan Kembali	
			50. Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama	
			51. Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding	
			52. Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi	
			53. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	
			54. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	
			55. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	
			56. Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	
			57. Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	
			58. Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang	
			59. Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain	
			60. Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain	
			61. Pelayanan Permohonan Konsinyasi	
			62. Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal	
			63. Pengarsipan	
			64. Prosedur Pelaporan	
			65. Prosedur Pengaduan	
			66. Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri	

			67. Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	
			68. Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter	
			69. Pengelolaan ATK Perkara	
			70. Pengelolaan Panjar Biaya Perkara	
			71. Pengelolaan Sisa Panjar	
6.	**Panitera Muda**	**13 SOP**	1. Pelayanan informasi	
			2. Persiapan Persidangan	
			3. Layanan penundaan sidang	
			4. Teguran tambah panjar	
			5. Pengembalian kutipan akta nikah	
			6. Ikrar talak	
			7. Pengiriman salinan putusan yg sdh BHT	
			8. Pelayanan permintaan salinan putusan/ penetapan	
			9. Permohonan Itsbat dan Rukyat	
			10. Pengarsipan	
			11. Prosedur pelaporan	
			12. Prosedur pengaduan	
			13. Pengelolaan ATK perkara	
7.	**Panitera Muda**	**9 SOP**	1. Pelayanan Penerimaan Perkara	
			2. Pelayanan Pembayaran Panjar Biaya Perkara	
			3. Pengembalian Kutipan Akta Nikah	
			4. Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum	
			5. Penyerahan Akta cerai	
			6. Permintaan Salinan Putusan/Penetapan	
			7. Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat	
			8. Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak	
			9. Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	
8	**Panitera Muda**	**10 SOP**	1. Kegiatan persiapan persidangan	
			2. Layanan Penundaan Sidang	
			3. Pelayanan Pemeriksaan Setempat	
			4. Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar	
			5. Pelayanan Banding	
			6. Pelayanan Kasasi	
			7. Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi	

			8. Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori	
			9. Pelayanan Peninjauan Kembali	
			10. Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding	
9	**Panitera Peng-**	**65 SOP**	1. Pelayanan Sidang diluar Gedung Pengadilan	
			2. Pelayanan Penerimaan Perkara	
			3. Pelayanan Pembayaran Panjar Biaya Perkara	
			4. Penetapan penunjukan Panitera Pengganti	
			5. Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	
			6. Penetapan Hari Sidang	
			7. Pemanggilan Para Pihak	
			8. Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan ke Pengadilan Agama	
			9. Pelayanan Pelaksanaan Penyampaian Panggilan langsung kepada para pihak	
			10. Kegiatan persiapan persidangan	
			11. Pelayanan Mediasi	
			12. Pemanggilan Mediasi	
			13. Layanan Penundaan Sidang	
			14. Layanan Pemanggilan Saksi	
			15. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain	
			16. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain	
			17. Pelayanan Pemeriksaan Setempat	
			18. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain	
			19. Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain	
			20. Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar	
			21. Pelayanan teguran Panjar Biaya Perkara yang Tidak Menambah Panjar	
			22. Pelayanan Sita Jaminan	
			23. Pelayanan Sita Buntut	
			24. Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara	
			25. Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan	
			26. Pengambilan Sisa Panjar	
			27. Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak	
			28. Pengembalian Kutipan Akta Nikah	
			29. Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap	

			30. Pelayanan Ikrar Talak	
			31. Penyerahan Produk Pengadilan	
			32. Penyerahan Akta cerai	
			33. Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak	
			34. Pengiriman Salinan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA	
			35. Permintaan Salinan Putusan/Penetapan	
			36. Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat	
			37. Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak	
			38. Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Me menuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana	
			39. Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat	
			40. Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas	
			41. Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu	
			42. Pelayanan Banding	
			43. Pelayanan Kasasi	
			44. Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas	
			45. Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori	
			46. Pelayanan Peninjauan Kembali	
			47. Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama	
			48. Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding	
			49. Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi	
			50. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	
			51. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	
			52. Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	
			53. Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	
			54. Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	
			55. Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang	
			56. Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain	

			57. Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain	
			58. Pelayanan Permohonan Konsinyasi	
			59. Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal	
			60. Pengarsipan	
			61. Prosedur Pelaporan	
			62. Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	
			63. Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter	
			64. Pengelolaan Panjar Biaya Perkara	
			65 . Pengelolaan Sisa Panjar	
10	**Jurusita/ Ju- rusita Pengganti**	**24 SOP**	1. Persiapan Persidangan	
			2. Teguran tambah panjar Ikrar talak	
			3. Pelayanan Sidang diluar Gedung Pengadilan	
			4. Pemanggilan Para Pihak	
			5. Permohonan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain	
			6. Pelayanan Pelaksanaan Penyampaian Panggilan langsung kepada para pihak	
			7. kegiatan persiapan persidangan	
			8. Pelayanan Mediasi	
			9. Pemanggilan Mediasi	
			10. Layanan Pemanggilan Saksi	
			11. Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar	
			12. Pelayanan teguran Panjar Biaya Perkara yang Tidak Menambah Panjar	
			13. Pelayanan Sita Jaminan	
			14. Pelayanan Sita Buntut	
			15. Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara	
			16. Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan	
			17. Pelayanan Ikrar Talak	
			18. Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak	
			19. Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama	
			20. Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	
			21. Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	
			22. Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang	

			23. Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain	
			24. Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain	
No	**Unit Kerja**	**Jumlah**	**Terdiri dari**	
II. Non Teknis Pengadilan				
1	**Sekretaris**	**42 SOP**	1. Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi	
			2. Pengembangan Pegawai	
			3. Ijin Belajar dan Tugas Belajar	
			4. Pengelolaan Pegawai	
			5. Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS	
			6. Pengelolaan Absensi Pegawai	
			7. Kenaikan Pangkat Non Teknis	
			8. Pengajuan Cuti Pegawai	
			9. Pengelolaan Kenaikan Pangkat Teknis	
			10. Kenaikan Gaji Berkala	
			11. Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian	
			12. Pengelolaan Pensiun Pegawai	
			13. Pemberian Nilai Kepada Pegawai dan Pende legasian Wewenang	
			14. Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai	
			15. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara	
			16. Pengelolaan Tata Naskah Dinas	
			17. Administrasi Persuratan Surat Masuk	
			18. Administrasi Persuratan Surat Keluar	
			19. Pengelolaan Arsip Aktif	
			20. Pengelolaan arsip In Aktif	
			21. Penatausahaan Aset	
			22. Penatausahaan Persediaan	
			23. Pemeliharaan Lingkungan dan	
			24. Pelaksanaan Kehumasan	
			25. Pemberian Informasi	
			26. Pengelolaan Perpustakaan	
			27. Pencairan Anggaran	
			28. Pertanggungjawaban Anggaran	
			29. Penatausahaan PNBP	
			30. Penyusunan Laporan Keuangan	
			31. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	

			32. Penyusunan SAKIP	
			33. Penyusunan Laporan	
			34. Pengelolaan TI	
			35. Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai	
			36. Kebersihan	
			37. Keprotokolan	
			38. Penata usahaan Laporan BMN	
			39. Lelang BMN	
			40. Penetapan Status Penggunaan Tingkat Satker	
			41. Alih Fungsi BMN	
			42. Penghapusan BMN	
2	**Ka.Sub.Bag. Kepeg. Dan Ortala**	**15 SOP**	1. Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi	
			2. Pengembangan Pegawai	
			3. Ijin Belajar dan Tugas Belajar	
			4. Pengelolaan Pegawai	
			5. Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS	
			6. Pengelolaan Absensi Pegawai	
			7. Kenaikan Pangkat Non Teknis	
			8. Pengajuan Cuti Pegawai	
			9. Pengelolaan Kenaikan Pangkat Teknis	
			10. Kenaikan Gaji Berkala	
			11. Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian	
			12. Pengelolaan Pensiun Pegawai	
			13. Pemberian Nilai Kepada Pegawai dan Pende legasian Wewenang	
			14. Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai	
			15. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara	
3	**Ka.Sub.Bag Rentilap**	**7 SOP**	1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	
			2. Penyusunan SAKIP	
			3. Penyusunan Laporan	
			4. Pengelolaan TI	
			5. Pencairan Anggaran	
			6. Pertanggung jawaban Anggaran	
			7. Penyusunan Laporan Keuangan	

4	Ka.Subag Umum dan Keuangan	23 SOP	1. Pengelolaan Tata Naskah Dinas	
			2. Administrasi Persuratan Surat Masuk	
			3. Administrasi Persuratan Surat Keluar	
			4. Pengelolaan Arsip Aktif	
			5. Pengelolaan Arsip In Aktif	
			6. Penatausahaan Aset	
			7. Penatausahaan Persediaan	
			8. Pemeliharaan Lingkungan dan	
			9. Pelaksanaan Kehumasan	
			10. Pemberian Informasi	
			11. Pengelolaan Perpustakaan	
			12. Pencairan Anggaran	
			13. Pertanggung jawaban Anggaran	
			14. Penatausahaan PNBP	
			15. Penyusunan Laporan Keuangan	
			16 Pengelolaan Administrasi Belanja	
			17. Kebersihan	
			18. Keprotokolan	
			19. Penatausahaan Laporan BMN	
			20. Lelang BMN	
			21. Penetapan Status Penggunaan Tingkat Satker	
			22. Alih Fungsi BMN	
			23. Penghapusan BMN	

2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

2.1. Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

No	Nama Pegawai	Jabatan	Jumlah Keg. tahun 2017
1	Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H	Ketua	29
2	Dr. Hj. DJAZIMAH MUQODDAS, S.H., M. Hum	Wakil Ketua	15
3	Drs. H. AHMAD YUNUS, MH	Hakim Utama	10
4	Drs. ABDUL MANAF, MH	Hakim Utama	10
5	Drs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH	Hakim Utama	10
6	Drs. H. RUSLAN ABD. GHANI, MH	Hakim Utama	10
7	Drs. H. SUDIRMAN S, SH. MH	Hakim Utama	10

8	Drs. H. HUSEN RIADY, SH. MH	Hakim Utama	10
9	Dra. AZIZAH BAJUBER, SH, MH	Hakim Utama	10
10	Drs. H. MUSFIZAL MUSA, S.H., M.H	Hakim Utama	11
11	Drs. H. LUTFI, S.H., M.H	Hakim Utama	11
12	Dr. H. KOMARI, SH . M. Hum	Hakim Utama	11
13	Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.	Hakim Utama Muda	12
14	Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H	Hakim Utama	10
15	Drs. ABD. ROZAK BACHTIAR HR, S.H., M.H.	Hakim Utama	9
16	Drs. H. MUH. ABDUH SULAEMAN, S.H, M.H	Hakim Utama Muda	10
17	Drs. KHAERIL R, M.H.	Hakim Utama Muda	10
18	Drs. H. DOMIRI, S.H., M.Hum	Hakim Utama Muda	12
19	Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H	Hakim Utama Muda	12
20	Drs. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H	Hakim Utama Muda	12
21	Drs. MUHAMMAD BASRI NASUTION, SH., MH.	Hakim Utama	8
22	Drs. H. HASANADI BADNI, SH., M.Hum	Hakim Utama	10
23	Drs. H. JAMILUS, SH. MH.	Hakim Utama	11
24	Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH., MH.	Hakim Utama	12
25	Dr. H. AHMAD FATHONI, SH., M.Hum	Hakim Utama	8
26	Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H	Hakim Utama	10
27	Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.	Hakim Utama	10
28	Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, M.H.	Hakim Utama Muda	9
29	Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.	Hakim Utama Muda	11
30	Drs. H. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.	Hakim Utama	8
	Kosong	Panitera	MPP
31	Drs. H. ANDI KURNIAWAN, M.M	Sekretaris	17
32	H. SAJADI, SH, MH.	Wakil Panitera	28
	Kosong	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Mutasi ke PTA Banten pada tahun 2016
33	H. FAUZAN, SH. MH. MM	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	11

34	UNA MUNASIR FATAH, ST	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	10
35	ANIMAR	Kepala Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan	27
36	RIZAL MUTAQIN, SE. MM	Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	17
37	ELVIRA AMEGIA, M. Kom	Kepala Sub Bag. Kepegawaian dan TI	22
38	FAHRUDDIN, SH	Panitera Muda Hukum	14
39	Hj. GHIZAR FAU'AH, SH. MH	Panitera Muda Banding	27
40	NASTITI DEWI, SH	Panitera Pengganti	12
41	SRI PURWANING RAHAYU, SH	Panitera Pengganti	12
42	RATU DHIYAFAH, SH	Panitera Pengganti	12
43	AKHMAD SAHID, SH	Panitera Pengganti	12
44	ABDULLAH, SH. MH.	Panitera Pengganti	12
45	MOHAMAD KHOTIB, SH. MH.	Panitera Pengganti	12
46	MAHRUM, SH	Panitera Pengganti	12
47	ENDANG PURWIHARTATI, SH. MH	Panitera Pengganti	12
48	ADAY, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti	12
49	Drs. H. ISKANDAR RAJA, SH., MH.	Panitera Pengganti	12
50	Hj. MUNYATI SALEH	Panitera Pengganti	12
51	AKHMAD FAUZY, S.H	Panitera Pengganti	12
52	ELIAKIM SIHOTANG, SH	Panitera Pengganti	12
53	Drs. H. ALY FAHMI, M.H.	Panitera Pengganti	12

54	ECEP AGUS SANI, SH	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	12
55	RIZCKY FALLAH ROMADHON N	Staf SubBag. Keuangan dan Pelaporan	16
56	YULITA FITRI HARTATY, SE	Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan/ Bendahara	15
57	RESTIANA IRWANTI, SE	Staf SubBag. Keuangan dan Pelaporan	15
58	ABDUL HARIS RANGKUTY, SE	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	12
59	RAHMATUL HAKIM, A. Md	Staf Kepaniteraan Banding	20
60	NENGCEU SITI ROHIMAH, SHI	Staf SubBag. Kepegawaian dan TI	19
61	ADE IRMA SURYANI, A. Md	Staf SubBag. Rencana Program dan Anggaran	11
62	HADI PUTRA, A. Md	Staf SubBag. Keuangan dan Pelaporan	12
63	DINA MARISA, S.Kom	Staf SubBag. Kepegawaian dan TI	17
64	MAMAT SUDRAJAT	Staf Kepaniteraan Banding	22
65	NINING RAHAYUNI, SH	Staf Kepaniteraan Hukum	6
66	DINA SAGITA, S. Sos	Staf SubBag. Kepegawaian dan TI	11

2.2. SKP Pengadilan Agama Jakarta Pusat

No	Nama	Jabatan	Jumlah kegiatan tahun 2017	Ket.
1	Drs. H. Moch. Sukkri, SH., MH.	Ketua	30	
2	Dra. Hj Ernida Basry, MH	Wakil ketua	13	
3	Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH.	Hakim utama muda	13	
4	Dra. Hj. Hafsah, SH	Hakim utama muda	12	
5	Drs. Chaeruddin, SH., MH	Hakim madya utama	12	
6	Dra. Isti'anah, MH.	Hakim madya utama	13	
7	Drs. H. Munadi, MH.	Hakim madya utama	12	
8	Drs. Azkar, SH	Hakim madya utama	12	
9	Drs. Naim, SH	Hakim madya muda	12	
10	Hj. Suciati, SH., MH.	Hakim madya muda	12	
11	Dra. Nur Djannah Syaf, SH., MH.	Hakim madya utama	13	
12	Dra. Alia Al Hasna, MH	Hakim madya muda	12	
13	Pahrurrozi, SH., MH	Panitera	16	
14	Suhendra, S.Sos., MM.	Sekretaris	13	
15	Drs. Mohammad Taufik, MH	Panmud gugatan	15	
16	Ikrimawati Ningsih, S.Ag, MH	Panmud permohonan	11	
17	Gunadi, SH., MH	Panmud hukum	13	
18	Titi Khotimah, SH.	Kasub bag	17	
19	Haryanti, SH.	Kasub bag perencanaan	13	

20	Riyanco Sari, S.Pd, MM	Kasub bag kepegawaian & ortala	13	
21	Hj. Aisyah HR., SH., MH	Panitera Pengganti	8	
22	Hj. Spa Ichtiyatun, SH., MH	Panitera Pengganti	8	
23	Dra. Risnawaty Tahir, M.Hes	Panitera Pengganti	8	
24	Dra. Mulyahefni	Panitera Pengganti	8	
25	Ahmad Irfan, SH	Panitera Pengganti	8	
26	Sahadi, SH	Panitera Pengganti	8	
27	Tratna Dewy, S.A.T., SH., MH.	Panitera Pengganti	8	
28	Fathony, SH., MH	Panitera Pengganti	8	
29	Sumaryuni, SH., MH	Panitera Pengganti	8	
30	Lusiah Saragih, S.Ag., MH.	Panitera Pengganti	8	
31	Etik Korniawati, SH., MH.	Panitera Pengganti	8	
32	Muhammad Iqbal Yunus, S.Hi., MH.	Panitera Pengganti	8	
33	Asep Yusman Buhori, S.Ag., MH	Panitera Pengganti	12	
34	Rita Susanti, SH	Panitera Pengganti	8	
35	Budy Setyo Rini, SH.	Panitera Pengganti	8	
36	Milhan Affani Istiqlal, SH	Panitera Pengganti	8	
37	Magdalena Hutagaol	Jurusita	9	
38	Budi Sukirno	Jurusita	8	
39	Wardono	Jurusita	9	
40	Muhammad Muchram	Jurusita	9	
41	Ruslani	Jurusita	9	

42	Jusriah Rieuwpasa, S.Hi.	Jurusita Pengganti	10	
43	Zulqa Reznyka Rum, SE., MH.	Jurusita Pengganti	10	
44	Sri Mahanum	Jurusita Pengganti	12	
45	Fita Alfiany AR Paputungan, S.Kom	Jurusita Pengganti	12	
46	Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom.	Jurusita Pengganti	10	
47	Nurhidayah Megawati, SH.	Jurusita Pengganti	12	
48	Nurwilis, SH.	Jurusita Pengganti	12	
49	Achmad Fadli, A.Md.	Jurusita Pengganti	10	
50	Nyayu Asha Della Sati, A,Md.	Jurusita Pengganti	10	
51	Drs. Saharun	Jurusita Pengganti	10	

2.3. SKP Pengadilan Agama Jakarta Barat

No	Sasaran Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Tahun 2017	Keterangan
1	Ketua	36	19 Tugas Administrasi Umum dan 7 Tugas Teknis Peradilan
2	Wakil Ketua	20	13 Tugas Administrasi Umum dan 7 Tugas Teknis Peradilan
3	Hakim	14	-
4	Sekretaris	17	16 Tugas Pokok dan 1 Tugas Tambahan
5	Panitera	21	-
6	Panitera Muda Permohonan	16	-

7	Panitera Muda Gugatan	18	15 Tugas Pokok dan 3 Tugas Tambahan
8	Panitera Muda Hukum	16	-
9	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan	26	-
10	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Ortala	17	-
11	Kepala Sub Bagian Perencana-an, TI dan Pelaporan	19	-
12	Panitera Pengganti	10	-
13	Jurusita / Jurusita Pengganti	13	-

2.4. SKP Pengadilan Agama Jakarta Timur

No.	Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Tahun 2017	Keterangan
1	Ketua	21	
2	Wakil Ketua	24	
3	Hakim	23	
4	Panitera	15	
5	Panitera Muda Hukum	16	
6	Panitera Muda Gugatan	14	
7	Panitera Muda Permohonan	16	
8	Panitera Pengganti	17	
9	Jurusita/Jurusita Pengganti	7	
10	Sekretaris	19	
11	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	13	
12	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	15	

13	Kasubbag Umum dan Keuangan	18	
14	Staf Meja I	11	
15	Staf Meja II	7	
16	Staf Meja III	11	

2.5. SKP Pengadilan Agama Jakarta Selatan

No.	Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Th. 2017	Keterangan
1	Ketua **Drs. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H.**	20 SKP	1) Membuat RKT 2) Membuat SOP 3) Membuat AKIP 4) Membuat LAKIP 5) Menunjuk Mediator 6) Membuat PMH 7) Menerima, Mempelajari, dan Memeriksa Berkas Perkara 8) Membuat PHS 9) Menyidangkan Perkara 10) Mengoreksi Berita Acara 11) Menandatangani Berita Acara 12) Membuat / Mengoreksi Konsep Putusan 13) Menandatangani Putusan 14) Meminutasi Berkas Perkara 15) Mengkoordinir Hakim Pengawas Bidang untuk melakukan pengawasan 16) Menerima Laporan Hasil Pengawasan oleh hakim Pengawas Bidang 17) Melakukan Evaluasi dan Melaporkan Hasil Pengawasan 18) Memimpin Rapat BAPERJAKAT 19) Membuat Laporan Kegiatan Hakim 20) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pegawai / Hakim yang melakukan pelanggaran atas laporan masyarakat / atas perintah KPTA dan BAWAS
2	WakilKetua/ **HJ.ATIFATURRAHMANIY**	20 SKP	1) Membuat RKT, 2) Membuat SOP

	AH, S.H., M.H.		3) Membuat AKIP 4) Membuat LAKIP 5) Menunjuk Mediator 6) Membuat PMH 7) Menerima, Mempelajari, dan Memeriksa Berkas Perkara 8) Membuat PHS 9) Menyidangkan Perkara 10) Mengoreksi Berita Acara 11) Menandatangani Berita Acara 12) Membuat / Mengoreksi Konsep Putusan 13) Menandatangani Putusan 14) Meminutasi Berkas Perkara 15) Mengkoordinir Hakim Pengawas Bidang untuk melakukan pengawasan 16) Menerima Laporan Hasil Pengawasan oleh hakim Pengawas Bidang 17) Melakukan Evaluasi dan Melaporkan Hasil Pengawasan 18) Melakukan Rapat BAPERJAKAT 19) Membuat Laporan Kegiatan Hakim 20) Membuat BAP Pegawai/Hakim yang melakukan pelanggaran atas laporan masyarakat / atas perintah KPTA dan BAWAS
3	• Hakim Anggota: • Drs. H. Syafi'uddin, S.H.,M.H. • Drs. Cece Rukmana Ibrahim, S.H., M.H. • Drs. H. Nur Mujib, M.H. • Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. • Drs. H. Abdul Jabar, M.H. • Drs. Abdul Shomad • Drs. H. Yusran, M.H. • Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H. • Dr. Nur Yahya, M.H. • Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H. • Dra. Neneng Susilawati, M.H.	12 SKP	1) Menyusun rencana kerja 2) Mempelajari berkas perkara; 3) Menandatangani instrumen persidangan. 4) Menyidangkan perkara sebagai Hakim Anggota 5) Melakukan musyawarah majelis hakim sebagai Hakim Anggota 6) Mengoreksi berita acara 7) Melakukan musyawarah majelis 8) Membuat konsep putusan 9) Menandatangani putusan 10) Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi 11) Membuat laporan kegiatan hakim 12) Menunjuk mediator

	• Dra. Hj. Fauziah • Dra. Raden Ayu Husna AR • Dr. H. Jarkasih, M.H. • Drs. H. Ace Ma'mun, M.H. • Ahmad Bisri, S.H., M.H. • Dr. H. Farid Ismail, S.H., M.H.		13) Menandatangani Putusan/ Penetapan sebagai Hakim Anggota 14) Menganonim Putusan
4	Hakim Pengawas	2 SKP	1) Melakukan Pengawasan 2) Membuat laporan hasil pengawasan
5	Ketua Majelis	4 SKP	3) Menyidangkan perkara sebagai Ketua Majelis 4) Melakukan musyawarah majelis hakim sebagai Ketua Majelis 5) Membuat Konsep Putusan sebagai Ketua Majelis 6) Menandatangani Putusan/ Penetapan sebagai Ketua Majelis
6	Panitera **:** Sufyan, S.H.	31 SKP	1) Menyusun program kerja 2) Membuat rencana anggaran biaya proses 3) Membuat surat penunjukan Panitera Pengganti 4) Membuat surat penunjukan jurusita/jurusita pengganti 5) Menandatangani Akta Cerai 6) Menandatangani akta Banding 7) Menandatangani akta Kasasi 8) Menandatangani akta PK 9) Meneliti dan menandatangani laporan perkara 10) Membuat Berita Acara Sidang (BAS) 11) Membuat berita acara sita / eksekusi 12) Membuat instrumen PGL / PBT / Amar Putus / Tunda 13) Melaksanakann pemberkasan perkara / minutasi 14) Mengikuti dan mencatat jalannya sidang 15) Melaksanakan eksekusi 16) Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi 17) Menyusun laporan tahunan 18) Menyusun data untuk

			LAKIP 19) Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara baru 20) Menyiapkan data perkara untuk bahan penyusunan program kerja 21) Menyiapkan bahan program kerja di bidang kepaniteraan 22) Menyiapkan bahan rencana anggaran biaya proses 23) Meneliti dan memeriksa bahan laporan keuangan perkara 24) Membuat laporan realisasi biaya proses (anggaran) 25) Menandatangani surat permohonan bantuan ke PA. lain di luar wilayah PA Jakarta Selatan 26) Menandatangani surat pengiriman kembali relaas ke PA. Pengaju 27) Menandatangani surat teguran penambahan panjar 28) Menandatangani surat keterangan tidak menambah panjar 29) Menandatangani akta cerai dan salinan putusan 30) Melegalisasi surat kuasa 31) Menandantangani surat pengantar pengiriman salinan ke KUA
6	Panitera Muda Gugatan: Nurlaelah, S.H.	10 SKP	1) Menyusun rencana kerja Panitera Muda Gugatan 2) Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 3) Membuat Berita Acara Sidang (BAS) 4) Membuat instrumen PGL / PBT / Amar Putus / Undur 5) Mengetik Penetapan (Sita / Ikrar) 6) Melaksanakan pemberkasan perkara 7) Menerima / memeriksa berkas gungatan yang diajukan 8) Mengisi buku register perkara gugatan 9) Menaksir panjar biaya perkara gugatan

			10) Merekap perkara gugatan
7	Panitera Muda Permohonan Rahyuni, S.H.	12 SKP	1) Menyusun rencana kerja Panitera Muda Permohonan 2) Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 3) Membuat Berita Acara Sidang (BAS) 4) Menandatangani BAS bersama Ketua Majelis 5) Mengetik Penetapan (Sita / Ikrar) 6) Melaksanakan pemberkasan perkara 7) Menerima / memeriksa berkas permohonan yang diajukan 8) Mengisi buku register perkara permohonan 9) Menaksir panjar biaya perkara permohonan 10) Merekap perkara permohonan 11) Membuat instrumen PGL / PBT / Amar Putus / Undur 12) Memeriksa berkas perkara permohonan yang telah diminutasi
8	Panitera Muda Hukum Nova Asrul Luthfi, S.H.	10 SKP	1) Menyusun rencana kerja Panitera Muda Hukum 2) Mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan 3) Membuat Berita Acara Sidang (BAS) 4) Menandatangani BAS bersama Ketua Majelis 5) Meminutasi berkas perkara 6) Mengumpulkan dan mengolah data perkara 7) Membuat konsep dan menyelesaikan laporan perkara 8) Menyajikan statistik perkara 9) Menerima berkas perkara yang selesai (in aktif) dari Panmud Gugatan/Permohonan 10) Mengarsipkan berkas perkara in aktif
9	Panitera Pengganti: • Hj. Rahmi, S.H. • Drs. H. Isep Sadeli	6 SKP	1) Mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan 2) Membuat berita acara sidang

	• Titiek Indriaty, S.H. • Dra. Siti Nurhayati • Yulisma, S.H. • Hj. Andar Aryani, S.H., M.H. • Zulhemi, S.H. • Siti Makbullah, S.H. • Atiyah Shaofanah, S.H. • Muhlis, S.H., M.H. • H. Zainal Abidin Sofyan, S.H. • Rahmah Sufiyah, S.H., M.H. • Sri Mulyati, S.Ag., M.H. • Arifin, S.Ag., M.HI. • Hj. Alfiah Yuliastuti, S.H., M.H. • Rohimah, S.H., M.H. • Neneng Kurniati, S.Ag. • Hikmayati, S.H. • Ustiana Putri Utami, S.H., M.H. • Faizatur Rahmah, S.H., M.H. • Nur Holia, S.H., M.H. • Sujiati, S.H., M.H. • Hasan Bajuri, S.H.I. • Adi Praswara Ary, S.H., M.H.		(BAS) 3) Membuat instrumen PGL / PBT / amar putus / undur 4) Melaksanakan pemberkasan perkara 5) Melapor kepada petugas register 6) Menyerahkan berkas perkara yangn telah diminutasi kepada Panitera / Panitera Muda Hukum
11	Jurusita: • Ombang Hasyim Ashari, S.Ag. • Sumaryono • Wisno Widjaya, S.E., M.H. • Zamrun Najib, S.E.	9 SKP	1) Membuat relaas panggilan kepada para pihak 2) Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak 3) Membuat dan melaksanakan pemberitahuan 4) Menyerahkan ke Majelis Hakim hasil panggilan dan pemberitahuan 5) Melaksanakan penyitaan 6) Membuat berita acara penyitaan 7) Menyampaikan surat pengumuman / teguran 8) Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait 9) Membuat / mengisi agenda kegiatan kejurusitaan dan menutupnya setiap bulan kepada atasan
12	Jurusita Pengganti: • Sudiono • Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H.	6 SKP	1) Membuat relaas panggilan kepada para pihak 2) Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak

	• Nining Widiawati • Tati Julianti • Aji Djuanda Rachmad • Kunthi Septyanti, S.H. • M. Sahid • Muhammad Yunus, S.HI. • Muh. Syaifur Rohim, S.EI. • Nanang Nurwahyudi, S.H. • Dini Triana, S.Sos., M.H. • Atun, S.H., M.H. • Mohammad Lutfie Awal, S.H. • Pawit		3) Membuat dan melaksanakan pemberitahuan 4) Menyampaikan surat pengumuman 5) Menyerahkan ke Majelis Hakim hasil panggilan dan pemberitahuan 6) Membuat / mengisi agenda kegiatan kejurusitaan dan menutupnya setiap bulan kepada atasan
12	Sekretaris Dodo Surgandha, S.H., M.Pd.	13 SKP	1) Menyusun dan merencanakan Anggaran Tahun 2017 2) Menyimpan dokumen sekretariatan sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan pimpinan 3) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan berdasarkan DIPA 4) Menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Barang / Jasa 5) Menandatangani laporan keuangan Triwulan dan PP 39 6) Membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPP) untuk diteruskan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar 7) Konsep rumusan kebijakan pimpinan 8) Meneliti dan menandatangani bukti pengeluaran anggaran (kuitansi) 9) Membuat surat perintah membayar (SPB) yang disampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai dasar untuk melakukan pembayaran / transaksi atas pengelola keuangan yang dikelolanya 10) Menyusun program penambahan pegawai non Sarjana Hukum

			11) Menyiapkan bahan, data dan rumusan untuk menyusun laporan tahunan 12) Menyiapkan data untuk Pembuatan LKJIP 13) Menyiapkan data dan mengikuti Rapat Baperjakat
13	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan Najamudin, S.Ag., S.H., M.H.	21 SKP	1) Menyusun pengajuna RKA-KL 01 DAN 04 2) Membuat TOR dan RAB serta data dukung pengajuan RKA-KL 01 dan 04 3) Melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan dan bagian-bagian lain dalam rangka penyusunan RKA-KL 4) Membuat jadual rencana penggunaan uang (RPU) dalam tahun berjalan 5) Membuat rencana penggunaan anggaran (RPA) dalam tahun berjalan 6) Melaksanakan Revisi DIPA 01 dan 04 7) Mengkoordinir penyusunan program kerja kesekretariatan 8) Menyajikan RUP pada aplikasi SIRUP 9) Memonitor pemeliharaan dan update data website Pengadilan Agama Jakarta Selatan 10) Memonitor pelaksanaan program dan anggaran melalui aplikasi e-monev Anggaran (Kemenkeu) 11) Memonitor pelaksanaan program dan anggaran melalui aplikasi e-monev Bappenas 12) Melaksanakan monitoring penerimaan surat-surat elektronik dari website PTA Jakarta, Badilag, Mahkamah Agung RI, Bawas Litbangdiklatkumdil, dan komdanas. 13) Mengkoordinir pelaksanaan pengiriman surat melalui email 14) Mengkoordinir upload berita ke website PA

			Jakarta Selatan dan Badilag 15) Mengkoordinir penghimpunan, penyusunan laporan tahunan dari masing-masing bagian. 16) Mengkoordinir penghimpunan, penyusunan SAKIP dari masing-masing bagian 17) Meneliti, memaraf dan memproses surat masuk Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan 18) Membuat SOP Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan 19) Membuat, menilai dan menandatangani SKP staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan 20) Membuat *Job Description* staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan 21) Melakukan evalasi/rapat pelaksanaan kegiatan Tim TI setiap triwulan.
14	Kasubbag. Umum dan Keuangan Djuhdan Muharom, S.H., M.M.	13 SKP	1) Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan 2) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan di Sub Bagian Umum dan Keuangan 3) Melaksanakan pelayanann administrasi umum, inventaris kantor dan dokumen kegiatan kantor 4) Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan ruangan serta halaman kantor 5) Menyelenggarakan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara 6) Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana 7) Menyelenggarakan pengelolaan surat masuk

			dan surat keluar 8) Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan 9) Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan barang penunjang tugas pokok dan fungsi kantor 10) Merealisasikan anggaran tahun 2017 11) Menerbitkan SPM DIPA 01 dan 04 12) Menyajikan data untuk LKjIP 13) Menyajikan data untuk bahan Laporan Tahunan
15	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala Nur Khaefah	11 SKP	1) Mengonsep, membuat dan menyelesaikan surat terkait kepegawaian 2) Membuat daftar hadir dan pulang pegawai 3) Merekap daftar hadir dan pulang pegawai 4) Menyelesaikan DUK 5) Menyelesaikan Bezzeting formasi 6) Menyelesaikan pengurusan kenaikan pangkat 7) Menyelesaikan pengurusan KGB pegawai 8) Memproses pengusulan Karpeg, Karis/Karsu Pegawai 9) Mengoreksi SK yang berkaitan dengan kepegawaian 10) Melakukan rapat Baperjakat 11) Membuat laporan tahunan sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
16	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan **Windarti, S.E., M.H.**	14 SKP	1) Menyiapkan kelengkapan permintaan uang persediaan 2) Membayar gaji dan dana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jumlah dalam daftar yang telah disahkan oleh pimpinan 3) Membayar uang makan sesuai rekapitulasi kehadiran pegawai 4) Mengambil uang di bank dan

			menyimpan di tempat yang telah disahkan oleh pimpinan 5) Melakukan pembayaran atas tagihan SPB yang diajukan PPK 6) Melakukan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke bank yang ditunjuk dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak 7) Membuat rekapitulasi kuitansi untuk SPJ GU 8) Membuat SPJ LS (lembur, honor dan lainnya) 9) Melakukan tugas-tugas bendaharawan rutin/gaji untuk pemotongan sebagai setoran ke koperasi, bank dll 10) Membukukan seluruh kegiatan perbendaharaan 11) Membuat LPJ bendahara pengeluaran dan melaporkan ke KPPN 12) Membuat laporan remunerasi (pertanggungjawaban di muka tunjangan khusus kinerja) sesuai rekapitulasi kehadiran pegawai dari Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala 13) Menata kearsipan bendahara pengeluaran 14) Membuat SPT tahunan pribadi pegawai
17	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Debi Anggita Markhatus Solihkah, S.E., M.B.A.	9 SKP	1) Melaksanakan program gaji pokok (GPP) meliputi gaji bulanan, gaji ke 13, uang makan, gaji susulan dan kekurangan gaji 2) Membuat surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) 3) Memasukkan SPM program gaji pokok ke KPPN guna penerbitan SKPP 4) Memasukkan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) ke KPPN guna pengesahan SKPP 5) Membuat KP4 seluruh

			pegawai pada akhir tahun 6) Menginput data keuangan dalam pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN 7) Menyusun CALK semesteran dan tahunan 8) Membuat daftar remunerasi pegawai melalui aplikasi komdanas 9) Melaksanakan pengetikan yang berkaitan dengan tugas keuangan
18	Staf . Kepaniteraan Ais	3 SKP	1) Melaksanakan penyerahan salinan putusan 2) Melaksanakan penyerahan salinan penetapan 3) Melaksanakan penyerahann akta cerai
19.	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan Nurhasan	5 SKP	1) Menyiapkan Absensi 2) Mengkoordinasikan para honorer 3) Memeriksa dan mematikan peralatan elektronik kantor yang sudah tidak digunakan 4) Mengunci ruangan-ruangan yang tidak terpakai 5) Membuat laporan pelaksanaan tugas
	Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala Rika Delfa Yona, S.H.I.	10 SKP	1) Menyiapkan daftar hadir dan pulang Hakim, Pegawai dan Honor 2) Merekap daftar hadir dan pulang Hakim, Pegawai dan Honor 3) Mengetik / membuat dan menyelesaikan surat keluar dan masuk 4) Mengetik / membuat dan menyelesaikan surat cuti 5) Mengetik / membuat dan menyelesaikan surat tugas 6) Menyelesaikan Bezzeting Formasi 7) Menyelesaikan pengurusan kenaikan pangkat dan KGB 8) Memproses pengusulan Karpeg, Karis, Karsu Pegawai 9) Mengoperasikan Aplikasi SIMKEP, E-DOC dan SIKEP

			10) Membuat laporan kepegawaian
	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan: Lian Merilan, S.E.	5 SKP	1) Mengetik konsep surat-surat kesekretariatan 2) Menyiapkan dan mengoreksi bahan untuk laporan (bulanan, semester, tahunan) 3) Menyusun dan mengoreksi konsep usulan rencana (anggaran maupun BMN) 4) Menginventarisir dan menelaah pelaksanaan TI 5) Mengelola perpustakaan

2.6. SKP Pengadilan Agama Jakarta Utara

No.	Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Tahun 2017	Keterangan
1	Ketua	35 Kegiatan	
2	Wakil Ketua	39 Kegiatan	
3	Hakim	17 Kegiatan	
4	Panitera	32 Kegiatan	
5	Wakil Panitera	13 Kegiatan	
6	Panitera Muda Hukum	13 Kegiatan	
7	Panitera Muda Gugatan	12 Kegiatan	
8	Panitera Muda	14 Kegiatan	
9	Panitera Pengganti	12 Kegiatan	
10	Jurusita/ Jurusita	7 dan 8 Kegiatan	
11	Sekretaris	15 Kegiatan	
12	Ka.Sub.Bag Ortala	14 Kegiatan	
13	Ka.Sub.Bag Rentilap	11 Kegiatan	
14	Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan	17 Kegiatan	

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah merupakan salah satu mekanisme pengaturan (regulasi) yang bertujuan untuk mendorong upaya

peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Agama untuk kepuasan pencari keadilan.

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah setelah memenuhi kriteria penilaian Mutu sesuai dengan Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah yang berlaku berdasarkan rekomendasi Asesor pada pelaksanaan audit Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di lapangan.

Unsur yang dinilai dalam Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah terdiri dari : 1) Administrasi Manajemen, 2) Administrasi Kesekretariatan, 3) Administrasi Kepaniteraan. Serta sarana prasarana.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah membentuk Tim asistensi Sertifikasi Akreditasi Penjamin Mutu (SAPM) sesuai dengan Surat dari Dirjen BADILAG 297LIDJAIOT.O1.3/07 12017 tanggal 27 Juli 2017 yang ditindaklanjuti dengan surat Ketua PTA DKI Jakarta W9-A/7354/OT.01.3/8/2017 untuk memberikan pendampingan dan persiapan kepada PA Se-DKI Jakarta untuk mendapatkan SAPM Peradilan Agama pada tahun 2017.

SAPM Tahap pertama tahun 2017 telah selesai, 4 (empat) Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah terakreditasi dengan nilai A Excellent yaitu PA Jakarta Barat, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur dan PA Utara.

No	Satuan Kerja	ISO/ SAPM	Keterangan
1	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	ISO: 9001-2015	Tahun 2016
2	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	ISO: 9001-2008	Tahun 2015
3	Pengadilan Agama Jakarta Barat	1) ISO: 9001-2015 2) Terakreditasi A	Tahun 2016 Tahun 2017
4	Pengadilan Agama	1) ISO: 9001-2008	Tahun 2016

	Jakarta Timur	2) Terakreditasi A	Tahun 2017
5	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	1) ISO: 9001-2008 2) Terakreditasi A	Tahun 2015 Tahun 2017
6	Pengadilan Agama Jakarta Utara	1) ISO: 9001-2008 2) Terakreditasi A	Tahun 2016 Tahun 2017

2. Posyankum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)

LAPORAN PELAKSANAAN POSYANKUM TAHUN 2017

NO	PENGADILAN AGAMA	PAGU	REALISASI	SISA
1	JAKARTA PUSAT	156.000.000	141.400.000	14.600.000
2	JAKARTA BARAT	156.000.000	155.920.000	80.000
3	JAKARTA TIMUR	156.000.000	156.000.000	0
4	JAKARTA SELATAN	156.000.000	156.000.000	0
5	JAKARTA UTARA	152.000.000	151.950.000	50.000

3. Pelaksanaan Sidang Keliling

LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING TAHUN 2017

NO	PENGADILAN AGAMA	PAGU	REALISASI	SISA
1	JAKARTA PUSAT	-	-	-
2	JAKARTA BARAT	-	-	-
3	JAKARTA TIMUR	-	-	-
4	JAKARTA SELATAN	-	-	-
5	JAKARTA UTARA	125.000.000	124.996.000	4.000

4. Perkara Prodeo

LAPORAN PRODEO TAHUN 2017

NO	PENGADILAN AGAMA	PAGU	REALISASI	SISA
1	JAKARTA PUSAT	12.480.000	12.086.000	394.000
2	JAKARTA BARAT	12.480.000	12.480.000	-
3	JAKARTA TIMUR	31.200.000	31.200.000	-
4	JAKARTA SELATAN	31.200.000	31.200.000	-
5	JAKARTA UTARA	12.480.000	11.722.000	758.000

.

LAPTAH 2017

BAB III

PEMBINAAN

PENGELOLAAN

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada Tahun 2017 yaitu : Tenaga Hakim secara keseluruhan berjumlah 110 orang, yang diperbantukan sebanyak 19 orang.,

Panitera 5 (lima) orang dimana Panitera pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta kosong sejak bulan Maret 2017, Wakil Panitera 2 (dua) orang yaitu pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Utara, Panitera Muda 17 orang, Panitera Pengganti sebanyak 102 orang, Juru Sita 19 orang dan Juru Sita Pengganti 63 orang.

No	Unit Kerja	Jml Hakim	Hakim Diper-bantukan	Hakim Riil	Pejabat Kepaniteraan	PP	Pejabat Struktural	JS	JSP	Staf	Jml	Juml Riil Peg
1	PTA Jakarta	30	13	17	3	14	6	0	0	13	**66**	**53**
2	PA Jakarta Pusat	12	1	11	4	16	4	5	10	0	51	**50**
3	PA Jakarta Barat	16	3	13	4	12	4	3	12	1	**52**	**49**
4	PA Jakarta Timur	19	0	19	4	22	4	5	15	5	**74**	**74**
5	PA Jakarta Selatan	19	0	19	4	24	4	4	14	6	**75**	**75**
6	PA Jakarta Utara	14	2	12	5	14	4	2	13	1	**53**	**51**
JUMLAH		**110**	**19**	**91**	**24**	**102**	**26**	**19**	**64**	**26**	**371**	**352**

1. Data Pegawai di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta :

1. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
I	**PTA DKI JAKARTA**		

1	Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H	Ketua	
2	Dr. Hj. DJAZIMAH MUQODDAS, S.H., M. Hum	Wakil Ketua	
3	Drs. H. AHMAD YUNUS, MH	Hakim Utama	Diperbantukan di BAWAS
4	Drs. ABDUL MANAF, MH	Hakim Utama	Diperbantukan di MA-RI
5	Drs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH	Hakim Utama	Diperbantukan di BAWAS
6	Drs. H. RUSLAN ABD. GHANI, MH	Hakim Utama	Diperbantukan di BAWAS
7	Drs. H. SUDIRMAN S, SH. MH	Hakim Utama	Diperbantukan di BAWAS
8	Drs. H. HUSEN RIADY, SH. MH	Hakim Utama	Diperbantukan di BAWAS
9	Dra. AZIZAH BAJUBER, SH, MH	Hakim Utama	Diperbantukan di BAWAS
10	Drs. H. MUSFIZAL MUSA, S.H., M.H	Hakim Utama	
11	Drs. H. LUTFI, S.H., M.H	Hakim Utama	
12	Dr. H. KOMARI, SH . M. Hum	Hakim Utama	
13	Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.	Hakim Utama Muda	
14	Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H	Hakim Utama	Diperbantukan di BAWAS
15	Drs. ABD. ROZAK BACHTIAR HR, S.H., M.H.	Hakim Utama	
16	Drs. H. MUH. ABDUH SULAEMAN, S.H, M.H	Hakim Utama Muda	Diperbantukan di BAWAS
17	Drs. KHAERIL R, M.H.	Hakim Utama Muda	Diperbantukan di BAWAS
18	Drs. H. DOMIRI, S.H., M.Hum	Hakim Utama Muda	Diperbantukan di LITBANG KUMDIL
19	Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H	Hakim Utama Muda	Diperbantukan di LITBANG KUMDIL
20	Drs. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H	Hakim Utama Muda	Diperbantukan di LITBANG KUMDIL
21	Drs. MUHAMMAD BASRI NASUTION, SH., MH.	Hakim Utama	
22	Drs. H. HASANADI BADNI, SH., M.Hum	Hakim Utama	
23	Drs. H. JAMILUS, SH. MH.	Hakim Utama	
24	Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH., MH.	Hakim Utama	
25	Dr. H. AHMAD FATHONI, SH., M.Hum	Hakim Utama	
26	Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H	Hakim Utama	

27	Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.	Hakim Utama	
28	Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, M.H.	Hakim Utama Muda	
29	Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.	Hakim Utama Muda	
30	Drs. H. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.	Hakim Utama	
	Kosong	Panitera	MPP
31	Drs. H. ANDI KURNIAWAN, M.M	Sekretaris	
32	H. SAJADI, SH, MH.	Wakil Panitera	
	Kosong	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Mutasi ke PTA Banten pada tahun 2016
33	H. FAUZAN, SH. MH. MM	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	
34	UNA MUNASIR FATAH, ST	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	
35	ANIMAR	Kepala Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan	
36	RIZAL MUTAQIN, SE. MM	Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	
37	ELVIRA AMEGIA, M. Kom	Kepala Sub Bag. Kepegawaian dan TI	
38	FAHRUDDIN, SH	Panitera Muda Hukum	
39	Hj. GHIZAR FAU'AH, SH. MH	Panitera Muda Banding	
40	NASTITI DEWI, SH	Panitera Pengganti	
41	SRI PURWANING RAHAYU, SH	Panitera Pengganti	
42	RATU DHIYAFAH, SH	Panitera Pengganti	
43	AKHMAD SAHID, SH	Panitera Pengganti	

44	ABDULLAH, SH. MH.	Panitera Pengganti	
45	MOHAMAD KHOTIB, SH. MH.	Panitera Pengganti	
46	MAHRUM, SH	Panitera Pengganti	
47	ENDANG PURWIHARTATI, SH. MH	Panitera Pengganti	
48	ADAY, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti	
49	Drs. H. ISKANDAR RAJA, SH., MH.	Panitera Pengganti	
50	Hj. MUNYATI SALEH	Panitera Pengganti	
51	AKHMAD FAUZY, S.H	Panitera Pengganti	
52	ELIAKIM SIHOTANG, SH	Panitera Pengganti	
53	Drs. H. ALY FAHMI, M.H.	Panitera Pengganti	
54	ECEP AGUS SANI, SH	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
55	RIZCKY FALLAH ROMADHON N	Staf Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan	
56	YULITA FITRI HARTATY, SE	Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan/ Bendahara	
57	RESTIANA IRWANTI, SE	Staf Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan	
58	ABDUL HARIS RANGKUTY, SE	Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	
59	RAHMATUL HAKIM, A. Md	Staf Kepaniteraan Banding	
60	NENGCEU SITI ROHIMAH, SHI	Staf Sub Bag. Kepegawaian dan TI	

61	ADE IRMA SURYANI, A. Md	Staf Sub Bag. Rencana Program dan Anggaran	
62	HADI PUTRA, A. Md	Staf Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan	
63	DINA MARISA, S.Kom	Staf Sub Bag. Kepegawaian dan TI	
64	MAMAT SUDRAJAT	Staf Kepaniteraan Banding	
65	NINING RAHAYUNI, SH	Staf Kepaniteraan Hukum	
66	DINA SAGITA, S. Sos	Staf Sub Bag. Kepegawaian dan TI	

2. Pengadilan Agama Jakarta Pusat

No.	Nama	Jabatan	Ket
1	Drs. H. MOCH. SUKKRI, SH. MH	Ketua	
2	Dra. Hj. ERNIDA BASRY, MH	Wakil Ketua	
3	Dra. NUR DJANNAH SYAF, SH. MH.	Hakim Madya Muda	MA-RI
4	Dra. Hj. NURROH SUNNAH, SH	Hakim Utama Muda	
5	Dra. ISTI'ANAH, MH	Hakim Madya Utama	
6	Hj. SUCIATI, SH. MH.	Hakim Madya Muda	
7	Drs. H. MUNADI, MH.	Hakim Madya Utama	
8	Dra. Hj. HAFSAH, SH	Hakim Utama Muda	
9	Dra. ALIA AL HASNA, M.H.	Hakim Madya Muda	
10	Drs. CHAERUDDIN, S.H., M.H	Hakim Madya Utama	
11	Drs. NAIM, S.H	Hakim Madya Utama	
12	Drs. H. AZKAR, S.H.	Hakim Madya Utama	
13	PAHRURROZI, SH, MH	Panitera	
14	SUHENDRA, S. Sos, M.M	Sekretaris	
15	RIYANCO SARI, S. Pd, M.M	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	

16	HARYANTI, SH	Kepala Sub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
17	TITI KHOTIMAH, SH	Kepala Sub Bag. Umum dan Keuangan	
18	GUNADI, SH. MH.	Panitera Muda Hukum	
19	IKRIMAWATI NINGSIH, S Ag. MH	Panitera Muda Permohonan	
20	Drs. MOHAMMAD TAUFIK, MH	Panitera Muda Gugatan	
21	Dra. MULYAHEFNI	Panitera Pengganti	
22	TRATNA DEWY, S.A.T., S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
23	ETIK KORNIAWATI, SH, MH	Panitera Pengganti	
24	MUHAMMAD IQBAL YUNUS, SHI, M.H.	Panitera Pengganti	
25	RITA SUSANTI, SH	Panitera Pengganti	
26	AHMAD IRFAN, S.H	Panitera Pengganti	
27	BUDY SETYO RINI, SH	Panitera Pengganti	
28	SAHADI, S.H	Panitera Pengganti	
29	FATHONY, SH	Panitera Pengganti	
30	Hj. SPA ICHTIYATUN, SH. MH	Panitera Pengganti	
31	SUMARYUNI, SH., MH.	Panitera Pengganti	
32	LUSIAH SARAGIH, S.Ag. MH	Panitera Pengganti	
33	MILHAN AFFANI ISTIQLAL, SH	Panitera Pengganti	
34	Hj. AISYAH HR, SH, MM	Panitera Pengganti	
35	Dra. RISNAWATY TAHIR, M.H.E.S	Panitera Pengganti	
36	ASEP YUSMAN BUHORI, S.Ag., MH.	Panitera Pengganti	
37	MUHAMMAD MUCHRAM	Jurusita	
38	MAGDALENA HUTAGAOL	Jurusita	
39	RUSLANI	Jurusita	
40	BUDI SUKIRNO	Jurusita	
41	WARDONO	Jurusita	
42	SRI MAHANUM	Jurusita Pengganti	
43	NURHIDAYAH MEGAWATI, SH.	Jurusita Pengganti	
44	NYAYU ASHA DELLA SATI, A. Md	Jurusita Pengganti	
45	ACHMAD FADLI, A. Md	Jurusita Pengganti	
46	FITA ALFIANY AR. PAPUTUNGAN, S. Kom	Jurusita Pengganti	
47	NURWILIS, S.H	Jurusita Pengganti/ KASIR	
48	HIRAM SULISTIO SIBARANI, S.	Jurusita Pengganti	

	Kom		
49	JUSRIAH RIEUWPASA, SHI	Jurusita Pengganti	
50	ZULQA REZNYKA RUM, SE., M.H	Jurusita Pengganti	
51	Drs. SAHARUN	Jurusita Pengganti	

3. Pengadilan Agama Jakarta Barat

No.	Nama	Jabatan	Ket
1	Drs. H. RUSMAN MALLAPI, SH., MH.	Ketua	
2	Dr. H. AMAM FAKHRUR, SH., MH.	Wakil Ketua	
3	Drs. H. UBAIDILLAH, M.Sy	Hakim Madya Utama	
4	CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.	Hakim Madya Pratama	MA-RI
5	Drs. H. ABDUL HADI, M.H.I	Hakim Madya Utama	
6	Dr. SULTAN, S.Ag., S.H.,M.H.	Hakim Madya Pratama	BAWAS
7	Drs. MUHAMMAD FAUZI ARDI, SH., M.H.	Hakim Madya Muda	MA-RI
8	Drs. H. ALI MAS'AD	Hakim Utama Muda	
9	Dra. Hj. NELIATI, SH	Hakim Utama Muda	
10	Drs. H. MAHDY USMAN, SH	Hakim Utama Muda	
11	Dra. Hj. ABSARI, MH.	Hakim Madya Utama	
12	Drs. FAJRI HIDAYAT, M.H	Hakim Madya Utama	
13	Drs. MULAWARMAN, S.H., M.H.	Hakim Utama Muda	
14	Dra. NURHAYATI, M.H	Hakim Madya Muda	
15	PRAPTININGSIH, S.H., M.H.	Hakim Madya Utama	
16	Drs. H. MHD. NASIR S., S.H, M.H.I	Hakim Madya Utama	
17	H. HAFANI BAIHAQI, Lc., S.H	Panitera	
18	YUNI WINARTI, SHI	Sekretaris	
19	Drs. SYAMSUDDIN, MM	Kepala Sub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
20	Drs. SAFE'I AGUSTIAN	Kepala Sub Bag. Umum dan Keuangan	
21	TRI JUMIYATI, SH	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
22	MOHAMMAD HAMBALI, SH	Panitera Muda Hukum	

23	Drs. H. ALI USMAN HASIBUAN, SHI	Panitera Muda Permohonan	
24	Hj. NISRIN, SH. MH.	Panitera Muda Gugatan	
25	SAPARANTO, SH., MH.	Panitera Pengganti	
26	JUNAEDI, S.H.	Panitera Pengganti	
27	DONNY SULISTIYANTORO, SH	Panitera Pengganti	
28	NYAMIANI, SH	Panitera Pengganti	
29	RIA AMALIA SARI, SH. MH	Panitera Pengganti	
30	SITI ROHMAH, SE. SH	Panitera Pengganti	
31	ABDUL HAMID, S Ag	Panitera Pengganti	
32	SYARIF MAULANA, SH, MH	Panitera Pengganti	
33	Drs. H. UJANG SODIK	Panitera Pengganti	
34	AHLAN, SH	Panitera Pengganti	
35	ENDANG BAHTIAR, SH. MH.	Panitera Pengganti	
36	M. YASIN, SH	Panitera Pengganti	
37	TOTO SUDARTO	Jurusita	
38	MELI YONDA, SH., MH.	Jurusita	
39	FRANS PAULUS ALFONS SOPACUA, SE	Jurusita	
40	ABDUL GHOFUR	Jurusita Pengganti	
41	TRI SUPAMI, SH	Jurusita Pengganti	
42	DIKA ANDRIAN, S. Kom, S.H.	Jurusita Pengganti	
43	IMAM SYA'BANI CHOIR, A.Md	Jurusita Pengganti	
44	BURHAMZAH	Jurusita Pengganti	
45	NAHARUDIN	Jurusita Pengganti	
46	DIDING AWALUDIN, SH	Jurusita Pengganti	
47	H. ASMADIH MAHMUD S, LC	Jurusita Pengganti	
48	ULFA FOUZIYAH, SHI	Jurusita Pengganti	
49	TRININGSIH SUBEKTI, S.H	Jurusita Pengganti	
50	PEPEN EFFENDI	Jurusita Pengganti	
51	LIDYA ANGGRAENI, SE	Jurusita Pengganti/ KASIR	
52	WIDYA FAUSIAH, SE, MH	Bendahara Penerima	

4. Pengadilan Agama Jakarta Timur

No.	Nama	Jabatan	Ket
1	Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H	Ketua	
2	Dr. AHMAD MUJAHIDIN, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3	Dra. Hj. NURONIAH, SH. MH	Hakim Madya Muda	
4	Drs. AHMAD ZAWAWI, MH	Hakim Madya Muda	

5	Drs. H. ISMET ILYAS, SH.	Hakim Utama Muda	
6	Drs. WAWAN ISKANDAR	Hakim Madya Muda	
7	Drs. JAJAT SUDRAJAT, SH., MH.	Hakim Madya Muda	
8	Drs. SYI'AR RIFAI	Hakim Madya Utama	
9	Drs. ASEP HIDAYAT, SH.	Hakim Utama Muda	
10	Drs. H. DJUWADI, SH., MH.	Hakim Utama Muda	
11	Dr. Hj. UPI KOMARIAH, S.H., M.H	Hakim Utama Muda	
12	Drs. H. IING SIHABUDIN, S.H., M.H	Hakim Madya Utama	
13	Drs. H. TATA TAOFIQURROHMAN, SH., MH.	Hakim Madya Utama	
14	Drs. H. HAMDAN, SH	Hakim Utama Muda	
15	Dra. Hj. TUTI ULWIYAH, M.H	Hakim Madya Utama	
16	Drs. AZHAR MAYANG, MHI	Hakim Utama Muda	
17	Drs. DADANG PRIATNA	Hakim Madya Utama	
18	Drs. H. M. GAPURI, S.H., M.H.	Hakim Utama Muda	
19	Drs. MUHAMMAD IQBAL, SH, M.H	Hakim Madya Muda	
20	H. IMANUDIN TIFLEN, SH., MH	Panitera	
21	ANDI SUBHI, S. Sos, MM	Sekretaris	
22	DEWI UTARI, SE., MM	Kepala Sub Bag. Umum dan Keuangan	
23	SUKARTA, S. Pd	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
24	MUHAMMAD ZUHRI	Kepala Sub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
25	Dra. IDA FITRIYANI	Panitera Muda Hukum	
26	RUSLAN, S H. MH	Panitera Muda Gugatan	
27	ASIS HIDAYANTI, SH, MH	Panitera Muda Permohonan	
28	Hj. SITI MAHBUBAH, S. Ag, MH.	Panitera Pengganti	
29	YUSPA, SH	Panitera Pengganti	
30	EVA ZULHAEFAH, SH	Panitera Pengganti	
31	RITA SYURIYAH, SH., MH.	Panitera Pengganti	
32	SITI FARADILA, Aps, SHI	Panitera Pengganti	
33	AISYAH THALIB, S.Ag	Panitera Pengganti	
34	HISNI MUBAROK, SHI	Panitera Pengganti	
35	MURTAKIYAH, SH	Panitera Pengganti	
36	Hj.QURRATUL 'AINI WARA HASTUTI, S. Ag., M.Hum	Panitera Pengganti	
37	OEBAYDILLAH, S. Ag	Panitera Pengganti	
38	AMRULLAH, SHI	Panitera Pengganti	

39	MOH. DUDI WAHYUDI KADANG, SH	Panitera Pengganti	
40	NURHAYATI, SH	Panitera Pengganti	
41	FITRI ASTINI, SH	Panitera Pengganti	
42	SAJIDAN, SH., MH.	Panitera Pengganti	
43	SUSILOWATI, SHI	Panitera Pengganti	
44	HAMIM NAF'AN, SHI	Panitera Pengganti	
45	IKBAL BASRY, SH	Panitera Pengganti	
46	RUNIE HANDAYANI, SH, MH	Panitera Pengganti	
47	NURAINI, SH. MH.	Panitera Pengganti	
48	HAMDANI, SHI	Panitera Pengganti	
49	SRIE NURHANDAYANI, S.H., M.H	Panitera Pengganti	
50	SIRAJUDDIN HARIS, SH	Jurusita	
51	PRIO RINANTO	Jurusita	
52	SELAMAT, S.H	Jurusita	
53	SUROYO, S.H.	Jurusita	
54	ZAINAL ARIFIN	Jurusita	
55	SRI KOMALASARI, S.H	Jurusita Pengganti/ KASIR	
56	VENY RAHMAWATY	Jurusita Pengganti	
57	MUHAMAD DIRWANSYAH RIDLAH	Jurusita Pengganti	
58	MARHAMAH	Jurusita Pengganti	
59	IMAN SUWARDI	Jurusita Pengganti	
60	KEMAS MUHAMMAD IRFAN, SE. SH	Jurusita Pengganti	
61	SANJAYA LANGGENG SANTOSO	Jurusita Pengganti	
62	ACHMAD MUBAROK, SHI	Jurusita Pengganti	
63	MUHAMMAD ARSYI	Jurusita Pengganti	
64	RADEN DESY PUSPASARI, A. Md	Jurusita Pengganti	
65	SABAR KUSWANTO	Jurusita Pengganti	
66	MONIKA SEPTI INDRIYANI, A. Md	Jurusita Pengganti	
67	HANDIKA IMOM, S. Kom, M.H	Jurusita Pengganti	
68	ANDI FAJARYANI, S.H	Jurusita Pengganti	
69	WINAHYA VEMBRIARSI, A. Md	Jurusita Pengganti	
70	RADEN YADI SUMIADI W, A. Md	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	
71	DANI NURWAHYUDI, SH, MH.	Staf Panmud Hukum	
72	ISMAIL	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan/ PMH	
73	RINA MARLINA, SE	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	
74	INAYATUS SALISYA, S.H	Staf Panmud Hukum	

5. Pengadilan Agama Jakarta Selatan

No.	Nama	Jabatan	Ket
1	Drs. H. UYUN KAMILUDDIN, SH., MH.	Ketua	
2	Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3	Drs. ZAENAL ARIFIN, S.H. M.H	Hakim Madya Muda	
4	Drs. YUSRAN, MH	Hakim Madya Utama	
5	Drs. H. JARKASIH, MH	Hakim Madya Muda	
6	Dra. Hj. FAUZIAH, MH	Hakim Madya Muda	
7	Drs. H. ACE MA'MUN, MH.	Hakim Madya Utama	
8	Drs. H. NUR YAHYA, M.H.	Hakim Madya Muda	
9	Drs. NUR MUJIB, MH	Hakim Utama Muda	
10	Drs. H. SYAFI'UDDIN, SH., MH.	Hakim Utama Muda	
11	Drs. ABDUL SHOMAD	Hakim Utama Muda	
12	Dr. H. FARID ISMAIL, S.H., M.H	Hakim Utama Muda	
13	Dra. NENENG SUSILAWATI, M.H	Hakim Madya Utama	
14	Drs. H. M. ANAS MALIK, S.H., M.H.	Hakim Madya Utama	
15	Drs. CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H., M.H	Hakim Madya Utama	
16	Drs. H. ILHAM SUHROWARDI, M.H	Hakim Madya Utama	
17	Drs. H. ABDUL JABAR, M.H.	Hakim Madya Utama	
18	AHMAD BISRI, S.H., M.H.	Hakim Madya Muda	
19	Dra. RADEN AYU HUSNA AR	Hakim Madya Muda	
20	SUFYAN, S.H.	Panitera	
21	DODO SURGANDHA, S.H., M.Pd	Sekretaris	
22	NUR KHAEFAH	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
23	DJUHDAN MUHAROM, SH., MM.	Kepala Sub Bag. Umum dan Keuangan	
24	NAJAMUDIN, S.Ag., SH., MH.	Kepala Sub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
25	NOVA ASRUL LUTFI, SH	Panitera Muda Hukum	
26	RAHYUNI, SH	Panitera Muda Permohonan	
27	NURLAELAH, SH	Panitera Muda Gugatan	
28	Hj. RAHMI, SH	Panitera Pengganti	
29	H. ZAINAL ABIDIN SOFYAN, S.H	Panitera Pengganti	
30	NENENG KURNIATI, S.Ag	Panitera Pengganti	
31	SITI MAKBULLAH, SH	Panitera Pengganti	

32	TITIEK INDRIATY, SH	Panitera Pengganti	
33	Drs. H. ISEP SADELI	Panitera Pengganti	
34	USTIANA PUTRI UTAMI, SH, MH	Panitera Pengganti	
35	ARIFIN, S.Ag., M.H.I.	Panitera Pengganti	
36	FAIZATUR RAHMAH, SH., MH.	Panitera Pengganti	
37	SUJIATI, SH, MH	Panitera Pengganti	
38	NUR HOLIA, SH, MH	Panitera Pengganti	
39	HASAN BAJURI, SHI	Panitera Pengganti	
40	ADI PRASWARA ARY, SH	Panitera Pengganti	
41	Dra. SITI NURHAYATI	Panitera Pengganti	
42	HIKMAYATI, SH	Panitera Pengganti	
43	ATIYAH SHAOFANAH, SH	Panitera Pengganti	
44	Hj. ANDAR ARYANI, SH. MH	Panitera Pengganti	
45	YULISMA, SH	Panitera Pengganti	
46	ROHIMAH, SH. MH	Panitera Pengganti	
47	Hj. ALFIAH YULIASTUTI, SH. MH.	Panitera Pengganti	
48	MUHLIS, SH, MH.	Panitera Pengganti	
49	RAHMAH SUFIYAH, SH. MH	Panitera Pengganti	
50	ZULHEMI, SH.	Panitera Pengganti	
51	SRI MULYATI, S Ag, MH	Panitera Pengganti	
52	OMBANG HASYIM ASHARI, S. Ag	Jurusita	
53	WISNO WIDJAJA, SE., MH.	Jurusita	
54	SUMARYONO	Jurusita	
55	A. ZAMRUN NAJIB, SE	Jurusita	
56	NINING WIDIAWATI	Jurusita Pengganti	
57	SUDIONO	Jurusita Pengganti	
58	AHMAD FURQONI, SE., SH., MH.	Jurusita Pengganti	
59	TATI JULIANTI	Jurusita Pengganti	
60	AJI DJUANDA RACHMAD	Jurusita Pengganti	
61	M. SAHID	Jurusita Pengganti	
62	KUNTHI SEPTYANTI, SH	Jurusita Pengganti	
63	MUHAMMAD YUNUS, SHI	Jurusita Pengganti	
64	MUHAMMAD SYAIFUR ROHIM, SEI	Jurusita Pengganti/ Bendahara Biaya Proses	
65	NANANG NURWAHYUDI, SH	Jurusita Pengganti/ Kasir	
66	ATUN, SH	Jurusita Pengganti	
67	DINI TRIANA, S. Sos, M.H	Jurusita Pengganti/ KASIR	
68	MOHAMMAD LUTFIE AWAL, SH	Jurusita Pengganti	
69	PAWIT	Jurusita Pengganti	
70	NURHASAN	Staf Sub Bagian	

		Umum dan Keuangan	
71	WINDARTI, SE. MH	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan/PPABP	
72	DEBI ANGGITA MARKHATUS SOLIKHAH, SE, MBA	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	
73	LIAN MERILAN, SE	Staf	
74	AIERIS ASTIASI, S.Si, M.H	Staf	
75	RIKA DELFA YONA, S.H.I	Staf	

6. Pengadilan Agama Jakarta Utara

No.	Nama	Jabatan	Ket
1	Drs. H. SAMSUL BAHRI, M.Hum.	Ketua	
2	Drs. H. PAET HASIBUAN, S.H., M.A.	Wakil Ketua	
3	Drs. NURUL HUDA, SH.	Hakim Madya Muda	MA-RI
4	Dra. Hj. NOOR JANNAH AZIZ, MH	Hakim Utama Muda	
5	Dra. HAULILLAH, MH	Hakim Utama Muda	
6	Dra. NURWATHON, SH. MH	Hakim Madya Muda	
7	Dra. Hj. MUKASIPA, MH	Hakim Madya Muda	
8	Dra. Hj. ROGAYAH, MH	Hakim Madya Utama	
9	Dra. Hj. HARMALA HARAHAP, S.H., M.H.	Hakim Madya Muda	
10	Drs. H. AFFANDI, MH	Hakim Madya Utama	
11	Drs. H. EKO NURAHMAT, M.H.	Hakim Madya Utama	
12	Drs. AGUS ABDULLAH, MH	Hakim Madya Muda	
13	Drs. WALJON SIAHAAN, S.H., M.H	Hakim Madya Utama	
14	SURYADI, S.Ag., S.H., M.H.	Hakim Madya Muda	
15	Hj. UMI SALAMAH TATROMAN, SH. MH	Panitera	
16	ADRI SYARIFUDDIN S, SH. MH.	Wakil Panitera	
17	WAHIDA MUSLIHAH, S Sos, MM	Sekretaris	

18	PURWANTO SIGIT WIBOWO, SE.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
19	AGUS TRIYOGO, SE.	Kepala Sub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
20	SITI FAJRIAH, SE.	Kepala Sub Bag. Umum dan Keuangan	
21	SYAMSUL RIZAL, SH	Panitera Muda Hukum	
22	H. BANGBANG SRI PANCALA, SH. Sp.I, MH.	Panitera Muda Permohonan	
23	RIFA'I, SH	Panitera Muda Gugatan	
24	Dra. Hj. ERMIYATI ARIFAH, MH	Panitera Pengganti	
25	H. KAMALUDDIN, SH. MH	Panitera Pengganti	
26	NONI SALMY, SH	Panitera Pengganti	
27	RONA HANDAYANI, SH	Panitera Pengganti/ KASIR	
28	H. MOHAMAD RUSLI, S.H	Panitera Pengganti	
29	WINDARTI, SH, M.BA	Panitera Pengganti	
30	MASTANAH, SH	Panitera Pengganti	
31	H. WALUYO, SH	Panitera Pengganti	
32	PATIMAH, S Ag	Panitera Pengganti	
33	RAKHMAT FAIZIN, SH. MH.	Panitera Pengganti	
34	MUHAMAD FAHAT, SH	Panitera Pengganti	
35	ZAELANI AZIS, SH	Panitera Pengganti	
36	DWIARTI YULIANI, SH. MH.	Panitera Pengganti	
37	IMRON ROSYIDI, SH	Panitera Pengganti	
38	AGUS WIYONO. A. MD	Jurusita	
39	ADE HUSNIATI	Jurusita	
40	FERIDIANSYAH PUTRA	Jurusita Pengganti	
41	HAFAS	Jurusita Pengganti	
42	YURI DITYA PUTRA FERNANDA, A. Md	Jurusita Pengganti/ Staf Umum dan Keuangan	
43	SYAMSUDDIN	Jurusita Pengganti	
44	JAENUDIN	Jurusita Pengganti	
45	ABDUL HARIS RAHMANSYAH, SE	Jurusita Pengganti	

46	MOCHAMAD TAUFIK, S. Ag	Jurusita Pengganti/ Staf Panmud Permohonan	
47	HARRIYONO, SHI	Jurusita Pengganti/ Staf Panmud Gugatan	
48	HERNASARI, SHI	Jurusita Pengganti/ Staf Panmud Hukum	
49	KERTI RIHMANING TIAS, SE	Jurusita Pengganti/ Staf Subbag Umum dan Keuangan	
50	RAHMIE HASFA, SHI	Jurusita Pengganti/ Staf Panitera Muda Permohonan	
51	AJI SUCIPTO, SH	Jurusita Pengganti/ Staf Subbag Perencanaan IT dan Pelaporan	
52	ANDI RISMAN, SE., MH	Jurusita Pengganti/ Staf Subbag umum dan Keuangan	
53	INDAH PERMATASARI, SH	Staf Sub Bag. Kepegawaian dan ORTALA	

1. Mutasi

No	JABATAN		JUMLAH	KET
	LAMA	BARU		
1	**Mutasi (masuk wil. PTA Jakarta):**			
	Ketua PTA Luar DKI Jakarta	Ketua PTA DKI Jakarta	1 orang	
	Ketua PTA Luar DKI Jakarta	Wakil Ketua PTA DKI Jakarta	1 orang	
	Ketua PA	Wakil Ketua PA Jakarta Timur	1 orang	
	Ketua PA	Hakim PA Jakarta Pusat	2 orang	
	Ketua PA	Hakim PA Jakarta Barat	1 orang	
	Ketua PA	Hakim PA Jakarta Timur	2 orang	
	Wakil Ketua PA	Hakim PA Jakarta Selatan	2 orang	
	Hakim PA	Hakim PA Jakarta Selatan	1 orang	

	Hakim PA	Hakim PA Jakarta Pusat	1 orang	
	Hakim PA	Hakim PA Jakarta Barat	2 orang	
	Hakim PA	Hakim PA Jakarta Timur	2 orang	
	Hakim PA	Hakim PA Jakarta Utara	1 orang	
2	**Mutasi (keluar wil. PTA Jakarta) :**			
	Hakim Tinggi PTA DKI Jakarta	Wakil Ketua PTA Luar DKI Jakarta	6 orang	
	Hakim Tinggi PTA DKI Jakarta	Hakim Tinggi PTA Luar DKI Jakarta	2 orang	
	Hakim PA Jakarta Utara	Wakil Ketua PA Luar DKI Jakarta	1 orang	
3	**Kepaniteraan Mutasi (Intern) :**			
	Wakil Panitera PA Jakarta Pusat	Panitera Muda Banding PTA DKI Jakarta	1 orang	
	PA Panitera Luar Jakarta	Panitera Pengganti PTA Jakarta	1 orang	
	Wakil Panitera PA Jakarta Timur	Panitera PA Jakarta Timur	1 orang	
	Panitera Muda Permohonan PA Luar Jakarta	Panitera Pengganti PA Jakarta	1 orang	
	Panitera Muda Hukum PA Jakarta Utara	Panitera Muda Permohonan PA Jakarta Barat	1 orang	
	Panitera Muda Permohonan PA Jakarta Selatan	Panitera Muda Hukum PA Jakarta Barat	1 orang	
	Panitera Muda Gugatan PA Jakarta Timur	Panitera Muda Permohonan PA Jakarta Timur	1 orang	
	Panitera Muda Permohonan PA Jakarta Timur	Panitera Muda Hukum PA Jakarta Timur	1 orang	
	Panitera Muda Permohonan PA Jakarta Utara	Panitera Muda Permohonan PA Jakarta Selatan	1 orang	
	Panitera Muda Gugatan PA Jakarta Pusat	Panitera Muda Hukum PA Jakarta Selatan	1 orang	
	Panitera Pengganti PA Jakarta Timur	Panitera Muda Gugatan PA Jakarta Selatan	1 orang	
	Kasi Administrasi Perkara Kasasi	Panitera Pengganti PA Jakarta Pusat	1 orang	
	Ka Sub Bag Tata Usaha Pada	Panitera Pengganti PA Jakarta Timur	1 orang	

	Sekretaris Bawas			
	Panitera Pengganti PA Jakarta Utara	Panitera Pengganti PA Jakarta Pusat	2 orang	
	Panitera Pengganti PA Jakarta Timur	Panitera Pengganti PA Jakarta Barat	2 orang	
	Panitera Pengganti PA Jakarta Selatan	Panitera Pengganti PA Jakarta Barat	1 orang	
	Panitera Pengganti PA Jakarta Pusat	Panitera Pengganti PA Jakarta Barat	2 orang	
	Panitera Pengganti PA Jakarta Pusat	Panitera Pengganti PA Jakarta Timur	6 orang	
	Panitera Pengganti PA Jakarta Selatan	Panitera Pengganti PA Jakarta Timur	4 orang	
	Panitera Pengganti PA Jakarta Utara	Panitera Pengganti PA Jakarta Timur	1 orang	
	Panitera Pengganti PA Jakarta Barat	Panitera Pengganti PA Jakarta Timur	1 orang	
	Panitera Pengganti PA Jakarta Timur	Panitera Pengganti PA Jakarta Selatan	8 orang	
	Panitera Pengganti PA Jakarta Barat	Panitera Pengganti PA Jakarta Selatan	3 orang	
	Ka Sub Bag Tata Usaha Pada Sekretaris Bawas	Panitera Pengganti PA Jakarta Timur	1 orang	
	Jurusita PA Jakarta Selatan	Jurusita PA Jakarta Timur	1 orang	
	Jurusita Pengganti PA Jakarta Selatan	Jurusita PA Jakarta Selatan	1 orang	
	Staf PA Jakarta Timur	Jurusita Pengganti PA Jakarta Timur	4 orang	
4	**Mutasi (Ekstern) :**			
	Panitera Pengganti PTA DKI Jakarta	Panitera Pengganti PTA Luar DKI Jakarta	1 orang	
	Juru Sita PA Jakarta Pusat	Juru Sita PA Luar DKI Jakarta	1 orang	
5	**Mutasi (Intern)**			
	Staf PA Jakarta Barat	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PA Jakarta Barat	1 orang	
	Staf PA Jakarta Timur	Juru Sita Pengganti PA Jakarta Timur	4 orang	
	Staf PN Rembang	Staf PA Jakarta Timur	1 orang	
	Jurusita Pengganti PA Luar Jakarta	Staf PA Jakarta Selatan	2 orang	

	Staf Kapaniteraan MA RI	Staf PA Jakarta Selatan	1 orang	

2. Promosi :

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah mempromosikan pejabat/pegawai sebagai berikut :

a. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur menjadi Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dipromosikan menjadi Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Pusat
c. Staf Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dipromosikan menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
d. Staf Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipromosikan menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan pada Pengadilan Agama Jakarta Barat
e. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Utara menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
f. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat dipromosikan menjadi Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Utara

3. Pensiun

a. Kenaikan Pangkat Pengabdian/ Batas Usia Pensiun (BUP) Usul BUP tahun 2017 sebanyak 8 (delapan) orang dengan Kenaikan Pangkat Pengabdian sebanyak 4 (empat) orang
b. Pensiun Janda/ Duda
c. Usul Pensiun Janda/Duda tahun di tahun 2017 sebanyak 1 (satu) orang
d. Masa Persiapan Pensiun (MPP)

e. Tidak ada yang mengajukan MPP ditahun 2017

f. Pemberhentian sebagai PNS

g. Usul Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri di tahun 2017 sebanyak 1 (satu) orang

4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yg telah mengikuti Diklat)

4.1 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

NO.	NAMA	KEGIATAN		PENYELENGGARA
1	Drs. H. M. YAMIN AWIE, S.H., M.H	1	UNDANGAN PESERTA SEMINAR PENYEMPURNAAN STANDAR BAS & FORMAT PUTUSAN PA	DIRJEN BADILAG
		2	WORKSHOP PENYUSUNAN PETA JALAN MANAJEMEN SDM BERBASIS KOMPETENSI	SEKMA RI
2	Dr. Hj. DJAZIMAH MUQODDAS, S.H., M. Hum	1	SOSIALISASI PENGELOLAAN PENGADUAN SELURUH PENGADILAN TINGKAT BANDING SEWILAYAH INSPEKTUR WILAYAH II, SEBAGIAN INSPEKTUR WILAYAH III, DAN SEBAGIAN INSPEKTUR WILAYAH IV	BAWAS MA RI
3	Drs. H. M. NADJMI, S.H., M.Hum	1	SEMINAR TENTANG PROSPEK PROFESI HAKIM & TANTANGAN KOMPETENSI LULUSAN SYARIAH & HUKUM PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DI INDONESIA	UIN SYARIF HIDAYATULLAH
4	Dr. H. KOMARI, SH . M. Hum	1	SEMINAR TENTANG PROSPEK PROFESI HAKIM & TANTANGAN KOMPETENSI LULUSAN SYARIAH & HUKUM PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DI INDONESIA	UIN SYARIF HIDAYATULLAH
5	Drs. ABD. ROZAK BACHTIAR HR, S.H., M.H.	1	PELATIHAN MEDIATOR BERSERTIFIKAT	PTA JAWA BARAT
6	Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.	1	SEMINAR TENTANG PROSPEK PROFESI HAKIM & TANTANGAN KOMPETENSI LULUSAN SYARIAH & HUKUM PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DI INDONESIA	UIN SYARIF HIDAYATULLAH
7	Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, S.H., M.H.	1	PELATIHAN MEDIATOR BERSERTIFIKAT	PTA JAWA BARAT
		2	UNDANGAN SEMINAR BULANAN EKONOMI SYARI'AH EDISI OKTOBER 2017	KETUA UMUM MSYRAKAT EKONOMI SYARI'AH

8	Drs. H. LUTFI, S.H., M.H	1	UNDANGAN SEMINAR KEBANGSAAN TEMA MEMPERKOKOH KEADILAN & KEDAULATAN RAKYAT	DIREKTUR EKSEKUTIF LBH IKATAN CENDIKIAWAN
9	Drs. H. IBRAHIM KARDI, SH., M.Hum	1	SEMINAR TENTANG PROSPEK PROFESI HAKIM & TANTANGAN KOMPETENSI LULUSAN SYARIAH & HUKUM PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DI INDONESIA	UIN SYARIF HIDAYATULLAH
10	Drs. A.CHOIRI,SH.,MH	1	SEMINAR TENTANG PROSPEK PROFESI HAKIM & TANTANGAN KOMPETENSI LULUSAN SYARIAH & HUKUM PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DI INDONESIA	UIN SYARIF HIDAYATULLAH
11	Drs. H. UCE SUPRIADI, MH	1	PELATIHAN MEDIATOR BERSERTIFIKAT	PTA JAWA BARAT
12	Drs. H. AHSIN ABDUL HAMID, S.H.	1	SEMINAR TENTANG PROSPEK PROFESI HAKIM & TANTANGAN KOMPETENSI LULUSAN SYARIAH & HUKUM PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DI INDONESIA	UIN SYARIF HIDAYATULLAH
13	Dr. H. AHMAD FATHONI, S.H., M.Hum	1	SEMINAR TENTANG PROSPEK PROFESI HAKIM & TANTANGAN KOMPETENSI LULUSAN SYARIAH & HUKUM PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN DI INDONESIA	UIN SYARIF HIDAYATULLAH
		2	UNDANGAN SEMINAR BULANAN EKONOMI SYARI'AH EDISI OKTOBER 2017	KETUA UMUM MSYRAKAT EKONOMI SYARI'AH
14	Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.	1	CALON PESERTA TOT/ TENAGA AUDITOR SISTEM MANAJEMEN MUTU	DIRJEN BADILAG MA RI
		2	UNDANGAN SBG PESERTA SEMINAR BAKOHUMAS	MAHKAMAH AGUNG RI
		3	PEMANGGILAN PESERTA PELATIH ASESSOR PENJAMINAN MUTU	DIRJEN BADILAG MA RI
15	Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, M.H.	1	PEMANGGILAN PESERTA PROGRAM PELATIHAN BAHASA ARAB & HUKUM SYARI'AH	KAMPUS LIPIA JAKARTA
16	H. SAJADI, SH	1	UNDANGAN SOSIALISASI PENGELOLAAN HIBAH, SAKIP & STRANAS P4GN	MAHKAMAH AGUNG RI
17	Drs. H. ANDI KURNIAWAN, M.M	1	UNDANGAN KEGIATAN SOSIALISASI DI BID. PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA THN ANGGARAN 2017	KANWIL DJKN DKI JAKARTA
		2	PEMBINAAN DAN KONSULTASI PENYUSUNAN PROGRAM ANGGARAN 2018	BUA MA RI

		3	CALON PESERTA TOT/ TENAGA AUDITOR SISTEM MANAJEMEN MUTU	DIRJEN BADILAG MA RI
		4	PEMANGGILAN PESERTA PEMBINAAN LANJUTAN SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PA	PUSLITBANG DIKLAT KUMDIL MA RI
		5	UNDANGAN SOSIALISASI PENGELOLAAN HIBAH, SAKIP & STRANAS P4GN	MAHKAMAH AGUNG RI
18	H. FAUZAN, SH. MH. MM	1	PEMBINAAN DAN KONSULTASI PENYUSNAN PROGRAM ANGGARAN 2018	BUA MA RI
		2	UNDANGAN PEMANGGILAN PESERTA PELATIHAN BIMTEK PENGELOLAAN DATABASE PEGAWAI	MAHKAMAH AGUNG RI
		3	UNDANGAN FGD PEMBERHENTIAN & PENEGAKAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN MA RI	MAHKAMAH AGUNG RI
19	ANIMAR	1	UNDANGAN KEGIATAN SOSIALISASI TATA CARA PEMBAYARAN PERJANJIAN DLM VALUTA ASING	KPPN JAKARTA VI
		2	SOSIALISASI PENATA USAHAAN BARANG PERSEDIAAN	BUA MA RI
		3	SOSIALISASI SISTEM PERBENDAHARAAN & ANGGARAN NEGARA (SPAN)	BANK BJB
		4	UNDANGAN SOSIALISASI MONITORING & EVALUASI LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2017	KPPN JAKARTA VI
		5	UNDANGAN MENGIKUTI BIMTEK APLIKASI SUPPLIER & KONTRAK 2017	KPPN JAKARTA VI
		6	UNDANGAN SOSIALISASI LANGKAH-LANGKAH AKHIR TH ANGGARAN 2017	DIRJEN PERBENDAH ARAAN
20	RIZAL MUTAQIN, SE. MM	1	SOSIALISASI PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA ANTAR KUASA PENGGUNA BARANG	BUA MA RI
		2	CALON PESERTA TOT/ TENAGA AUDITOR SISTEM MANAJEMEN MUTU	DIRJEN BADILAG MA RI
		3	PEMANGGILAN PESERTA PEMBINAAN LANJUTAN SERTIFIKASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PA	PUSLITBANG DIKLAT KUMDIL MA RI
21	UNA MUNASIR FATAH, ST	1	UNDANGAN SOSIALISASI PENGELOLAAN HIBAH, SAKIP & STRANAS P4GN	MAHKAMAH AGUNG RI

22	ELVIRA AMEGIA,M.Kom	1	PEMANGGILAN PESERTA UNTUK PELATIHAN ANALISA BEBAN KERJA TAHUN 2017	MAHKAMAH AGUNG RI
		2	UNDANGAN PEMANGGILAN PESERTA PELATIHAN BIMTEK PENGELOLAAN DATABASE PEGAWAI TAHUN 2017	MAHKAMAH AGUNG RI
		3	PEMANGGILAN PESERTA APLIKASI BACKUP SIKEP	BADILAG MA RI
23	FAHRUDDIN, SH	1	RAPAT PENYUSUNAN ANALISA JABATAN	MA RI
		2	RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERKARA	BUA MA RI
24	AKHMAD SAHID, SH	1	CALON PESERTA TOT/ TENAGA AUDITOR SISTEM MANAJEMEN MUTU	DIRJEN BADILAG MA RI
25	ABDULLAH SH. MH.	2	CALON PESERTA TOT/ TENAGA AUDITOR SISTEM MANAJEMEN MUTU	DIRJEN BADILAG MA RI
26	ADAY, S.Ag., M.H.	1	PEMANGGILAN PESERTA BIMTEK TOT SIPP TAHAP I	DIRJEN BADILAG
		2	UNDANGAN PESERTA PELAKSANAAN TOT SIPP TAHAP II PD 4 LINGKUNGAN PERADILAN SLRUH INDONESIA TA 2017	MAHKAMAH AGUNG RI
28	ADE IRMA SURYANI, A. Md	1	UNDANGAN MENGHADIRI SOSIALISASI e-KATALOG LKPP	PT. AIRMAS PERKASA
		2	SOSIALISASI & BIMTEK PENILAIAN KEMBALI BMN	DJKN DKI JAKARTA
29	RIZCKY FALLAH ROMADHON N	1	UNDANGAN BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KPPN JAKPUS
		2	UNDANGAN BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TK. UAPPA-W TH ANGGARAN 2016	KANWIL DITJEN PERBENDAH ARAAN DKI JKT
		3	UNDANGAN BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TK. UAPPA-W TH ANGGARAN 2017	KANWIL DITJEN PERBENDAH ARAAN DKI JKT
		4	UNDANGAN MENGIKUTI BIMTEK APLIKASI SUPPLIER & KONTRAK 2017	KPPN JAKARTA VI
30	NENGCEU SITI ROHIMAH, SH	1	PEMANGGILAN PESERTA UNTUK PELATIHAN ANALISA BEBAN KERJA TAHUN 2017	MAHKAMAH AGUNG RI
31	YULITA FITRI HARTATY, SE	1	UNDANGAN SOSIALISASI MONITORING & EVALUASI LANGKAH@ STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER TA 2017	KPPN JAKARTA VI

		2	UNDANGAN WORKSHOP FINALISASI PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI PEJABAT PERBENDAHARAAN NON BENDAHARA TH 2017	DJPB
		3	UNDANGAN SOSIALISASI AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TA 2017	KPPN
		4	PEMANGGILAN PESERTA BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL	PUSLITBANG DIKLAT KUMDIL MA RI
32	RESTIANA IRWANTI, A.Md	1	BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KPPN JAKPUS
		2	KEGIATAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016 BERBASIS AKRUAL	KABUA MA-RI
		3	SOSIALISASI PENATA USAHAAN BARANG PERSEDIAAN	BUA MA RI
		4	BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TK. UAPPA-W TH ANGGARAN 2016	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN DKI JKT
		5	SOSIALISASI PROGRAM TASPEN	KPPN JAKARTA VI
		6	MONITORING PELAPORAN PNBP	PA JAKARTA PUSAT
		7	SOSIALISASI SISTEM PERBENDAHARAAN & ANGGARAN NEGARA (SPAN)	BANK BJB
		8	UNDANGAN WORKSHOP FINALISASI PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI PEJABAT PERBENDAHARAAN NON BENDAHARA TH 2017	DJPB
		9	PERMINTAAN NAMA PESERTA KEGIATAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN MA-RI SEMESTER I TH 2017	MAHKAMAH AGUNG RI
		10	UNDANGAN SOSIALISASI AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TA 2017	KPPN
		11	UNDANGAN MENGIKUTI BIMTEK APLIKASI SUPPLIER & KONTRAK 2017	KPPN JAKARTA VI
33	ABDUL HARIS RANGKUTY, SE	1	UNDANGAN KEGIATAN SOSIALISASI TATA CARA PEMBAYARAN PERJANJIAN DLM VALUTA ASING	KPPN JAKARTA VI
		2	BIMBINGAN TEKNIS FOTOGRAFI	BUA MA RI
		3	UNDANGAN SEBAGAI BIMTEK KEHUMASAN	MAHKAMAH AGUNG RI

		4	UNDANGAN MENGHADIRI SOSIALISASI e-KATALOG LKPP	PT. AIRMAS PERKASA
		5	UNDANGAN WORKSHOP FINALISASI PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI PEJABAT PERBENDAHARAAN NON BENDAHARA TH 2017	DJPB
34	MUNASIRAH, SE	1	SOSIALISASI PROGRAM TASPEN	KPPN JAKARTA VI
		2	SOSIALISASI SISTEM PERBENDAHARAAN & ANGGARAN NEGARA (SPAN)	BANK BJB
		3	UNDANGAN SOSIALISASI MONITORING & EVALUASI LANGKAH@ STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER	KPPN JAKARTA VI
35	HADI PUTRA, A. Md	1	KEGIATAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016 BERBASIS AKRUAL	KABUA MA-RI
		2	SOSIALISASI PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA ANTAR KUASA PENGGUNA BARANG	BUA MA RI
		3	BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2017	KEMENTERIAN KEUANAGAN KPKNL JAKARTA I
		4	SOSIALISASI PENATA USAHAAN BARANG PERSEDIAAN	BUA MA RI
		5	BIMTEK REKONSILIASI KEGIATAN PENILAIAN KEMBALI BMN	DJKN DKI JAKARTA
36	DINA SAGITA, S.sos	1	DIKLAT BENDAHARA TAHUN ANGGARAN 2017	PUSLITBANG DIKLAT KUMDIL MA RI
37	DINA MARISA, S.Kom	1	PEMANGGILAN PESERTA BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL	PUSLITBANG DIKLAT KUMDIL MA RI
38	EDY NATA SADINDA	1	BIMBINGAN TEKNIS FOTOGRAFI	BUA MA RI

4.2 Pengadilan Agama Jakarta Pusat

No	Nama	Jabatan / Gol	Jenis Diklat	Tanggal Diklat	Lama Diklat	Tempat

1	Fita Alfiany AR	Penata (III/c)	Rekonsiliasi dan Akurasi	25-1-2017		Dirjen Badilag
	Paputungan, S.Kom		Pelaporan Keuangan DIPA		3 Hari	
2	Hiram Sulistio Sibarani, S.Kom.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Rekonsiliasi dan Akurasi Data Pelaporan Keuangan	25-1 2017	3 Hari	Dirjen Badilag
3	Suhendra, S.Sos., M.M	Sekretaris (IV/a)	Kegiatan Pembinaan & Konsultasi Penyusunan Program Anggaran 201	22 -2- 2017	3 Hari	Kepala Badan Urusan Administrasi
4	Dra. Isti'anah, M.H	Hakim (IV/c)	Rencangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Panduan Penanganan Perkara Perempuan dengan Perspektif	14 Maret 2017	2 Hari	Catalis-Melange Room, Hotel Alila Pecenongan
5	Muhammad Iqbal Yunus S.H.I., MH.	Panitera Pengganti (III/c)	Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis	21 Maret 2017	4 Hari	Hotel Horison, Bekasi Jawa Barat
6	Drs. H. Moch. Sukkri, SH., MH	Ketua (IV/d)	Undangan Rapat Koordinasi	13 Maret 2017	1 Hari	Aula Pengadilan Agama Jakarta Pusat

4.3 Pengadilan Agama Jakarta Barat

No.	N A M A	Gol. Ruang	JABATAN	TANGGAL DIKLAT	KETERANGAN
1.	Drs. H. Ubaidillah, M.Sy	IV/d	Hakim Utama Muda	15 s.d 30 Mei 2017	Diklat Sertifikasi Mediasi Hakim Peradilan Agama
2.	Lidya Anggraeni, S.E.	III/c	Jurusita Pengganti	29 s.d 31 Agustus 2017	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional
3.	Diding Awaludin, S.H.	III/b	Jurusita Pengganti	29 s.d 31 Agustus 2017	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional
4.	Widya Fausiah, S.E., M.H.	III/b	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	29 s.d 31 Agustus 2017	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional
5.	Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.	IV/d	Hakim Utama Muda	23 Okt. s.d 7 Nov. 2017	Diklat Sertifikasi Ekonomi Syariah Bagi Hakim Tk.I
6.	Dika Andrian, S.Kom, S.H.	III/b	Jurusita Pengganti	30 Oktober s.d 4 November 2017	Pelatihan Teknis Fungsional Jurusita/JSP Peradilan Agama
7.	Saparanto, S.H., M.H.	IV/a	Panitera Pengganti	13 s.d 18 November 2017	Diklat Teknis Fungsional Panitera/PP Lingkungan Peradilan Agama
8.	Syarif Maulana, S.H., M.H.	III/b	Panitera Pengganti	13 s.d 18 November 2017	Diklat Teknis Fungsional Panitera/PP Lingkungan Peradilan Agama

4.4 Pengadilan Agama Jakarta Timur

No	Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan	Peserta Partisipatif	Waktu Pelaksanaan
1	Penyelesaian Pedoman Standar Manajemen Mutu	Teknis	H. Ahmad Majid, SH., MH	16-18 Januari 2017
2	Finalisasi Pedoman Standar Manajemen Mutu	Teknis	H. Ahmad Majid, SH., MH	31 Jan – 2 Februari 2017
3	Penyusunan Kurikulum & Silabus DIklat Sertifikasi Ekonomi Syariah	Teknis	Dr. Ahmad Mujahidin, SH., MH	13-15 Februari 2017
4	Bimtek Penyusuanan Pengawasan & Pengendalian BMN 2017	Teknis	Muhammad Arsyi	31 Maret 2017
5	Diklat Bendahara TA. 2017	Teknis	Winahya Vembriarsi, A.Md	5-9 Juni 2017
6	Bimtek Fotografi	Teknis	Handika Imom, S.Kom., MH	13-14 Juni 2017
7	Pelatihan Pra Rekonsiliasi	Teknis	Muhammad Arsyi	21 Juni 2017
8	Bimbingan Teknis Kehumasan	Teknis	Hisni Mubarok, SHI	19-20 Juni 2017
9	Konsolidasi Laporan Keuangan	Teknis	- Achmad Mubarok, SHI - Muhammad Arsyi	4 Juli 2017
10	Diklat Kepemimpinan Tk. III	Teknis	Andi Subhi, S.Sos., MM	18 Juli – 25 November 2017
11	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional MARI	Teknis	-Hisni Mubarok, SHI - Andi Fajaryani, SH - M. Dirwansyah R - Ismail	29 – 31 Agustus 2017
12	Bimbingan Teknis Penilaian Kembali BMN	Teknis	Muhammad Arsyi	15 September 2017
13	Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi	Teknis	Drs. H. Iing Sihabudin, SH., MH	22 Oktober – 8

	Syariah 2017			November 2017
14	Diklat JS/JSP Seluruh Pengadilan Di Indonesia	Teknis	- Suroyo, SH - Sabar Kuswanto	30 Oktober – 4 November 2017
15	Pelatihan Pemaknaan KEPPH	Teknis	Dr. Ahmad Mujahidin, SH., MH	13-17 November 2017
16	Bimbingan Teknis Rekonsisliasi Kegiatan Penilaian Kembali	Teknis	Muhammad Arsyi	4 Desember 2017

4.5 Pengadilan Agama Jakarta Selatan

NO	NAMA/ WAKTU DIKLAT	PESERTA
A. DIKLAT TEKNIS		
1	FGD Untuk Pengembangan Modul Diklat Pimpinan Pengadilan 14 Juli 2017	Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H.
2	Pembinaan Teknis Yustisial Bagi Para Hakim PA Se- Wilayah DKI/ 21 Juli 2017	Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H., dan seluruh Hakim
3	Eksistensi dan Dinamika Pembaharuan Kesektretariatan dan Kepaniteraan Peradilan/ 24 Mei 2017	Sufyan, S.H.
4	Sosialisasi Perma No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah/ 7 Februari 2017	Drs. Cece Rukmana Ibrahim, S.H., M.H.
5	Pelatihan KEPPH Angkata X/ 13-17 November 207	Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H.
6	Diklat Teknis Fungsional Panitera / PP Lingkungan Pengadilan Agama Seluruh Indonesia / 13-17 November 2017	Hasan Bajuri, S.H.I.
8	Diklat Teknis Fungsional Juru Sita / Juru Sita Pengganti Lingkungan Pengadilan Agama Seluruh Indonesia / 30 Oktober – 3 November 2017	Sumaryono
9	Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Seluruh Indonesia / 23 Oktober 2017	Dra. Raden Ayu Husna AR
10	TOT Pimpinan Pengadilan Lanjutan /	Hj. Atifaturrahniyaah, S.H.,

	9-12 Oktober 2017	M.H.
B. NON TEKNIS		
1	Pelatihan Rekonsiliasi (Pra Rekon)/ 21 Juni 2017	un, S.H.., M.H. dan Lian Merilan, S.E.
2	Bimbingan Teknis Kehumasan/ 19-20 Juni 2017	an Merilan, S.E.
3	Bimbingan Teknis Fotografi / 13-14 Juni 2017	ohammad Lutfie Awal, S.H.
4	Diklat Bendahara Tahun Anggaran 2017/ 5-9 Juni 2017	indarti, S.E., M.H., MBA.
5	Bimtek Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Tahun 2017/ 27-31 Maret 2017	un, S.H., M.H,.
6	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/ Lembaga/ 17 Januari 2017	ebi Anggita Markhatus Solikhah, S.E., MBA
7	Training Assesor Internal SAPM PA Se- DKI Jakarta/ 13 Oktober 2017	- Dodo Surgandha, S.H., M.Pd. - Sufyan, S.H. - Najamudin, S.Ag., S.H., M.H.
8	Bimtek Penilaian Kembali BMN / 15 September 2017	an Merilan, S.E.

4.6 Pengadilan Agama Jakarta Selatan

No	Nama	Jabatan	Jenis Diklat	Tanggal Diklat	Lama Diklat	Tempat
1	Kerti Rihmaningtyas, SE	JSP	Diklat Bendahara	4 Juni 2017	5 Hari	Balitbang
2	Mastahan, SH	PP	Bintek Kehumasan	19 Juni 2017	2 Hari	Binkum & Humas MA RI
3	DR. H. Samsul Bahri, M.Hum	Ketua	Bintek Yustisial	21 FEb 2017	1 Hari	PTA Jakarta

4	DR. H. Paet Hasibuan,MA	Wakil Ketua	Bintek Yustisial	21 FEb 2017	1 Hari	PTA Jakarta
5	Drs. Hj. Noorjanah Aziz, MH	HAKIM	Bintek Yustisial	21 FEb 2017	4 Hari	PTA Jakarta
6	Dra. Hj. Haulillah	HAKIM	Bintek Yustisial	21 FEb 2017	1 Hari	PTA Jakarta
7	DR. Waljon Siahaan, SH, MH.	HAKIM	Bintek Yustisial	21 FEb 2017	1 Hari	PTA Jakarta
8	Dra. Mukasipa, MH.	HAKIM	Bintek Yustisial	21 FEb 2017	1 Hari	PTA Jakarta
9	Dra. Hj. Harmala Harahap, MH	HAKIM	Bintek Yustisial	21 FEb 2017	1 Hari	PTA Jakarta
10	DR H. Afandi, MH.	HAKIM	Bintek Yustisial	21 FEb 2017	1 Hari	PTA Jakarta
11	Kerti Rihmaningtyas, SE	JSP	Bintek Jakarta Fungsional	29 Okt 2017	3 Hari	Biro Kepegawaian MA-RI
12	Rona Handayani, SH	PP	Diklat Teknis Fungsional	29 Okt 2017	1 Hari	Diklat Kumdil
13	Jaenudin	JSP	Diklat Teknis Fungsional	29 Okt 2017	1 Hari	Diklat Kumdil
14	Aji Sucipto, SH	JSP	Diklat Teknis Fungsional	29 Okt 2017	1 Hari	Diklat Kumdil
15	DR. H. Paet Hasibuan, MA	WAKIL	Kode Etik dan Prilaku Hakim	21 FEb 2017	5 Hari	Komisi Yudisial
16	Rahmad Faizin, SH	PP		29 Okt 2017	1 Hari	Diklat Kumdil
17	Ferdiansyah Putra	JSP		29 Agt 2017	3 Hari	
18	DR. Hj. Kukasipa	HAKIM	Akses Gender Perempuan Terhadap Hukum			Pusat Diklat MA-RI

B. Penyelesaian Perkara

1. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada awal tahun 2017 mempunyai sisa perkara banding tahun 2016 sebanyak 7 perkara. Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2017 sebanyak 146 perkara. Pada tahun 2017 perkara banding yang diputus sebanyak 152 perkara sehingga ada 1 perkara yang belum diputus dikarenakan ada Putusan Sela yang perkaranya berasal dari Pengadilan Agama Jakarta Timur.

1.1 Jumlah sisa perkara yang diputus sebanyak 152 perkara

Sisa perkara tahun 2016	:	7 perkara
Perkara yang diterima pada tahun 2017	:	146 perkara
Jumlah sisa perkara pada tahun 2017 menjadi	:	**153 perkara**
Perkara yang telah diputus pada tahun 2017	:	**152 perkara**

1.2 Jumlah sisa perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 151 perkara

Jumlah sisa perkara yang diputus pada tahun 2017	:	**152 perkara**
Perkara Tahun 2017 yang diputus tepat waktu	:	**151 perkara**
Perkara Tahun 2017 yang diputus tidak tepat waktu	:	**1 perkara**

Waktu penyelesaian perkara	Jumlah
Penyelesaian perkara kurang dari 1 bulan	73 perkara
Penyelesaian perkara kurang dari 2 bulan	69 perkara
Penyelesaian perkara kurang dari 3 bulan	9 perkara
Penyelesaian perkara lebih dari 3 bulan	1 perkara
Jumlah	152 perkara
Putusan yang dikuatkan	114 perkara
Putusan yang dibatalkan	32 perkara

Putusan yang di NO	4 perkara
Putusan yang ditolak	0 perkara
Putusan yang dicabut	2 perkara
Sisa perkara akhir tahun	**1 perkara**

2. Pengadilan Agama se-DKI Jakarta

Pengadilan Agama se-DKI Jakarta terdiri dari 5 Satker yaitu:

- Pengadilan Agama Jakarta Pusat
- Pengadilan Agama Jakarta Barat
- Pengadilan Agama Jakarta Timur
- Pengadilan Agama Jakarta Selatan
- Pengadilan Agama Jakarta Utara

Pengadilan Agama se-DKI Jakarta pada akhir tahun sebelumnya mempunyai sisa perkara berjumlah 3.931 perkara. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama se wilayah DKI Jakarta menerima perkara sejumlah 18.721 perkara. Sehingga jumlah perkara keseluruhan berjumlah 22.652 perkara.

Perkara diputus sejumlah 18.626 dan sisa perkara yang belum diputus berjumlah 4.026 perkara. Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama se-DKI Jakarta yang tepat waktu berjumlah 12.463 perkara.

Perkara Pengadilan Agama se-DKI Jakarta yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 146 perkara, Kasasi sebanyak 56 perkara dan Peninjauan Kembali sebanyak 20 perkara. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah 18.404 perkara. Perkara Pengadilan Agama se-DKI Jakarta yang dimediasi berjumlah 3.416 perkara, dengan penyelesaian mediasi “berhasil” adalah 376 perkara

1. Jumlah sisa perkara yang diputus sebanyak 18.626 perkara

Sisa perkara tahun 2016	:	3.931 perkara

Perkara yang diterima pada tahun 2017	:	18.721 perkara
Jumlah sisa perkara pada tahun 2017	:	22.652 perkara
Perkara yang telah diputus pada tahun 2017	**:**	**18.626 perkara**

2. Jumlah sisa perkara yang diputus tepat waktu 12.463 perkara

Jumlah sisa perkara yang diputus pada tahun 2017	**:**	**18.626 perkara**
Perkara Tahun 2017 yang diputus tepat waktu	**:**	**12.463 perkara**
Perkara Tahun 2017 yang diputus tidak tepat waktu	**:**	**6.163 perkara**
Sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2017	**:**	**4.026 perkara**

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya banding, kasasi dan PK

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding	:	146 perkara
Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	:	56 perkara
Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum PK	:	20 perkara
Sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	**:**	**22.430 perkara**

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

- Pengadilan Agama Jakarta Pusat

DATA MEDIASI 2017 PA Jakarta Pusat

No	Proses/	Jumlah	Persentas
1	Yang berhasil	19 perkara	7 %
2	Yang tidak berhasil	270 perkara	93 %
Jumlah :		289 perkara	100%

- Pengadilan Agama Jakarta Barat

DATA MEDIASI 2017 PA Jakarta Barat

No	Proses/	Jumlah	Persentas
1	Yang berhasil	27 perkara	5.12 %
2	Yang tidak berhasil	500 perkara	94.88 %
Jumlah :		527 perkara	100%

- Pengadilan Agama Jakarta Timur

DATA MEDIASI 2017 PA Jakarta Timur

No	Proses/	Jumlah	Persentas
1	Yang berhasil	37 perkara	3.91 %
2	Yang tidak berhasil	933 perkara	96.19 %
Jumlah :		970 perkara	100%

- Pengadilan Agama Jakarta Selatan

DATA MEDIASI 2017 PA Jakarta Pusat

No	Proses/	Jumlah	Persentas
1	Yang berhasil	18 perkara	1.73 %
2	Yang tidak berhasil	1.021 perkara	98.27 %
Jumlah :		1.039 perkara	100%

- Pengadilan Agama Jakarta Utara

DATA MEDIASI 2017 PA Jakarta Pusat

No	Proses/	Jumlah	Persentas
1	Yang berhasil	237 perkara	51,85%
2	Yang tidak berhasil	170 perkara	37,19%
Jumlah :		457 perkara	100%

C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

a. Gedung Kantor .

Gedung kantor pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI Jakarta hingga tahun 2017 yang telah memenuhi standar prototype Mahkamah Agung RI, sebagaimana tabel berikut:

Data Gedung Kantor Pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

NO	Satuan Kerja	Prototype Gedung Kantor	
		2016	2017
1	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta		
	 Luas Tanah : 3.021 M² Luas Bangunan : 2.006 M²	Belum Masih pinjam pakai milik PEMDA DKI SK Gubernur No : 843/073.541 tanggal 24 Maret 2014 SK Gubernur tentang perpanjangan pinjam pakai Nomor: 952 Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014. SK BPKD tentang perpanjangan gedung kantor Nomor 022-1 tertanggal 29 Agustus 2014	Belum Masih pinjam pakai Milik PEMDA DKI SK Gubernur DKI Jakarta No: 2793 tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang perpanjangan pemenfaatan BMN berupa bangunan yang terletak di Jalan Radin Inten II No.3 untuk kantor operasional pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
2	Pengadilan Agama Jakarta Selatan		
		Sesuai	Sesuai

	 Luas Tanah : 6.114 M² Luas Bangunan : 2.244 M²		
3	Pengadilan Agama Jakarta Pusat		
	 Luas Tanah : 3.350 M² Luas Bangunan : 2.880 M²	Sesuai	Sesuai
4	Pengadilan Agama Jakarta Utara		
	 Luas Tanah : 1.919 M² Luas Bangunan : 1600 M²	Sesuai	Sesuai
5	Pengadilan Agama Jakarta Barat		
	 Luas Tanah : 3.245 M² Luas Bangunan : 1.200 M²	Sesua	Sesuai

6	Pengadilan Agama Jakarta Timur		
	 Luas Tanah : 3.004 M² Luas Bangunan : 1.744 M²	Belum Gedung PA Jakarta timur masih milik Pemda DKI Jakarta sampai sekarang dan tidak ada berita acara serah terima gedung kantor PA Jakarta Timur yang ada hanya berita acara serahterima kunci No. 002/BAS-PA/JPK/III/04 tanggal 1 Maret 2014	Belum Prototype Gedung PA Jakarta Timur belum memenuhi standar karena tidak Representatif dan tidak cukup memadai, tidak sesuai dengan standar ideal seperti yang termasuk dalam buku I sesuai keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 143/KMA/GK/III/2007

b. Rumah Dinas

Rumah dinas Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta merupakan sarana penunjang untuk pejabat yang melaksanakan tugasnya di wilayah DKI Jakarta, rumah dinas di PTA DKI Jakarta antara lain

NO	Uraian	Jml	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua PTA	1	v			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	v			
3	Rumah Dinas Hakim	-	-			
4	Rumah Dinas Panitera	1	v			
5	Rumah Dinas Sekretaris	-	-			

6	Rumah Dinas Ketua PA	5	v			

c. Kendaraan Operasional

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sarana kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua). Secara umum ketersediaan kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) masih memerlukan peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya/peremajaan usia kendaraan. Profil kendaraan roda 4 (empat) dan 2 (dua) di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta, sebagai berikut :

Data Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

SATUAN KERJA	JENIS KENDARAAN	TAHUN PEROLEHAN	PEMEGANG SIP	KET
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	Toyota Camry	2005	Ketua	
	Toyota Altis 1.8G	2006	Wakil Ketua	
	Toyota Innova	2009	Sekretaris	
	Toyota Vios	2009	Panitera	
	Avanza 1.5S	2011	Kabag	
	Avanza G	2011	Wapan	
	Toyota Altis 1.8E	2004	Operasional	
	Kijang Kapsul	2002	Kabag	
	Jumlah Kendaraan Roda 4 = 8 Unit			
	Megapro 125	2005	Operasional	Rusak Berat
	Supra X 125	2007	Operasional	
	Supra X 125	2008	Kasubbag	
	Supra X 125	2008	Kasubbag	
	Vario 125	2008	Kasubbag	

	Vario 125	2008	Kasubbag	
	Supra X 125	2008	Panmud	
	Supra X 125	2008	Panmud	
	Supra X 125	2008	Bendahara	
	Jumlah Kendaraan Roda 2 = 8 Unit			
Pengadilan Agama Jakarta Selatan	Sedan Altis	2007	Ketua	
	Sedan Vios	2006	Wakil Ketua	
	Minibus Kijang KF	2002	Operasional	Rusak Berat
	Minibus Avanza	2011	Panitera	
	Minibus Avanza	2011	Sekretaris	
	Jumlah Kendaraan Roda 4 = 5 Unit			
	Mega Pro	2005	Operasional	Rusak Berat
	Supra X 125	2008	Operasional	
	Supra X 125	2008	Operasional	
	Supra X 125	2008	Panmud	
	Supra X 125	2008	Panmud	
	Supra X 125	2008	Panmud	
	Vario	2009	Bendahara	
	Vario	2009	Operasional	
	Supra X 125	2009	Bendahara Perkara	
	Supra X 125	2009	Kasubag	
	Supra X 125	2009	Kasubag	
	Supra X 125	2009	Operasional	
	Jumlah Kendaraan Roda 2 = 12 Unit			
Pengadilan Agama Jakarta	Sedan Vios	2006	Ketua	

Barat				
	Sedan Proton	2011	Wakil Ketua	
	Minibus Kijang KF	2003	Kasubbag Umum	Rusak berat
	Minibus Avanza	2011	Panitera	
	Minibus Avanza	2011	Sekretaris	
	Jumlah Kendaraan Roda 4 = 5 Unit			
	Sepeda Motor	1998	Operasional	Rusak Berat
	Sepeda Motor	2005	Operasional	
	Sepeda Motor	2009	Panmud Gugatan	
	Sepeda Motor	2009	Panmud Permohonan	
	Sepeda Motor	2009	Operasional	
	Jumlah Kendaraan Roda 2 = 5 Unit			
Pengadilan Agama Jakarta Utara	Sedan Altis	2013	Ketua	
	Sedan Vios	2009	Wakil Ketua	
	Minibus Kijang	2010	Operasional	Rusak Berat
	Minibus Avanza	2011	Panitera	
	Minibus Avanza	2011	Sekretaris	
	Jumlah Kendaraan Roda 4 = 5 Unit			
	Sepeda Motor	2005	Operasional	Rusak Berat
	Sepeda Motor	2008	Wapan	
	Sepeda Motor	2008	Panmud	
	Sepeda Motor	2008	Panmud	
	Sepeda Motor	2008	Panmud	
	Sepeda Motor	2008	Kasubag	

	Sepeda Motor	2009	Kasubag	
	Sepeda Motor	2009	Bendahara	
	Sepeda Motor	2009	Jurusita	
	Jumlah Kendaraan Roda 2 = 9 Unit			
Pengadilan Agama Jakarta Timur	Sedan Vios	2006	Wakil Ketua	
	Sedan Proton	2011	Ketua	
	Minibus Kijang	2000	Operasional	Rusak Berat
	Minibus Avanza	2011	Sekretaris	
	Minibus Avanza	2011	Panitera	
	Jumlah Kendaraan Roda 4 = 5 Unit			
	Sepeda Motor	2006	Bendahara	
	Sepeda Motor	2008	Kasub Umum	
	Sepeda Motor	2008	Kasub Kepegawaian	
	Sepeda Motor	2008	Kasub Pelaporan	
	Sepeda Motor	2008	Panmud Gugatan	
	Jumlah Kendaraan Roda 2 = 5 Unit			
Pengadilan Agama Jakarta Pusat	Sedan Altis	2012	Ketua	
	Sedan Vios	2006	Panitera	
	Sedan Timor	2009	Operasional	Rusak Ringan
	Minibus Kijang	2010	Operasional	Rusak Ringan
	Minibus Avanza	2011	Wakil Ketua	

	Minibus Avanza	2011	Sekretaris	
	Jumlah Kendaraan Roda 4 = 6 Unit			
	Sepeda Motor	2008	Operasional	Rusak Berat
	Sepeda Motor	2008	PDG	
	Sepeda Motor	2008	Operasional	Rusak Berat
	Sepeda Motor	2008	Kasub. Perencanaan	
	Sepeda Motor	2008	Panmud Gugatan	
	Sepeda Motor	2008	Bendahara	
	Sepeda Motor	2008	Operasional	
	Sepeda Motor	2009	Kasub. Kepegawaian	
	Sepeda Motor	2009	Panmud hukum	
	Jumlah Kendaraan Roda 2 = 9 Unit			

d. Alat Pengolah Data

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, seluruh Pengadilan Agama se-DKI Jakarta termasuk Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran untuk pengadaan perangkat alat pengolah data, sebagai berikut:

Pengadaan Alat Pengolah Data Tahun 2017

SATUAN KERJA	JENIS ALAT PENGOLAH DATA	JUMLAH
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	1. Laptop 2. Komputer/PC 3. Printer 4. Anti Virus	3 Unit 4 Unit 3 Unit 1 Sistem

Pengadilan Agama Jakarta Selatan	1. Laptop 2. Komputer/PC 3. Printer 4. Anti Virus 5. Scaner Barkode 6. LCD Projektor 7. E-Skum 8. ATR.	1 Unit 3 Unit 5 Unit 1 System 1 Unit 1 Unit 1 Unit/system 1 Unit/system
Pengadilan Agama Jakarta Barat	1. Laptop 2. Komputer/PC 3. Printer 4. Anti Virus 5. UPS 6. ATR 7. E-Skum 8. CCTV 9. Finger Scan 10. TV LED	1 Unit 4 Unit 4 Unit 1 Sistem 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Unit 1 Unit
Pengadilan Agama Jakarta Utara	1. Laptop 2. Komputer 3. Printer 4. Antivirus 5. UPS 6. E-Skum 7. ATR 8. TV LED	1 Unit 6 Unit 4 Unit 1 Sistem 1 Unit 1 Unit 1 unit 1 Unit
Pengadilan Agama Jakarta Timur	1. Laptop 2. Komputer 3. Printer 4. Anti Virus 5. ATR 6. E-Skum 7. UPS	1 Unit 4 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 unit
Pengadilan Agama Jakarta Pusat	1. Laptop 2. Komputer 3. Printer 4. Finger Print 5. UPS 6. Anti Virus 7. ATR 8. E-Skum	1 unit 4 unit 4 unit 1 Unit 2 Unit 1 Sistem 1 Unit 1 Unit

e. Matrik Sarana dan Prasarana

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

NO	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Ket
I	PTA DKI Jakarta	1	
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil	7	

3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Wakil Panitera	1	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Panitera Pengganti	2	
9	Ruang Kabag	2	
10	Ruang Kesekretariatan	2	
11	Ruang Sidang	4	
12	Ruang Perpustakaan	1	
13	Ruang Rapat / Aula	1	
14	Ruang Arsip	1	
15	Sarana/Prasarana Fasisitas Perkantoran		
16	Komputer	55	
17	Laptop	4	
18	Printer	23	
19	Scaner	1	
20	Server	2	
21	Router	1	
22	LCD Proyektor	2	
23	PABX	1	
24	Mesin Ketik Listrik	2	
25	Mesin Foto Copy	1	
26	AC Split	30	
27	AC Portable	2	
28	Fax	1	
29	Lemari Arsip	2	
30	Brankas	3	
31	Mesin Absen	1	
32	Mic Conference	16	

33	Dispenser	7	
34	Handy Cam	1	
35	Audio Mixing Portable	1	
36	Camera Digital	2	
37	Local Area Nerwork (LAN)	6	
38	Papan Visual / Papan Nama	2	

Pengadilan Agama Jakarat Timur

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
A. Sarana/Prasarana Gedung			
1	Ruang Ketua	1	Lantai II
2	Ruang Wakil Ketua	1	Lantai II
3	Ruang Hakim	1	Lantai II
4	Ruang Panitera	1	Lantai II
5	Ruang Panitera pengganti	1	Lantai II
6	Ruang Panmud	1	Lantai II
7	Ruang Informasi Teknologi	1	Lantai II
8	Ruang Sekretaris	1	Lantai III
9	Ruang Kesekretariatan	1	Lantai III
10	Ruang Bendahara	1	Lantai III
11	Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti	1	Lantai III
12	Raung Perpustakaan	1	Lantai III
13	Ruang Aula	1	Lantai III
14	Ruang Arsip Perkara	1	Lantai III
15	Ruang Sidang 1	1	Lantai I
16	Ruang Sidang II	1	Lantai I
17	Ruang Sidang III	1	Lantai I
18	Ruang Sidang IV	1	Lantai I
19	Ruang Sidang V	1	Lantai I
20	Ruang Kasir	1	Lantai I
21	Ruang Bank	1	Lantai I
22	Ruang Pelayanan	1	Lantai I
23	Ruang Laktasi	1	Lantai I
24	Ruang Posbakum	1	Lantai I
25	Ruang Mediasi	1	Lantai I

B. Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran			
1	Mobil Sedan	2	
2	Mobil Penumpang 14 orang kebawah	3	
3	Sepeda Motor	5	
4	Foto Mesin Copy	1	
5	AC	50	
6	Faximilie	1	
7	TV	5	
8	Telpon/PABX	1	
9	Scaner	5	
10	Printer	27	
11	Router	1	
12	PC Unit	55	
13	Laptop	5	
14	Infokus	1	
15	Lemari penyimpan	53	
16	Lemari Besi/Metal	1	
17	Lemari Kayu	21	
18	Rak Besi	35	
19	Rak Kayu	3	
20	Filling Cabinet Besi	8	
21	Brandkas	2	
22	Rotary Filling	3	
23	Mobil File	3	
24	Locker	9	
25	CCTV	4	
26	Papan Visual/Papan Nama	6	
27	White Board	2	
28	Mesin Absensi	1	
29	LCD Projector/Infocus	1	
30	Meja Kerja Besi/Metal	1	
31	Meja Kerja Kayu	127	
32	Kursi Kayu	39	
33	Sice	6	
34	Bangku panjang Besi/Metal	3	
35	Bangku panjang Kayu	6	
36	Meja Rapat	1	
37	Meja Komputer	12	

38	Meja telpon	8	
39	Meja Resepsionis	1	
40	Sketsel	1	
41	Kursi Fiber Glas/Plastik	20	
42	Pot Bunga	4	
43	Jam Elektronik	16	
44	Mesin penghisap debu/Vacum Cleaner	1	
45	Mesin potong Rumput	1	
46	Lemari Es	2	
47	Kipas Angin	3	
48	Loudspeaker	6	
49	Stabilisator	1	
50	Alat Hiasan	2	
51	Lambang Garuda Pancasila	5	
52	Tiang Bendera	6	
53	Tangga Alumunium	1	
54	Kaca Hias	12	
55	Dispenser	4	
56	Mimbar/Podium	1	
57	Palu Sidang	3	
58	Lambang Instansi	1	
59	Handy Cam	1	
60	Karpet	0	
61	Asbak Tinggi	3	
62	Audio Mixing Portable	1	
63	UPS (Uninterruptible Power Supply)	3	
64	Rak Peralatan	2	
65	Camera Digital	1	
66	Mesin Barcode	1	
67	Wirelles Amplifier	1	
68	Finger Printer	1	
69	Komputer jaringan lainnya	2	
70	Server	4	
71	Peralatan jaringan lainnya	1	
72	Jet Pump	2	
73	Bangunan Gedung Tempat olah Raga	1	
74	Instalasi Komputer	1	
75	Jaringan Transmisi Tegangan diatas 300	1	

	KVA		
76	Monografi	15	
77	Buku Lainnya	36	
78	Bahan kartografi Lainnya	10	
79	Safware Komputer	2	
80	Kursi Besi/Metal	188	
81	Breaket Stendeng Peralatan	6	
82	Lambang Presiden/Wakil presiden	1	
83	Micropone	1	
84	Micropone table stand	1	
85	Kabel	6	
86	Audio Ample Player	5	
87	Compat disk player	2	
88	Modulation Monitor Sepeker Cabaret	60	
89	Power Ample player	2	
90	LCD Monitor	1	
91	Warles Ample Player	1	
92	Remot Spceaker Mickopon	2	
93	Mini Komputer	2	
94	Note Box	6	

Peengadilan Agama Jakarta Selatan

No.	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	4	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	5	
7	Ruang Kepaniteraan	1	
8	Ruang Kesekretariatan	1	
9	Ruang Panmud Hukum	1	
10	Ruang Panmud Permohonan	1	
11	Ruang Panmud Gugatan	1	
12	Ruang Kasubag Perencanaan, IT dan	1	

	Pelaporan		
13	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	
14	Ruang Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	
15	Ruang Panitera Pengganti	2	
16	Ruang Jurusita / Jurusita Pengganti	2	
17	Ruang Rapat	1	
18	Ruang Kasir	1	
19	Ruang Mediasi	2	
20	Ruang Posbakum	1	
21	Ruang Pendaftaran	1	
22	Ruang Meja Informasi	1	
23	Ruang Arsip	1	
24	Ruang Server	1	
25	Ruang Perpustakaan	1	
26	Ruang Laktasi	1	
27	Smoking Area	1	
28	Ruang Koperasi	1	
29	Gudang	2	Lt. 1 dan Lt.2
30	Toilet Pria	3	Lt. 1 dan Lt.2
31	Toilet Wanita	3	Lt. 1 dan Lt.2
32	Pos Satpam	2	

Pengadilan Agama Jakarta Utara

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	
1	Mesin Fotocopy	1	Buah
2	Lemari Besi/Metal	15	Buah
3	Lemari Kayu	16	Buah
4	Rak Besi	20	Buah
5	Filing Cabinet Besi	22	Buah
6	Filing Cabinet Kayu	1	Buah
7	Brandkas	3	Buah
8	Rotary Filling	3	Buah
9	Buffet	8	Buah

10	Locker	4	Buah
11	Tabung Pemadam	16	Buah
12	Mesin Absensi	2	Buah
13	LCD Projector/Infocus	1	Buah
14	Mesin Antrian	1	Buah
15	Meja Kerja Besi/Metal	1	Buah
16	Meja Kerja Kayu	72	Buah
17	Kursi Besi/Metal	213	Buah
18	Kursi Kayu	53	Buah
19	Sice	8	Buah
20	Bangku Panjang Besi/Metal	13	Buah
21	Meja Rapat	7	Buah
22	Meja Komputer	38	Buah
24	Meja Telepon	1	Buah
25	Meja Resepsionis	3	Buah
26	Jam Elektronik	15	Buah
27	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Buah
28	A.C. Split	45	Buah
29	Uninterruptible	17	Buah
30	Camera Digital	1	Buah
31	Facsimile	1	Buah
32	Genset	1	Buah
33	Serial	1	Buah
34	P.C Unit	63	Buah
35	Lap Top	14	Buah
36	Printer (Peralatan	50	Buah
37	Server	6	Buah
38	Router	1	Buah
39	Hub	1	Buah
40	Modem	1	Buah

D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS LAINNYA

PAGU ANGGARAN DIPA 01 (BUA) TAHUN 2017
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	TOTAL PAGU
1	401112	PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA	24,365,801,000	1,962,425,000	157,500,000	26,485,726,000
2	400616	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	6,347,915,000	1,424,209,000	188,124,000	7,960,248,000
3	400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	7,494,026,000	1,292,163,000	174,600,000	8,960,789,000
4	400631	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	7,119,147,000	1,040,862,000	182,000,000	8,342,009,000
5	400647	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	9,802,977,000	1,339,825,000	209,500,000	11,352,302,000
6	400653	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	10,437,338,000	1,871,260,000	142,000,000	12,450,598,000
TOTAL			**65,567,204,000**	**8,930,744,000**	**1,053,724,000**	**75,551,672,000**

Jumlah Anggaran DIPA 2017 untuk Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya sebesar Rp. **75.551.672.000,-** (Tujuh puluh lims milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Alokasi anggaran tahun 2017 tersebut terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar **Rp. 65.567.204.000,-** (Enam puluh lima milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah).
2. Belanja Barang sebesar **Rp. 8.930.744.000,-** (Delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).
3. Belanja Modal sebesar **Rp. 1.053.724.000,-** (Satu milyar lima tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN 2017
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	BELANJA PEGAWAI				
			PAGU	REALISASI	(%)	SISA ANGGARAN	(%)
1	401112	PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA	24,365,801,000	24,321,406,914	99.82	44,394,086	0.18
2	400616	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	6,347,915,000	5,771,741,669	90.92	576,173,331	9.08
3	400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	7,494,026,000	7,439,594,770	99.27	54,431,230	0.73
4	400631	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	7,119,147,000	7,065,077,135	99.24	54,069,865	0.76
5	400647	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	9,802,977,000	9,772,286,326	99.69	30,690,674	0.31
6	400653	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	10,437,338,000	10,436,622,156	99.99	100,389,523	0.96
TOTAL			**65,567,204,000**	**64,806,728,970**	**98.84%**	**760,475,030**	**1.16%**

Uraian secara rinci tentang Realiasi Belanja Pegawai di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- PAGU DIPA

Belanja pegawai pada tahun anggaran 2017 **Rp. 65.567.204.000,-** (Enam puluh lima milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat ribu rupiah).

- REALISASI

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2017 sebesar **Rp 64.806.728.970,-** (Enam puluh empat milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 98,84 % dari belanja pegawai.

- SISA ANGGARAN.

Sisa anggaran untuk belanja pegawai tahun 2017 sebesar **Rp. 760.475.030,-** (Tujuh ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh rupiah) atau 1,16 % dari belanja pegawai.

REALISASI BELANJA BARANG TAHUN 2017

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	BELANJA BARANG				
			PAGU	REALISASI	(%)	SISA ANGGARAN	(%)
1	401112	PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA	1,962,425,000	1,948,856,797	99.31	13,568,203	0.69
2	400616	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	1,424,209,000	1,251,552,972	87.88	172,656,028	12.12
3	400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	1,292,163,000	1,257,425,404	97.31	34,737,596	2.69
4	400631	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	1,040,862,000	1,010,289,211	97.06	30,572,789	2.94
5	400647	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	1,339,825,000	1,306,906,665	97.54	32,918,335	2.46
6	400653	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	1,871,260,000	1,833,982,080	98.01	37,277,920	1.99
TOTAL			**8,930,744,000**	**8,609,013,129**	**96.40%**	**321,730,871**	**3.60%**

Uraian secara rinci tentang Realiasi Belanja Barang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- PAGU DIPA

Belanja barang pada tahun anggaran 2017 sebesar **8.930.744.000,-** (Delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- REALISASI

Realisasi belanja barang tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 8.609.013.129,-** (Delapan milyar enan ratus sembilan juta tiga belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah). atau sebesar 96,40 % dari total belanja barang.

- SISA ANGGARAN

Sisa anggaran belanja barang tahun 2017 sebesar **Rp. 321.730.871,-** (Tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) atau sebesar 3,60% dari total belanja barang.

2. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG RI

REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2017
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	BELANJA MODAL				
			PAGU	REALISASI	(%)	SISA ANGGARAN	(%)
1	401112	PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA	157,500,000	156,343,000	99.27	1,157,000	0.73
2	400616	PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT	188,124,000	183,566,910	97.58	4,557,090	2.42
3	400622	PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA	174,600,000	173,270,000	99.24	1,330,000	0.76
4	400631	PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT	182,000,000	181,241,500	99.58	758,500	0.42
5	400647	PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR	209,500,000	204,527,500	97.63	4,972,500	2.37
6	400653	PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN	142,000,000	140,797,250	99.04	3,851,250	2.71
TOTAL			**1,053,724,000**	**1,039,746,160**	**98.67**	**13,977,840**	**1.33**

Jumlah anggaran DIPA Tahun 2017 di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Program sarana dan prasarana sebesar **Rp. 1.053.724.000,-** (Satu milyar lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Uraian secara rinci tentang Realiasi Belanja Modal di Lingkungan PTA Jakarta Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- PAGU DIPA

Belanja Modal pada tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 1.053.724.000,-** (Satu milyar lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- REALISASI

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 1.039.746.160,-** (Satu milyar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah). atau sebesar 98,67 % dari total belanja modal.

- SISA ANGGARAN

Sisa anggaran belanja modal tahun 2017 sebesar **Rp. 13.977.840,-** (Tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 8,06 % dari total belanja modal.

3. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN

REALISASI ANGGARAN DIPA TAHUN 2017

DIPA 04 BADILAG

NO	KODE SATKER	SATKER	BELANJA BARANG				
			PAGU	REALISASI	(%)	SISA ANGGARAN	(%)
1	401113	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	37,500,000	37,500,000	100.00	-	0.00
2	400616	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	172,080,000	125,606,000	72.99	46,474,000	27.01
3	400623	Pengadilan Agama Jakarta Utara	289,480,000	288,668,000	99.72	812,000	0.28
4	400632	Pengadilan Agama Jakarta Barat	168,480,000	168,430,000	99.97	50,000	0.03
5	400648	Pengadilan Agama Jakarta Timur	187,200,000	187,200,000	100.00	-	0.00
6	400654	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	187,200,000	186,835,000	99.81	365,000	0.19
JUMLAH			1,041,940,000	994,239,000	95.42	47,701,000	4.58

Untuk DIPA 04 (Badilag) tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama Se-DKI Jakarta Program peningkatan manajemen peradilan mendapatkan total pagu anggaran sebesar Rp. **1.041.940.000,-** (satu milyar empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 994.239.000,- (**Sembilan ratus sembilan puluh empat dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau sebesar 95,42 % dari pagu anggaran.

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP

Teknologi informasi saat ini merupakan kebutuhan dalam menunjang setiap aspek kegiatan. Seiring perkembangannya, teknologi informasi saat ini dapat berfungsi sebagai penyedia informasi yang efektif bagi para pengguna maupun masyarakat luas. Kemudahan akses informasi ini merupakan keniscayaan dan kebutuhan bagi publik. Kemudahan dalam memperoleh informasi berbasis teknologi ini menjadi ciri khas bagi intansi publik karena hal ini merupakan aspek penting dari palayanan.

Pelayanan publik bagi lembaga peradilan berupa informasi tentang informasi perkara. Setiap perkara yang telah didaftarkan di pengadilan dapat diketahui dengan mengakses portal SIPP pada website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan *web-based application* suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan Internet dan intranet. Dengan metoda tersebut para pihak ataupun yang berkepentingan untuk memperoleh data tentang berperkara menjadi lebih cepat dapat diterima informasinya.

Sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Implementasi Aplikasi SIPP versi 3.1.1 dilingkungan Peradilan Agama dan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1012/SEK/HM.02.3/12/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Implementasi SIPP versi 3.2.0, telah dilaksanakan update aplikasi tersebut pada akhir tahun 2017 oleh Pengadilan Agama se-DKI Jakarta.

Dengan aplikasi SIPP versi 3.2.0 diharapkan Pengadilan Agama se-DKI Jakarta semakin bisa menjawab banyak kebutuhan para pengguna di satker terkait bisnis proses penyelesaian perkara. Peningkatan menu dan bertambahnya berbagai template menjadi nilai

tambah dari aplikasi SIPP terbaru ini. Menu delegasi panggilan salah satunya. Menu ini dapat membantu percepatan proses pengiriman panggilan dan membalas kembali delegasi panggilannya karena langsung melalui aplikasi SIPP secara *real time.* Begitu pula dengan *upload* putusan. Selama ini *upload* putusan selalu harus melalui aplikasi direktori putusan. Dengan versi terbaru ini, setiap *user*, terutama Panitera Pengganti atau Hakim dapat langsung meng*upload* putusannya melalui menu *upload* yang tersedia di SIPP dan saat itu juga secara otomatis ter*upload* pada direktori putusan tanpa harus *upload* ulang. Lalu tersedia juga menu monitoring siapa-siapa saja pengguna SIPP pada waktu tertentu yang tentu saja berguna bagi pimpinan untuk melakukan pengawasan. Terkait template, sudah semakin banyak disediakan yang tentunya sangat dibutuhkan para pengguna. Antara lain template relaas panggilan, berita acara, amar putusan, dan masih banyak lagi.

Untuk SIPP Tingkat Banding, Mahkamah Agung telah merilis versi perdananya bersamaan dengan di*launching*nya SIPP versi awal. Hanya saja untuk SIPP Banding versi terbarunya, belum dirilis karena masih dalam tahap pengembangan. Namun demikian, SIPP Banding memiliki banyak kelebihan dibanding SIPP Tingkat Pertama. Walaupun sama-sama *web base*, SIPP Banding proses kerjanya langsung *online* dan setiap aktifitas input pada aplikasi ini, langsung tersimpan dan terkoneksi pada server MA. Uniknya lagi, setiap user dapat melakukan aktifitas inputnya dimana saja dan kapan saja, tidak terbatas ruang dan waktu asalkan terhubung dengan internet menggunakan komputer, laptop bahkan smartphone sekalipun (handphone pintar). Kelemahannya, MA belum membuat aplikasi SIPP Banding yang diperuntukan bagi publik sebagai informasi perkara pada tingkat banding.

F. Regulasi Tahun 2017

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/1308/OT.00.3/7/2017 tentang Penetapan Pengurus

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM) Daerah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/7354/OT.01.3/8/2017 tentang Penunjukan Tim Asistensi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

LAPTAH 2017

BAB IV

PENGAWASAN

BAB IV
PENGAWASAN

A. Internal

1. Pengawasan Bidang

1.1 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Dalam program pengawasan internal Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah menugaskan Tim Hakim Tinggi Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Nomor W9-A/1305/PS.01/7/2017 untuk melaksanakan Pengawasan Bidang pada tanggal 8 s.d 10 Agustus 2017. Adapun bidang pengawasannya meliputi :

- Kepaniteraan Banding
- Kepaniteraan Hukum
- Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
- Sub Bagian Tata Usaha dan Tumah Tangga
- Sub Bagian Rencana Program dan Aggaran
- Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

1.2 Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah membentuk Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta PusatNomor: W9- A1/1273/P.03/2/2017 tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat

1.3 Pengadilan Agama Jakarta Barat

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor : W9-A2/1058/PS.00/3/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Hakim Pengawas Bidang / Hakim Pembimbing Pengadilan Agama Jakarta Barat

1.4 Pengadilan Agama Jakarta Timur

Di samping pengawasan melekat secara hirarkis oleh atasan langsung, Pengadilan Agama Jakarta timur telah menunjuk hakim pengawas bidang sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: W9-A3/297/KP.07.6/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.

1.5 Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing–masing berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor W9-A4/3545/PS.01/4/2017 tanggal 3 April 2017 tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dilakukan dua kali dalam setahun dan yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017.

1.6 Pengadilan Agama Jakarta Utara

Hakim Pengawas bidang di tingkat Pengadilan Agama berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor : W9-A5/ 38 /PW.01.1/3/SK/2017 tanggal 1 Maret 2017, tentang Penunjukan Koordinator Pengawasan dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Jakarta Utara.

2. Pengawasan Daerah

- Hakim pengawas daerah melakukan pengawasan ke pengadilan agama se-DKI Jakarta berdasarkan SK nomor : W9-A/774/PS.01/4/2017 tentang penunjukan hakim pengawas daerah yang dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 Mei 2017 berdasarkan surat tugas nomor W9-A/854/PS.01/5/2017 dan nomor W9-A/855/PS.01/5/2017;

- Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama se-DKI Jakarta pada tanggal 10 s.d 12 Oktober 2017;
- Pembinaan dan Pengawasan Implementasi SIPP versi terbaru 3.2.0 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 20,21,27 s.d 29 Desember 2017 oleh Tim IT di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

B. Evaluasi

Evaluasi pengawasan ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi terhadap temuan-temuan berdasarkan hasil pengawasan yang telah ditetapkan. Hasil dari evaluasi ini kemudian dibandingkan dengan standard yang ada, oleh karena itu evalusai ini harus dilakukan dengan menggunakan ukuran yang akurat, dimana instrumentnya harus disusun secara lengkap dan valid. Mengadakan pengukuran ini harus terlebih dahulu dilakukan, karena tindakan perbaikan dapat dilakukan berdasarkan dari hasil evaluasi yang didahului oleh kegiatan pengukuran tersebut.

Setelah melakukan pengawasan bidang dan pengawasan daerah, dilaksanakan evaluasi yang bertujuan untuk perbaikan pelaksanaan tugas kedepannya dengan melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.

LAPTAH 2017

BAB V

PENUTUP

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada tahun 2017 SIPP 3.2.0 di Pengadilan Agama se-DKI Jakarta sudah 100% ter-*update* dan telah berjalan.
2. 80 % Pengadilan Agama se-DKI Jakarta telah menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama.
3. Peningkatan jumlah perkara banding yang diterima sebesar 31% dibandingkan dengan tahun 2016
4. Peningkatan jumlah perkara pada pengadilan tingkat pertama yang di terima sebesar 7,34 % dibandingkan dengan tahun 2016
5. Kondisi tanah dan bangunan gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta masih status pinjam pakai milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
6. Masih kurangnya SDM di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

B. SARAN

1. Penambahan anggaran belanja modal peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI Jakarta.
2. Penambahan sumber daya manusia.
3. Agar Mahkamah Agung RI dapat mengupayakan proses hibah tanah dan gedung milik Pemprov DKI Jakarta yang digunakan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Laporan Tahunan 2017

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Jalan Radin Inten II no 3 Duren Sawit Jakarta Timur
Telp. 021-86902313/ Fax. 021-86902314
Email : ptajakarta2017@yahoo.co.id
Website : www.pta-jakarta.go.id